



# 2024

# Laporan Kinerja

## BNN KOTA KEDIRI

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KEDIRI**

Jl. Selomangleng No.03 Pojok Mojoroto, Kota Kediri

 infobnn\_kotakediri  bnnkotakediri  @bnn\_kotakediri

 infobnn\_kotakediri  [kedirikota.bnn.go.id](http://kedirikota.bnn.go.id)

 [humas bnn kota kediri](#)

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat disusun dan selesai tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas BNN Kota Kediri kepada publik atas pelaksanaan tugas serta penggunaan anggaran negara yang dipercayakan kepada BNN Kota Kediri.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi dan penilaian terbuka oleh publik atas kinerja BNN Kota Kediri dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Kota Kediri. Lebih lanjut, Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja yang berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Secara umum, pelaksanaan kinerja BNN Kota Kediri Tahun 2024 adalah baik dengan realisasi anggaran 98.79%. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan kinerja seluruh bidang di lingkungan BNN Kota Kediri dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban BNN Kota Kediri kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi. Demikian Laporan ini kami buat dan semoga Tuhan Yang Maha Berilmu selalu memberi Petunjuk dan Kemudahan kepada kita semua. Amin.

Kediri, 08 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Kediri

Yudha Wirawan, S.E., M.M.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi .....	2
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>5</b>
A. Rencana Program Kerja .....	5
B. Rencana Kinerja Tahunan .....	7
C. Perjanjian Kinerja .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>11</b>
A. Analisis Capaian Sasaran .....	11
B. Akuntabilitas Keuangan .....	40
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>45</b>
Kesimpulan .....	45
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>48</b>

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, tujuan BNN adalah:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ditetapkan Sasaran Strategis. Jika dalam konteks lembaga, BNN mengenal 'Sasaran Strategis', maka dalam konteks BNN Kabupaten/ Kota adalah berbentuk 'Sasaran Kegiatan' yang coba diwujudkan melalui kinerja kegiatan dengan indikatornya.

Sebagai bagian dari instansi BNN secara vertikal, BNN Kota Kediri melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah kota. Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Kediri Tahun 2024, BNN Kota Kediri melaksanakan program P4GN melalui 10 (sepuluh) sasaran kegiatan yang akan dicapai dengan 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan.

Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan, dengan hasil 2 (dua) indikator tercapai melebihi target dan 1 (satu) indikator belum mencapai target. Adapun rinciannya sebagai berikut: Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target 55,67 tercapai 55,65. Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba target 89,911 tercapai 91,696. Indeks Kemandirian Partisipasi target 3,80 dengan realisasi capaian 3,82.

Fungsi Rehabilitasi mempunyai 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan, di mana 3 (tiga) indikator tercapai sesuai target, dan 2 (dua) indikator tercapai melebihi target dengan rincian sebagai berikut: Persentase penyalah guna dan/ atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan target 68% tercapai 71,88%. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan target dan capaian 10 (sepuluh) Orang. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dengan target 2 (dua) lembaga, tercapai 2 (dua) lembaga. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional dengan target dan capaian 2 (dua) unit. Indeks Kepuasan Penerima Layanan

Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN dengan target 3,42 Indeks dan realisasi capaian 3,45 Indeks.

Fungsi Pemberantasan mempunyai 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak tercapai, yaitu jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21. Pada tahun 2024 tidak ada berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 yang ditangani oleh Seksi Pemberantasan karena adanya arahan dari pusat perihal ditariknyaa anggaran penyidikan di satker BNN Kabupaten/ Kota dan dialihkan ke BNNP masing-masing.

Sub Bagian Umum memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yang semuanya tercapai melebihi target, dengan rincian sebagai berikut: Nilai kinerja anggaran BNN dengan target 91, tercapai 100. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan target 98,73, tercapai 100.

Pagu anggaran BNN Kota Kediri tahun 2024 untuk mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tersebut di atas sebesar Rp.1.821.521.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.799.564.588,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) atau 98,76%.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

Beberapa prinsip dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Terkait pengelolaan praktik sistem akuntabilitas pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai aturan turunan teknisnya diterbitkan pula Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut kemudian diperjelas lagi untuk lingkup Instansi Badan Narkotika Nasional dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Melalui sejumlah regulasi tersebut diharapkan dapat tercipta sistem tatanan pemerintahan yang akuntabel bagi seluruh satuan kerja BNN. Setiap kegiatan, program, dan anggaran negara yang dikelola pemerintah harus dapat memberikan hasil (*result oriented government*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam ketentuan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Badan Narkotika Nasional meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan secara berjenjang mulai pada tingkat Lembaga hingga Unit Kerja Vertikal, termasuk di dalamnya BNN Kota Kediri.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, maka salah satu aspek akuntabilitas kinerja yang perlu diperhatikan adalah Pelaporan Kinerja. Melalui Laporan Kinerja inilah BNN Kota Kediri akan menyampaikan kepada publik terkait rencana kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan, pengelolaan pengukuran kinerjanya, serta gambaran pelaksanaan program kegiatan dengan berbagai dinamikanya. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan sebuah kewajiban bagi BNN Kota Kediri sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran selama tahun 2024 dan juga dalam pengejawantahan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan BNN.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
9. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/ 388/ XII/ 2015/ BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN.

## **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI**

### **1. Tugas Pokok**

Badan Narkotika Nasional Kota Kediri bertugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Kediri. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020, meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas tersebut di atas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

## **2. Fungsi Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kota Kediri menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kota Kediri;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Kota Kediri;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kota Kediri;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Kediri

- e. Pelayanan administrasi BNN Kota Kediri
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kota Kediri.

### 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Kediri adalah sebagai berikut:

#### STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2024



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA PROGRAM KERJA**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap kementerian/ lembaga wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kementerian/ lembaga. Berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, bahwa Unit Kerja Vertikal, termasuk BNN Kota Kediri menyusun Rencana Program Kerja Jangka Menengah untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Rencana Program Kerja Jangka Menengah Unit Kerja Vertikal Tingkat Provinsi, Rencana Strategis Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya, dan Rencana Strategis Lembaga.

Arah kebijakan dan strategi operasional BNN Kota Kediri merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. Peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. Pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan kapasitas rehabilitasi;
5. Penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah Kota Kediri. Selain itu, dalam rumusan kebijakan dan strategi BNN Kota Kediri juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Kabupaten/ Kota sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Kota Kediri sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengusulkan untuk mengikuti pelatihan;

2. Menjalin hubungan yang baik dengan Pemerintah Kota Kediri dan Instansi terkait lainnya;
3. Membangun jaringan dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan capaian kinerja dalam bidang P4GN;
4. Meningkatkan konten di media sosial BNN Kota Kediri untuk Kampanye War on Drugs terutama di kalangan milenial.

Adapun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BNN Kota Kediri Tahun 2020-2024, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak & remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan & peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,03	51	52	53	53,51
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	N/A	78,67	78,68	78,69	78,7
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	3,34	3,34	3,35	3,36	3,37
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	0	0	0	0	0
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lbg	2 Lbg	2 Lbg	2 Lbg	2 Lbg
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	-	3,2	3,2	3,2	3,2
6.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1	1	1	1	1
7.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika						

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
8.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	88	90	92	94	94
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK	90	94	94	96	96

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

BNN Kota Kediri menetapkan Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai arah kebijakan dan strategi yang termuat dalam Rencana Program Kerja 2020-2024 serta disesuaikan kembali dengan target nasional dan arahan dari pusat, sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ KOMPONEN/ AKTIVITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET / VOL	SATUAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi (5936)	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	55.67	Indeks	Rp.82.000.000,-
2.	Penyelenggaraan Advokasi (3247)	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	89.911	Indeks	Rp.106.000.000,-
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat (3257)	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.80	Indeks	Rp.211.695.000,-
4.	Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/ atau Pecandu Narkotika (3256)	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/ atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/ atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68	%	Rp.6.945.000,-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ KOMPONEN/ AKTIVITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET / VOL	SATUAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	
		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.42	Indeks	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (3259)	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	Orang	Rp.14.890.000,-
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (3260)	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	Lembaga	Rp.24.860.000,-
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	Unit	Rp.49.965.000,-
7.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika (5354)	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1	Berkas Perkara	Rp.35.000.000,-
8.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN (3238)	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	91	Indeks	Rp.13.705.000,-
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan (3236)	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98.73	Indeks	Rp.93.476.000,-

### C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Program Kerja 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2024, maka target-target kinerja tahunan

dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan satuan kerja yang menerima amanah dengan pihak yang memberi amanah. Sebentuk komitmen atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Berikut adalah tabel Perjanjian Kinerja Kepala BNN Kota Kediri Tahun 2024.

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	55,67 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	89,911 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,80 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba	Persentase penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,42 Indeks
8	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor	1 Berkas

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
	lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	narkotika yang P-21	Perkara
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	91 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,73 Indeks

Untuk mewujudkan kinerja Kepala BNN Kota Kediri sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.973.693.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi Rp.82.000.000,-
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Rp.106.000.000,-
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Rp.211.695.000,-
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Rp.14.890.000,-
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Rp.144.425.000,-
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba Rp.6.945.000,-
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Rp.12.000.000,-
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Rp.39.250.000,-
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp.93.476.000,-
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia Rp.11.440.000,-
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN Rp.13.705.000,-
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rp.1.204.867.000,-
13. Kegiatan Penyelenggaraan Humas dan Keprotokolan Rp.10.000.000,-

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Perjanjian kinerja BNN Kota Kediri tahun 2024 menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan yang akan dicapai, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 11 (sebelas) indikator. Realisasi hasil capaian target kinerja sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	55,67 Indeks	55,65 Indeks	99,96%
2	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	89,911 Indeks	91,696 Indeks	101,96%
3	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,80 Indeks	3.82 Indeks	100,53%
4	Persentase penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	71,88%	105,71%
5	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%
6	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	2 Lembaga	100%
7	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%
8	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,42 Indeks	3,45 Indeks	100,88%
9	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara	-	-
10	Nilai Kinerja Anggaran	91 Indeks	100 Indeks	109,9%
11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,73 Indeks	100 Indeks	101,29%

Dari 11 (sebelas) indikator tersebut dapat disimpulkan:

1. 6 (enam) indikator melebihi target yang ditetapkan;
2. 3 (tiga) indikator sesuai dengan target yang ditetapkan;
3. 2 (dua) indikator di bawah target yang ditetapkan.

Di samping melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana DIPA BNN Kota Kediri, terlaksana juga berbagai kegiatan pendukung yang berasal dari partisipasi masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi BNN. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung dan meningkatkan capaian kinerja demi mewujudkan Kota Kediri Bersinar (Bersih Narkoba).

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah diraih Badan Narkotika Nasional Kota Kediri dalam kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, perbandingan antara target dan realisasi kinerja, penyebab keberhasilan/ kegagalan (peningkatan/ penurunan) kinerja beserta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

Berikut pembahasan capaian kinerja BNN Kota Kediri Tahun 2024 dengan Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

## **1** Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Untuk mendukung sasaran kegiatan tersebut tersebut di atas, ditetapkan indikator kinerja kegiatan yaitu Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba. Yang dimaksud dengan “Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba” adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindar dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.

Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja dilaksanakan melalui survei ketahanan diri dengan instrumen ukur ADS (*Anti Drugs Scale*) yang mencakup 3 dimensi, yaitu *Self Regulation*, *Assertiveness*, dan *Reaching Out*. Secara teknis, pengukuran dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data pada kegiatan sosialisasi tatap muka melalui pengisian kuesioner online di [www.dektari.bnn.go.id](http://www.dektari.bnn.go.id). Kuesioner tersebut mengukur tingkat Ketahanan Diri (Anti Narkoba) remaja sebagai faktor internal dengan menggunakan alat ukur *Anti Drugs Scale/ ADS*.
- b. Mengukur faktor eksternal dari lingkungan remaja berupa data dukung tingkat kasus penyalahgunaan narkoba dan kegiatan positif dari remaja di lingkungan sekolah/ kampus sebagai **Data Sekunder**.
- c. Mengukur **faktor Dependen** berupa evaluasi atas Target Capaian Kegiatan IE yang dilaksanakan oleh BNN Kota Kediri. Faktor Dependen didapat dari capaian output kegiatan Informasi & Edukasi melalui Media Cetak, Media Luar Ruang, *Placement* Televisi Daerah, dan *Placement* Radio Lokal/ Daerah.

Pengumpulan data dilaksanakan terhadap 172 (seratus tujuh puluh dua) orang pelajar di Kota Kediri. Berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 (terlampir), hasil perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kota Kediri adalah **55,65** dengan kategori **Sangat Tinggi**.

**Tabel Capaian Target IKK  
Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	55,67 Indeks	55,65 Indeks	99,96%

**Tabel Perbandingan Capaian IKK Indeks Ketahanan Diri Remaja  
terhadap Penyalahgunaan Narkoba dalam 3 Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun Realisasi		
	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	54,91 Indeks	54,49 Indeks	55,67 Indeks

Realisasi indikator kinerja kegiatan Dektari dari tahun 2021 hingga tahun 2024 selalu masuk kategori Sangat Tinggi. Meskipun Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba tahun 2024 mencapai target dan mengalami penurunan 0,04% dibanding tahun 2023, tetapi angka tersebut sudah mencapai target Nasional (53,51) dan berada di atas nilai rata-rata Dektari Nasional (52,04) serta diatas nilai rata-rata dektari untuk wilayah BNNP Jawa Timur (54,15).

Berikut faktor penunjang capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dektari:

- Adanya kesesuaian materi yang disampaikan oleh narasumber dari BNN Kota Kediri dalam setiap kegiatan informasi dan edukasi (sosialisasi) melalui tatap muka, dengan 3 (tiga) dimensi penting Ketahanan Diri Remaja. Jadi peserta penyuluhan telah dibekali dengan materi terkait Ketahanan Diri Anti Narkoba (Dektari) yang perlu diketahui dan dipraktekkan oleh para remaja. Sehingga ketika mengisi kuesioner Dektari, mereka sudah mendapat cukup informasi dan hasilnya mendapatkan nilai indeks yang cukup baik.
- Informasi terkait Indeks Ketahanan Diri (Dektari) dan 3 Dimensinya juga seringkali digaungkan di akun media sosial milik BNN Kota Kediri, diharapkan secara garis besar masyarakat paham akan pentingnya Ketahanan Diri Anti Narkoba.
- Adanya pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut oleh para Remaja Teman Sebaya Anti Narkoba dengan mengadakan kegiatan Informasi dan Edukasi secara rutin di Sekolah masing-masing.

Adapun beberapa faktor penghambat yang dirasa masih menjadi kendala, sebagai berikut:

- Pelaksanaan lokus Pembinaan Remaja Teman Sebaya yang mengalami pergantian kelompok usia Remaja, dimana pada tahun 2023 mengambil kelompok Remaja Akhir (usia 15 s.d 17 tahun) sedangkan pada tahun 2024 mengambil sasaran kelompok usia Remaja Awal (usia 13 s.d 15 Tahun) berdampak pada berkurangnya tingkat pemahaman Remaja terhadap variabel penilaian Indeks Ketahanan Diri Remaja yang meliputi *Self Regulation*, *Assertiveness*, dan *Reaching Out*.
- Adanya perubahan Juknis pelaksanaan Remaja Teman Sebaya Anti Narkoba yang tidak didukung dengan pembinaan Fasilitator program sehingga menghambat proses transfer Informasi kepada peserta.

- Pada aplikasi pelaporan dektari, pelaksanaan Evaluasi kegiatan hanya memuat komponen kegiatan DIPA saja, sedangkan pada realisasinya terdapat banyak kegiatan Non DIPA yang dapat mendukung peningkatan capaian nilai Dektari.
- Nilai Dektari tidak dapat langsung diketahui meskipun survei telah dilaksanakan dan data sekunder serta dependen telah diinput pada website. Untuk mengetahui nilai Dektari final masih harus menunggu informasi lebih lanjut dari Dir. Informasi dan Edukasi pusat. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi proses monitoring dan upaya perbaikan capaian kinerja.
- Target IKK Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba terus bertambah sesuai dengan capaian tahun sebelumnya, sedangkan lokus pelaksanaan pembinaan Remaja Teman Sebaya harus untuk dilaksanakan di Desa Bersinar yang masuk dalam kategori Waspada Narkoba yang berdampak pada penurunan pemahaman tentang Ketahanan Diri Remaja terhadap Narkoba karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial, serta ekonomi keluarga remaja yang tinggal di lingkungan tersebut.

Dari kendala tersebut, guna perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, berikut upaya dan rekomendasi perbaikan kinerja BNN Kota Kediri:

- Terus berusaha meningkatkan *engagement* dengan para remaja di Kota Kediri agar tetap mengingat dan menanamkan 3 (Tiga) Dimensi dalam Ketahanan Diri Remaja yaitu *Self Regulation, Assertiveness, dan Reaching Out* melalui program Informasi dan Edukasi P4GN yang relevan dengan nilai-nilai dalam dimensi Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba melalui pembuatan konten, maupun penyuluhan langsung tatap muka.
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Sekolah Mitra program Remaja Teman Sebaya Anti Narkoba untuk mengetahui progress pelaksanaan Rencana Aksi kegiatan Informasi dan Edukasi guna mendukung capaian Nilai Dektari.

## 2

### Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba. Indeks

Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

Pengukuran dilaksanakan melalui Survei Ketahanan Keluarga pada peserta Kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Survei menggunakan instrumen *SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires)*, *PAFAS (Parent and Family Adjustment Scales)*, dan *CYRM (Child and Youth Resiliences Measure)* dan dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada awal kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (**Pertemuan 1**) pada tanggal 14 Mei 2024 dan akhir kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (**Tahap 4**) pada tanggal 04 Juni 2024 terhadap sepuluh keluarga yang terdiri dari sepuluh anak dan sepuluh orang tua dari Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel yang mengikuti Kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Tahun 2024.

Sesuai arahan dari pusat, seluruh isian Kuesioner Ketahanan Keluarga tersebut telah diupload ke dalam *link* yang telah ditentukan hingga didapatkan hasil perhitungan **Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba** di Kota Kediri adalah **91,696** dengan kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut disampaikan melalui surat BNN RI Nomor: B/4201/XII/DE/PC.01/2023/BNN tanggal 23 Desember 2024, Perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Tahun 2024 (terlampir).

**Tabel Capaian Target IKK  
Indeks Ketahanan Diri Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2.	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	89,911 Indeks	91,696 Indeks	101,96%

**Tabel Perbandingan Capaian IKK Indeks Ketahanan Diri Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba dalam 3 Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun Realisasi		
	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	94,286 Indeks	89,554 Indeks	89,911 Indeks

Realisasi kinerja Dektara pada tahun 2024 ini telah melampaui target dengan persentase capaian sebesar 101,96%. Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 yang sebesar 89,911 maka capaian di Tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebesar 1,99% menjadi 91,696. Secara umum, capaian Dektara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2022. Meskipun demikian, realisasi Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba Kota Kediri mulai dari tahun 2021 hingga 2024 seluruhnya berkategori “Sangat Tinggi”.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian ini diantaranya:

- Adanya dukungan dari *stakeholder* terkait, dalam hal ini Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel sebagai tuan rumah pelaksanaan Kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga. Hampir seluruh komponen masyarakat turut dilibatkan untuk mendukung Kegiatan Intervensi Ketahanan keluarga mulai dari warga masyarakat, perangkat, Satgas Bersinar, sampai dengan kader PKK.
- BNN Kota Kediri telah memiliki Penyuluh Narkoba yang telah mengikuti pelatihan Fasilitator Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sesuai Standar yang ditentukan bersama antara BNN dengan UNODC.

Meski sudah mencapai target, namun pelaksana masih merasa ada sedikit kendala dalam upaca pencapaian Indikator ini, yaitu Hasil Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba tidak dapat langsung diketahui meskipun survei Ketahanan Keluarga telah selesai dilaksanakan dan hasilnya juga telah diisikan ke dalam *link* sesuai dengan arahan dari pusat. Sistem dari *link* tersebut hanya berfungsi untuk menerima data tetapi tidak langsung dapat mengeluarkan hasil perhitungannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui nilai Indeks Ketahanan Keluarga di Kota Kediri masih harus menunggu informasi lebih lanjut dari Dir. Advokasi pusat. Hal tersebut mempengaruhi proses monitoring dan upaya perbaikan capaian kinerja. Lebih lanjut hal tersebut juga cukup menghambat proses pelaporan kinerja.

Untuk mempertahankan nilai Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kota Kediri yang sudah mencapai kategori sangat tinggi (89,911) BNN Kota Kediri akan terus mengevaluasi metode Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang telah dilaksanakan selama 4 tahap dan mengembangkan metode Intervensi dengan menyesuaikan latar belakang serta faktor demografi keluarga di wilayah Kota Kediri melalui kerjasama dengan praktisi Pendidikan dan

Pelatihan Keluarga untuk mendapatkan *outcome* program Ketahanan Keluarga yang lebih optimal.

### 3

### Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Untuk mendukung sasaran kegiatan tersebut di atas, ditetapkan indikator kinerja kegiatan yaitu Indeks Kemandirian Partisipasi. Yang dimaksud dengan “Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)” adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam rangka upaya P4GN yang terdiri dari: lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll).

Pengukuran IKP dilaksanakan setelah peserta menjadi Penggiat Anti Narkoba yang ditandai dengan pelibatannya dalam program pengembangan kapasitas. Metode pengukuran menggunakan instrumen pengisian data yang berkaitan ada tidaknya masukan (*input*), aktifitas (*output*) dan dampak (*outcome*) pemberdayaan anti narkoba di instansi/ lingkungan masing-masing. Pengukuran dilaksanakan melalui Survei IKP dengan kuesioner yang berisi pertanyaan dengan variabel sebagai berikut:

- a. SDM: adanya pelaku/ pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- b. Metode: adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN
- c. Anggaran: adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing-masing.
- d. Material: adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya
- e. Sistem (Kebijakan): adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.

- f. Aktivitas: adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Survei Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) dilaksanakan Bulan Oktober pada 2 lingkungan yaitu Instansi Pemerintah (Pemerintah Kelurahan Ngampel, Sukorame, dan Dandangan) serta Kelompok Masyarakat (Satgas Dandangan Bersinar, Satgas Ngampel Bersinar, dan Karang Taruna Ngampel Raya) dengan rician sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah: Pemerintah Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (nilai IKP 3,84 kategori A/ sangat mandiri)
2. Instansi Pemerintah: Pemerintah Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (nilai IKP 3,44 kategori A/ sangat mandiri)
3. Instansi Pemerintah: Pemerintah Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri (nilai IKP 3,64 kategori A/ sangat mandiri)
4. Kelompok Masyarakat: Satgas Dandangan Bersinar (nilai IKP 3,80 kategori A/ sangat mandiri)
5. Kelompok Masyarakat: Satgas Ngampel Bersinar (nilai IKP 3,72 kategori A/ sangat mandiri)
6. Kelompok Masyarakat: Karang Taruna Ngampel Raya (nilai IKP 3,00 kategori B/ mandiri)

Dari hasil survei pengukuran IKP di 6 lembaga, diambil nilai tertinggi dari Instansi Pemerintah yaitu Kelurahan Ngampel (3,84) dan dari Kelompok Masyarakat yaitu Satgas Dandangan Bersinar (3,80) kemudian dirata-rata dari keduanya sehingga didapat **Indeks Kemandirian Partisipasi sebesar 3,82**. Adapun detil hasil pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) pada masing-masing lingkungan dan lembaga terlampir.

**Tabel Capaian Target IKK Indeks Kemandirian Partisipasi**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
3.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,80 Indeks	3,82 Indeks	100,53%

**Tabel Perbandingan Capaian  
IKK Indeks Kemandirian Partisipasi dalam 3 Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun Realisasi		
	2021	2022	2023
Indeks Kemandirian Partisipasi	3.48 Indeks	3,50 Indeks	3,56 Indeks

Realisasi Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Kota Kediri Tahun 2024 telah berhasil melebihi target dengan persentase capaian sebesar 100,53%. Dibandingkan dengan hasil capaian IKP pada tahun 2023 maka capaian pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 7,30% dari 3,56 menjadi 3,82. Secara umum, realisasi IKP mulai dari Tahun 2021 hingga 2024 terus mengalami peningkatan.

Dalam upaya pencapaian IKK ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dikarenakan adanya *Automatic Adjustmen* (AA) dan blokir penghematan anggaran Perjalanan Dinas. Akan tetapi pengurangan anggaran tersebut dapat disiasi dengan pemaksimalan program untuk mencapai target kinerja yang diharapkan. Pada rangkaian kegiatan yang mendukung Kotan dilaksanakan satu kali program untuk menjangkau beberapa komponen pengungkit Kotan, sedangkan pada rangkaian kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat mengoptimalkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Penggiat P4GN sehingga dapat mencapai nilai Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat sesuai target kinerja yang telah ditentukan.

BNN Kota Kediri dapat mencapai target kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) karena terjalinnya sinergi yang baik dengan *stakeholder/* instansi terkait sehingga memunculkan komitmen yang tinggi dari para Penggiat Anti Narkoba, utamanya yang telah mengikuti Program Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Anti narkoba. Selain itu, terdapat dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Kediri untuk melaksanakan kegiatan P4GN melalui dana Prodamas (Program Pemberdayaan Masyarakat) Plus dan DIPA masing-masing Kelurahan.

Sementara itu, yang menjadi tantangan ke depan adalah konsistensi dari *stakeholder* maupun penggiat anti narkoba yang telah terbentuk untuk terus melaksanakan kebijakan P4GN tersebut. Perlu dijalin komunikasi berkesinambungan antara BNN dengan pihak instansi atau lembaga untuk terus mengawal penerapan dan pelaksanaan kebijakan P4GN di lingkungan masing-masing. Untuk itu, perlu

dilaksanakan evaluasi terhadap metode pembinaan dan pelatihan kepada Penggiat P4GN guna bersama-sama merancang program Pembinaan dan Pelatihan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Di samping itu, BNN Kota Kediri akan senantiasa mendorong para penggiat P4GN untuk terus melakukan upaya P4GN secara mandiri ataupun bekerja sama dengan BNN Kota Kediri maupun *stakeholder* terkait.

## 4

### Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba

Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan Persentase Penyalah Guna dan/ atau Pecandu Narkoba yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup. Penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah korban penyalahgunaan dan/ atau pecandu narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidup.

Peningkatan kualitas hidup diukur berdasarkan hasil evaluasi penilaian perubahan perilaku dengan menggunakan instrumen WHOQoL (*World Health Organization Quality of Life*) yang mengukur 4 domain kehidupan yaitu fisik, psikologis, lingkungan dan hubungan sosial. Pengukuran WHOQoL dimaksudkan untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan kualitas hidup dari setiap klien. Pengukuran WHOQoL diisi langsung oleh klien dan didampingi oleh petugas rehabilitasi. Dimana pengukuran kualitas hidup ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama klien menjalani rehabilitasi.

Pengukuran kualitas hidup yang dilaksanakan pada 32 orang klien rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kota Kediri ini merupakan salah satu evaluasi perkembangan klien yang dinilai saat mengikuti rehabilitasi. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup, maka diharapkan klien akan memiliki kapital pemulihan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang sehat, produktif dan bermakna.

**Tabel Capaian Target IKK**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
4.	Persentase penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	71,88%	105,71%

**Tabel Perbandingan Capaian IKK dalam 3 Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun Realisasi		
	2021	2022	2023
Persentase penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	-	-	76.32 Indeks

Dari 32 orang klien yang sudah menyelesaikan layanan dan mengisi kuesioner pengukuran kualitas hidup, terdapat 25 orang klien (78,13%) yang mengalami peningkatan kualitas hidup dari aspek fisik, 19 orang klien (59,38%) yang mengalami peningkatan kualitas hidup dari aspek psikologis, 23 orang klien (71,88%) yang mengalami peningkatan kualitas hidup dari aspek sosial, dan 25 orang klien (78,13%) yang mengalami peningkatan kualitas hidup dari aspek lingkungan. Dari data tersebut, didapat hasil persentase penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup sebesar 71.88%. Realisasi tersebut telah melampaui target dengan persentase capaian sebesar 105,71%.

Jika dibandingkan dengan hasil realisasi tahun 2023 maka realisasi tahun ini memang terlihat mengalami penurunan, namun demikian keduanya tetap sama-sama mencapai bahkan melebihi target tahun berjalan. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyalah Guna dan/ atau Pecandu Narkoba yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup ini baru muncul pada pada Perjanjian Kinerja (PK) BNN kota Kediri mulai tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan komparasi realisasi untuk tahun sebelumnya.

Adapun faktor yang menunjang keberhasilan capaian ini diantaranya:

- Adanya efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran, yang dalam hal ini
- Adanya peningkatan kualitas layanan dari Klinik Pratama BNN Kota Kediri. Selain itu ada peningkatan sarana dan prasarana juga terkait Klinik yang meningkatkan

kenyamanan klien dalam mengikuti proses rehabilitasi, sehingga hasil dari proses rehabilitasi dapat berjalan dengan efektif. Hal tersebut membawa dampak positif bagi klien yang secara tidak langsung meningkatkan kualitas hidupnya.

Meski sudah tercapai melebihi target, namun masih ada hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yaitu kurangnya pemahaman klien terhadap pertanyaan yang ada di lembar WHOQoL sehingga terkadang membuat klien bingung dalam menjawab pertanyaan. Adapun solusi yang dijadikan rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut kedepannya adalah dengan memberikan pendampingan dan penjelasan kepada klien terkait pertanyaan di lembar WHOQoL. Diharapkan juga terdapat pelatihan bagi petugas pendamping agar dapat memberikan pendampingan yang lebih baik dalam pengisian lembar WHOQoL.

## 5

### Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Untuk mendukung sasaran kegiatan tersebut di atas, ditetapkan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih. Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Pengukuran jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikat kompetensi teknis layanan IBM dari BNN.

**Tabel Capaian Target IKK  
Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
5.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%

**Tabel Perbandingan Capaian IKK Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih dalam 3 Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun Realisasi		
	2021	2022	2023
Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	-	10 Orang

Pada tahun anggaran 2024, capaian jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah sesuai dengan target, yaitu 10 orang yang berasal dari 2 kelurahan (Kelurahan Dandangan dan Ngampel) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	NIK	Alamat	Unit IBM
1	Eko Purnomo	3506121501830005	Jl. Dandangan I/53 RT/RW. 002/008 Kel. Dandangan	Unit IBM Kel. Dandangan
2	Joko Lelono	3571022804950002	Dandangan Gg. II No. 141 RT/RW. 004/006 Kel. Dandangan	Unit IBM Kel. Dandangan
3	Mujianto	3571021907640004	Jl. Pemuda Gg. Rahayu 14 RT/RW. 003/005 Kel. Dandangan	Unit IBM Kel. Dandangan
4	Yudhi Eko Prasetyo	3571022807850006	Apartemen Rakyat/Ara Blok E5. 16 RT/RW. 006/014 Kel. Dandangan	Unit IBM Kel. Dandangan
5	Yanuri Sapta Jaya	3571021801790006	Rusunawa Blok D Lantai 5 No.13 Kel. Dandangan	Unit IBM Kel. Dandangan
6	Andhika Trisna Kurniawan Putra	3571012604730003	Jl. Teratai 11 RT/RW. 017/003 Kel. Ngampel	Unit IBM Kel. Ngampel
7	Wida Kartikawati	3571016104840012	Jl. Cempaka RT/RW. 027/004 Kel. Ngampel	Unit IBM Kel. Ngampel
8	Moh. Fatoni	3571011410730003	Jl. Bunga Gg. VI No. 81 RT/RW. 020/003 Kel. Ngampel	Unit IBM Kel. Ngampel
9	Saefudin	3571011408670003	Jl. Abusono No. 29 RT/RW. 008/002 Kel. Ngampel	Unit IBM Kel. Ngampel
10	Miftahul Huda	3571012609020003	Jl. Pengairan No. 15 RT/RW. 005/001 Kel. Ngampel	Unit IBM Kel. Ngampel

Realisasi pada tahun 2024 sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 10 orang. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2023 yang juga 10 orang. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih” ini baru muncul pada Perjanjian Kinerja (PK) BNN kota Kediri mulai tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan komparasi realisasi untuk tahun sebelumnya.

Afapun faktor yang menunjang keberhasilan capaian ini yaitu:

- Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif dengan para Agen Pemulihan (AP) baik dari Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel terkait jadwal pelaksanaan pelatihan.
- Adanya komitmen yang kuat dari Agen Pemulihan untuk mengikuti kegiatan pelatihan sehingga kegiatan IBM dapat berjalan dengan baik karena petugasnya merupakan petugas (Agen Pemulihan) yang terlatih.

Kendala yang seringkali masih dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini salah satunya yaitu sulitnya menyesuaikan jadwal masing-masing petugas Agen Pemulihan (AP) dengan jadwal kegiatan pelatihan (Bimbingan Teknis) yang sudah direncanakan. Adapun solusi dan rencana tindak lanjut dari kendala tersebut adalah dengan melakukan komunikasi serta koordinasi secara intensif dan berkesinambungan untuk mendapatkan kesepakatan jadwal yang sesuai sehingga didapatkan waktu yang pas dan sesuai bagi semua pihak. Selain itu, diharapkan kedepannya IBM dapat terus eksis berkelanjutan melaksanakan programnya secara mandiri meski sudah tidak menjadi lokus kegiatan BNN di tahun anggaran berjalan.

## 6

### Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional dan Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang Operasional.

**Tabel Capaian Target IKK  
Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
6.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	2 Lembaga	100%

**Tabel Perbandingan Capaian IKK  
Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional dalam 3 Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun Realisasi		
	2021	2022	2023
Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga

Lembaga rehabilitasi yang operasional adalah Fasilitas Rehabilitasi Narkotika, baik itu milik Instansi Pemerintah maupun Komponen Masyarakat yang terdiri dari Rumah Sakit Umum/ Daerah, Rumah Sakit Jiwa, Puskesmas, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Klinik yang menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.

Pengukuran jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang telah mampu menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dalam satu tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2024, jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional di Kota Kediri adalah **2 (dua) lembaga** yaitu:

**a. Klinik Pratama Rawat Jalan BNN Kota Kediri**

Klinik Pratama Rawat Jalan BNN Kota Kediri berdiri pada tahun 2015 dengan Surat Ijin Mendirikan Klinik Nomor : 503/3022/IMK/419.64/2015 tanggal 11 Juni 2015 dan juga Surat Ijin Operasional Nomor Surat : 503/3351/IOK/419.64/2015 tanggal 26 Juni 2015 dari Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Kediri. Surat ijin operasional klinik kemudian diperbarui dengan surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Kediri Nomor : 503/0010/IOPFASYANKES/419.104/2020 yang berlaku mulai 16 Desember 2020 sampai dengan 26 Juni 2025.

Pada tahun 2023 Klinik Pratama Rawat Jalan BNN Kota Kediri telah ditetapkan sebagai Fasilitas Layanan Rehabilitasi Milik BNN dengan Nomor Skep :

KEP/122/I/DE/RH.03/2023/BNN tanggal 20 Januari 2023. SDM yang ada di Klinik Pratama Rawat Jalan BNN Kota Kediri berjumlah 8 orang yang terdiri dari Dokter, Konselor Adiksi, Asisten Konselor Adiksi dan Paramedis yang beberapa diantaranya telah mendapat sertifikat pelatihan tentang Konseling Adiksi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Klinik Pratama Rawat Jalan BNN Kota Kediri menyelenggarakan Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan, Konsultasi tentang Penyalahgunaan Zat dan Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN). Pada tahun 2024 Klinik Pratama Rawat Jalan BNN Kota Kediri mendapatkan pengakuan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan telah memenuhi standar akreditasi dan dinyatakan lulus "Paripurna".

**b. Eklesia Kediri *Foundation*.**

Eklesia Kediri *Foundation* berdiri sejak tahun 1999 dengan menggunakan nama "Forum Kepedulian Pemuda Sosial (FKPS) yang beregerak dibidang sosial. Yayasan ini lahir dari kepedulian dari para beberapa Pemuda Kota Kediri yang dipelopori oleh Ibu Dr. Jesicha Yenny Susanty M., S.H., M.H., CLA sebagai Ketua Yayasan ini sampai sekarang. Dalam perjalanannya, setelah beberapa kali mengalami pergantian nama dan kepengurusan Eklesia Kediri *Foundation* telah mengantongi surat izin dan legalitas terakreditasi Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 999.SALKS.B/2020 dengan peringkat "B" (BAIK). Meskipun secara legal dan formal yayasan berdiri tahun 2016, namun program-program nyata sudah berjalan sejak tahun 1999.

Pada tahun 2024 Eklesia Kediri *Foundation* telah ditetapkan sebagai Lembaga Rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional sebagai Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan dengan Nomor Skep : KEP/142/I/DE/RH.02.03/2024/BNN tanggal 23 Januari 2024. Eklesia Kediri *Foundation* menyelenggarakan Layanan Rehabilitasi Sosial Rawat Jalan dan Rawat Inap. SDM Eklesia Kediri *Foundation* telah mengikuti pelatihan terkait Adiksi sehingga mampu memberikan layanan yang sesuai dengan Juknis Rehabilitasi.

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan berupa Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional Tahun 2024 ini sama dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya mulai dari 2021 hingga 2023, yaitu berjumlah 2 lembaga.

Adapun faktor yang menunjang keberhasilan capaian IKK ini adalah:

- BNN Kota Kediri juga melakukan Bimbingan Teknis kepada Eklesia Kediri Foundation, dimana dalam Bimbingan Teknis ini BNN Kota Kediri menyampaikan Petunjuk Teknis Layanan Rehabilitasi yang terbaru dan sesuai dengan SNI 8807:2022. Sehingga melalui Bimbingan Teknis ini Eklesia Kediri Foundation dapat memberikan layanan rehabilitasi yang komprehensif dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Layanan Rehabilitasi dan SNI 8807:2022.
- BNN Kota Kediri dan Eklesia Kediri Foundation selalu melakukan koordinasi terkait kegiatan yang dilakukan kedua lembaga, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan berdampingan dan berkesinambungan.

Kendala yang dihadapi dalam proses operasional Lembaga Rehabilitasi ini salah satunya yaitu terkait beberapa klien rawat jalan yang tidak mematuhi jadwal rehabilitasi yang telah disepakati dengan alasan kesibukan dan pekerjaan. Solusi dan tindak lanjut yang dilakukan kedepannya Demi menertibkan jadwal rehabilitasi akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan klien, dan meminta mereka untuk menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Berkomitmen Menjalani Program Rehabilitasi sesuai dengan Jadwal yang telah disepakati bersama.

**Tabel Capaian Target IKK  
Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang Operasional**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
7.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%

**Tabel Perbandingan Capaian IKK Jumlah Unit Penyelenggara  
Layanan Rehabilitasi IBM yang Operasional dalam 3 Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun Realisasi		
	2021	2022	2023
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	1 Unit	1 Unit	2 Unit

Pengertian Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan/ atau pecandu narkoba di lingkungannya. Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan ini dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan/ atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Dalam upaya mencapai target kinerja telah dilaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari Koordinasi, Pembentukan Unit IBM, Asistensi dan Supervisi, serta Evaluasi Unit IBM. Kemudian terselenggara operasional Unit IBM untuk menunjang layanan IBM mulai dari proses Penerimaan Awal, Layanan Wajib, Layanan Pilihan, serta Bina Lanjut/ Pemantauan.

Pada tahun anggaran 2024, jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah 2 (dua) unit, yaitu Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Dandangan dan Unit Penyelenggara Layanan IBM Kelurahan Ngampel. Agen Pemulihan yang terlibat dalam kegiatan IBM di Kelurahan berjumlah total 10 orang, dengan jumlah klien yang telah ditangani yaitu 8 orang klien di Kelurahan Dandangan.

Realisasi Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional Tahun 2024 sama dengan Realisasi pada Tahun 2023, yaitu 2 (dua) unit IBM. Jika dibandingkan dengan realisasi dari Tahun 2021 dan 2022 maka ada peningkatan dari 1 (satu) unit menjadi 2 (dua) unit IBM. Data dukung Pembentukan Unit IBM berupa KEP Kepala BNN Kota Kediri tentang Penetapan Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan KEP Kepala Kelurahan Dandangan dan Ngampel tentang Pembentukan IBM dan Penunjukan Anggota Tim IBM di Kelurahan Tamanan dan Banaran, terlampir.

Adapun faktor yang menunjang keberhasilan capaian ini adalah adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam Program Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel Kota Kediri seperti dari BNN Kota

Kediri, Kepala Kelurahan, Para Agen Pemulihan, Para Satgas Anti Narkoba, Tokoh Masyarakat serta masyarakat umum di dua kelurahan tersebut.

Meskipun telah tercapai sesuai dengan target, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi, sebagai berikut:

- Program Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) belum sepenuhnya dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Masih adanya ketakutan dari masyarakat apabila terlibat dalam kegiatan IBM (memberikan info adanya pecandu/pengguna narkoba).
- Pengguna/ pecandu narkoba masih takut dan enggan mengikuti program di Unit IBM karena adanya *stereotype* negatif dari masyarakat

Sebagai rencana tindak lanjut, ketiga kendala tersebut akan coba diatasi dengan cara terus melaksanakan penyebaran informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat terkait program Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

## 7

### Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba

Untuk mendukung sasaran kegiatan tersebut tersebut di atas, ditetapkan indikator kinerja kegiatan Meningkatkan Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika. Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi di Klinik Pratama Rawat Jalan BNN Kota Kediri.

Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada klien, keluarga klien, dan masyarakat sekitar Klinik Pratama BNN Kota Kediri dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun unsur yang menjadi dasar pertanyaan survei meliputi:

- a. Persyaratan

- b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- c. Waktu Penyelesaian
- d. Biaya/ Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
- i. Sarana dan Prasarana

**Tabel Capaian Target IKK  
Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi BNN**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
8.	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,42 Indeks	3,45 Indeks	100,88%

**Tabel Perbandingan Capaian IKK  
Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi BNN dalam 3 Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun Realisasi		
	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,55 Indeks	3,168 Indeks	3,62 Indeks

Pada tahun 2024 jumlah *klien* rehabilitasi rawat jalan yang menerima pelayanan di Klinik Pratama Rawat Jalan BNN Kota Kediri sebanyak 29 orang. Dan dari jumlah tersebut yang telah melakukan pengisian kuesioner untuk pengukuran indeks kepuasan layanan di Klinik Pratama Rawat Jalan BNN Kota Kediri adalah sebanyak 25 orang dengan hasil indeks sebesar **3,45**. Dengan penetapan target Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi di BNN Kota Kediri Tahun 2024 sebesar 3,42, maka dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Kediri telah mampu mencapai bahkan melebihi target. Adapun bukti detil hasil *screenshot* aplikasi perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Rehabilitasi Klinik Pratama BNN Kota Kediri, terlampir.

Jika dibandingkan dengan realisasi Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada Tahun 2022 mengalami penurunan (dari tahun 2021) sebesar 10,76%, sedangkan pada

tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 14,27%, selanjutnya pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali sebesar 4,7%. Meski demikian baik itu tahun 2023 dan 2024 realisasi IKK sama-sama melampaui target tahun berjalan.

Adapun beberapa faktor penunjang keberhasilan pencapaian target ini antara lain, proses pelayanan yang lebih baik karena ada perbaikan sarana dan prasarana seperti penambahan ruang dokter dan ruang konseling yang dapat digunakan untuk melakukan pelayanan rehabilitasi selain ruang Klinik Pratama Rawat Jalan BNN Kota Kediri, sehingga tidak perlu lagi antre/menunggu jika ada beberapa klien yang memerlukan pelayanan di waktu yang bersamaan. Selain itu, ruangan yang digunakan untuk pelayanan saat ini sudah dilengkapi pendingin, sehingga klien merasa lebih nyaman saat menjalani proses konseling/ asesmen.

Meskipun indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian yang dapat mempengaruhi indeks kepuasan masyarakat penerima pelayanan, antara lain:

- a. Ruang tunggu klien masih terbatas. Saat ini ruang tunggu klien yang akan mengakses layanan di Klinik Pratama Rawat Jalan BNN Kota Kediri masih menjadi satu dengan ruang tunggu untuk tamu yaitu di loby kantor. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi klien, mengingat klien yang mengakses layanan rehabilitasi biasanya memerlukan lingkungan yang privat (privasi).
- b. Tempat parkir yang tersedia bagi klien dan tamu masih terbuka dan tidak ada pelindung, sehingga hal ini sering dikeluhkan oleh klien karena kurang nyaman dan panas.
- c. Jadwal konseling yang bertabrakan dengan jadwal kerja klien sehingga seringkali harus menyesuaikan jadwal kerja dengan jadwal layanan konseling di Klinik Pratama Rawat Jalan BNN Kota Kediri.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Klinik Pratama Rawat Jalan BNN Kota Kediri kepada masyarakat serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat penerima layanan, perlu adanya rencana tindak lanjut untuk membantu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain:

- a. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat lebih baik lagi.

- b. Akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik khususnya ruang tunggu klinik dan tempat parkir klien dan tamu.
- c. Kegiatan penyusunan IKM perlu terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan klinik dengan membandingkan IKM terdahulu secara berkala sehingga dapat dilakukan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Klinik Rehabilitasi Rawat Jalan BNN Kota Kediri.

## 8 Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang P-21. Pengertian “Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang P-21” adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

Pengukuran Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang P-21 menggunakan cara mengakumulasikan jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang terjadi dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21).

**Tabel Capaian Target IKK**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
9.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara	-	-

**Tabel Perbandingan Capaian IKK dalam 3 Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun Realisasi		
	2021	2022	2023
Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	2 Berkas Perkara	2 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara

Pada tahun 2024, tidak ada berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 yang ditangani oleh Seksi Pemberantasan BNN Kota Kediri. Hal tersebut dikarenakan adanya arahan dari pusat dalam Rapat Pimpinan Kepala BNN tanggal 08 Januari 2024 perihal ditariknya anggaran penyidikan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota dijadikan satu pada anggaran penyidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi sehingga di satker BNN Kabupaten/ Kota hanya melakukan kegiatan penyelidikan dan pemetaan terkait Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Namun demikian masih muncul target 1 berkas perkara sudah P-21 dalam Perjanjian Kinerja satker karena tidak dilakukan Revisi PK antara BNN Kota Kediri dengan BNNP Jawa Timur.

Adapun detail kinerja yang dilaksanakan dalam tahun 2024 adalah kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket)/ Penyelidikan terhadap sasaran yang ada di daerah berupa *Profiling* terhadap target, daerah pemasaran, distribusi, struktur organisasi jaringan/chart (peran masing-masing), alat komunikasi/ HP, serta jenis Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan jaringan peredaran gelap narkoba sebagai berikut:

1. Dalam pemanfaatan peralatan teknologi intelijen, satuan kerja daerah masih sangat tergantung akan teknologi intelijen yang ada di Pusat maupun Provinsi;
2. Terbatasnya SDM yang memiliki skeep penyidik BNN;
3. Terbatasnya SDM di BNN Kabupaten/Kota yang mempunyai keahlian di bidang narkoba, khususnya punya kualifikasi bidang analisis intelijen dalam kegiatan pengumpulan data jaringan sindikat narkoba;
4. Pola komunikasi dari para pelaku yang menggunakan sarana media sosial (medsos) dan kemampuan peralatan di BNN belum *support* terhadap pemantauan media sosial yang mengakibatkan jaringan sindikat narkoba kurang termonitor dengan maksimal.

Untuk mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan kinerja Tim Pemberantasan satker BNN Kabupaten/ Kota kedepan, harapannya adalah BNN pusat mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi dan mendukung kegiatan

penyidikan di daerah sehingga satker daerah juga mampu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan di samping juga melaksanakan pemetaan jaringan.

## 9

### Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Untuk mendukung sasaran kegiatan tersebut tersebut di atas, ditetapkan indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran. Nilai kinerja anggaran (NKA) adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN Kota Kediri yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil evaluasi kinerja anggaran berupa penilaian kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 249 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran terinformasikan melalui aplikasi Monev Kemenkeu (*website* [www.monev.kemenkeu.go.id](http://www.monev.kemenkeu.go.id)).

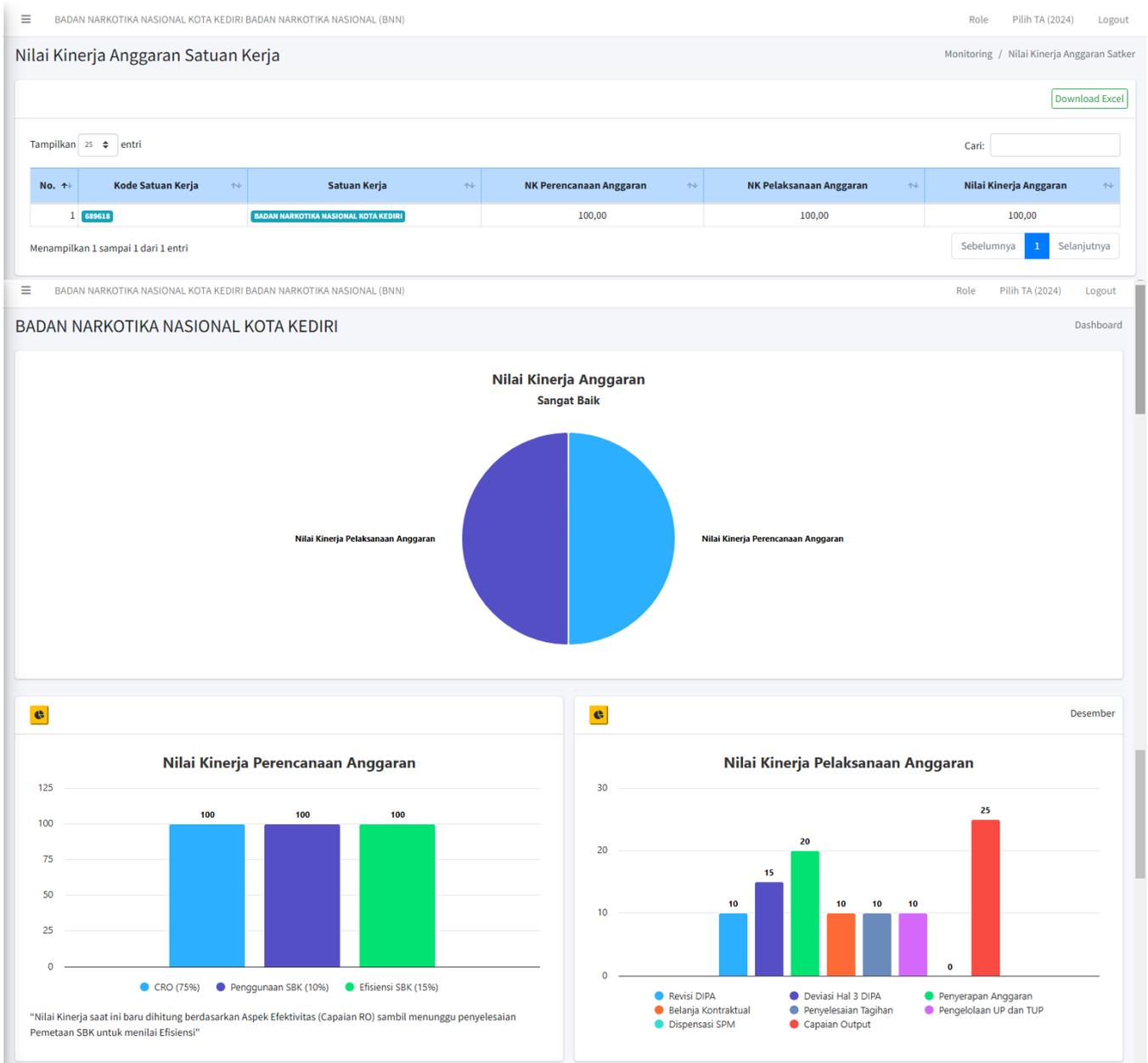
**Tabel Capaian Target IKK Nilai Kinerja Anggaran**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
10.	Nilai Kinerja Anggaran	91 Indeks	100 Indeks	109.9%

**Tabel Perbandingan Capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran dalam 3 Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun Realisasi		
	2021	2022	2023
Nilai Kinerja Anggaran	85,54 Indeks	88,10 Indeks	90,24 Indeks

Pada akhir tahun anggaran 2024, Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Kediri adalah sebesar **100** sebagaimana tertera dalam aplikasi monev kemenkeu berikut:



Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Kediri mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,99% (dibandingkan dengan capaian 2021), kemudian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,43%, dan terakhir tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 10,82%. Jika sebelumnya NKA BNN Kota Kediri berkategori “Baik”, tapi dalam dua tahun terakhir (2023-2024) NKA BNN Kota Kediri telah berkategori “Sangat Baik”.

Beberapa faktor penunjang capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran yaitu:

- Nilai IKPA satker yang kemudian dihitung sebagai Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran yang optimal (100) sehingga turut mengoptimalkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA)
- Kebijakan baru terkait Nilai Kinerja atas Perencanaan Anggaran yang saat ini dihitung dari efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan penggunaan SBK (Standar Biaya Keluaran), dalam hal ini Layanan Kehumasan dan Informasi. Hal tersebut mendukung supaya Nilai Kinerja atas Perencanaan Anggaran lebih optimal.
- Secara garis besar, proses bisnis baru dalam penghitungan NKA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan lebih memudahkan satker untuk mencapai target NKA dibandingkan dengan formulasi penilaian NKA sebelumnya.

Meski indikator ini sudah tercapai melebihi target, namun masih ada beberapa kendala/ tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

- Sulit untuk konsisten dengan *timeline* kegiatan/ Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun dan disepakati sebelumnya karena memang beberapa kegiatan sulit untuk diprediksi capaian/ pelaksanaannya karena sangat tergantung dengan pihak lain di luar satker, seperti kegiatan Palayanan SKHPN, TAT, Rehabilitasi Rawat Jalan, dan sejenisnya.
- Masih belum adanya Sosialisasi secara langsung terkait aplikasi Monev Kemenkeu maupun Nilai Kinerja Anggaran dari Dirjen Anggaran kepada satker, sehingga masih banyak satker yang kurang informasi dan kurang memahami detail formulasi dalam penilaian NKA.
- Belum adanya monitoring dan evaluasi dari Dirjen Anggaran kepada satker-satker terkait pencapaian Nilai Kinerja Anggaran.

Untuk lebih mengoptimalkan capaian NKA kedepannya maka tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah dengan mempelajari kembali lebih dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terutama terkait Nilai Kinerja Anggaran. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi capaian Nilai Kinerja

Anggaran, serta bagaimana upaya menyeimbangkan capaian IKPA dan NKA sehingga keduanya dapat optimal mencapai target.

# 10

## Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur.

Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, serta Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran satuan kerja.

Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dihimpun dari 3 (tiga) aspek:

- a. Kualitas Perencanaan Anggaran, dengan indikator:
  - Revisi DIPA (10%)
  - Deviasi Halaman III DIPA (15%)
- b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dengan indikator:
  - Penyerapan Anggaran (20%)
  - Belanja Kontraktual (10%)
  - Penyelesaian Tagihan (10%)
  - Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, dengan indikator:
  - Capaian Output (25%)

Nilai IKPA tercantum dalam aplikasi *omspan* yang diakses melalui *website* [www.spanint.kemenkeu.go.id](http://www.spanint.kemenkeu.go.id). Nilai IKPA Satuan Kerja BNN Kota Kediri untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **100**.

**Tabel Capaian Target IKK  
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
11.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,73 Indeks	100	101,29%

**Tabel Perbandingan Capaian IKK  
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam 3 Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun Realisasi		
	2021	2022	2023
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,27 Indeks	98,44 Indeks	98,63 Indeks

Pada tahun 2024, satker BNN Kota Kediri untuk pertama kalinya berhasil meraih nilai IKPA 100. Capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu 98,73. Detil nilai dari masing-masing aspek penilaian sebagai berikut:

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	034	066	689618	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KEDIRI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00	
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, maka capaian IKK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Kediri mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,17% (dibandingkan dengan capaian 2021), kemudian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,19%, dan terakhir tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,4%. Meski demikian dalam empat tahun terakhir (2021-2024), Nilai IKPA BNN Kota Kediri selalu berada dalam kategori “Sangat Baik”.

Dari capaian tersebut ada beberapa poin yang perlu untuk menjadi perhatian (baik itu faktor penunjang keberhasilan, maupun kendala yang masih dihadapi), sebagai berikut:

- a. Adanya Kebijakan Relaksasi IKPA terkait Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas melalui Surat Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor: S-553/PB.2/2024 perihal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA pada Aplikasi OMSPAN Sehubungan dengan Kebijakan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/ Lembaga T.A. 2024. Kebijakan tersebut menunjang satker untuk mendapatkan nilai 100 terutama dalam “Indikator Revisi

DIPA” yang sebelumnya sempat hanya mendapatkan nilai 80 (karena satker kelebihan jumlah revisi DIPA) namun kemudian dapat meningkat menjadi 100 karena revisi DIPA terkait penghematan anggaran tidak dimasukkan objek perhitungan Indikator Revisi DIPA

- b. Capaian *output* (yang memegang persentase nilai IKPA tertinggi yaitu 25%) berupa pengisian Realisasi Kinerja Satker dapat lebih optimal karena Target Kinerja Satker Bulanan ditentukan sendiri oleh satker dan dapat diperbarui/ disesuaikan setiap triwulan (hampir sama dengan RPD bulanan yang juga dibuat sendiri oleh satker dan dapat diperbarui/ disesuaikan setiap triwulan).
- c. Deviasi Halaman III DIPA, masih menjadi tantangan tersulit dalam penilaian IKPA. Sulit untuk konsisten dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun dan disepakati sebelumnya karena memang beberapa kegiatan sulit untuk diprediksi capaian/ pelaksanaannya karena sangat tergantung dengan pihak lain di luar satker, seperti kegiatan Palayanan SKHPN, TAT, Rehabilitasi Rawat Jalan, dan sejenisnya.

Untuk lebih mengoptimalkan capaian nilai IKPA kedepannya, terutama terkait indikator “Deviasi Halaman III DIPA”, maka perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens antara pelaksana kegiatan di lapangan, bagian keuangan, dan juga bagian perencanaan sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan di lapangan dan waktu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan dapat berjalan selaras dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun dan disepakati bersama. Untuk itu RPD bulanan akan rutin *dishare* ke dalam grup *chat* kantor setiap bulannya agar dapat bersama-sama dilakukan monitoring dan evaluasi, selain itu tiap triwulan menjelang revisi RPD akan dikonfirmasi dan dikompulir kembali data dari masing-masing tim pelaksana sehingga RPD dapat kembali diselaraskan dengan kegiatan Seksi.

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pada DIPA awal Tahun 2024 Badan Narkotika Nasional Kota Kediri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.973.693.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Namun seiring dengan berjalannya waktu, terdapat perubahan berupa pengurangan dan penambahan pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Bulan April 2024 (sesuai dengan arahan BNN RI) dilaksanakan revisi DIPA pengurangan pagu kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang dialihkan ke BNNP Jawa Timur, sehingga pagu anggaran satker BNN Kota Kediri menjadi Rp. 1.950.693.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- ✓ Bulan Agustus 2024 dilaksanakan revisi penghapusan *Automatic Adjustment* (AA) yang menyebabkan pengurangan pagu sebesar Rp. 134.842.000,- (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), sekaligus penambahan anggaran yang bersumber dari relaksasi AA untuk kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga pagu anggaran satker BNN Kota Kediri berubah menjadi Rp. 1.829.851.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- ✓ Bulan November 2024 kembali ada blokir penghematan anggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga pagu anggaran berubah menjadi Rp. 1.821.521.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Belanja Barang (Belanja 52) dan Belanja Modal (Belanja 53) dengan rincian dan tingkat capaian kinerja keuangan sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Anggaran BNN Kota Kediri Tahun 2024**

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	Belanja Barang	Rp.1.782.947.000,-	Rp.1.760.990.588,-	98,76	Rp.21.956.412,-
2	Belanja Modal	Rp.38.574.000,-	Rp.38.574.000,-	100	Rp.0,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.1.821.521.000,-</b>	<b>Rp.1.799.564.588,-</b>	<b>98,79</b>	<b>Rp. 21.956.412,-</b>

Anggaran dialokasikan untuk mendukung pencapaian Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Kediri, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**Tabel Rincian Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2024**

NO	KEGIATAN		PAGU	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
	KODE	URAIAN	Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	3247	Penyelenggaraan Advokasi	96.410.000	96.410.000	100,00	0	0,00
2	3256	Pascarehabilitasi Penyalahgunaan dan/ atau Pecandu Narkoba	6.945.000	6.945.000	100,00	0	0,00
3	3257	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	142.820.000	142.820.000	100,00	0	0,00
4	3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	47.400.000	47.325.000	99,84	75.000	0,16
5	3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	14.065.000	14.065.000	100,00	0	0,00
6	3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	128.310.000	106.837.000	83,26	21.473.000	16,74
7	5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	12.000.000	12.000.000	100,00	0	0,00
8	5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	82.000.000	82.000.000	100,00	0	0,00
9	3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	48.578.000	48.578.000	100,00	0	0,00
10	3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	24.894.000	24.894.000	100,00	0	0,00
11	3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	11.487.000	11.486.000	99,99	1.000	0,01
12	3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	1.196.662.000	1.196.254.588	99,97	407.412	0,03
13	3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	9.950.000	9.950.000	100,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.821.521.000</b>	<b>1.799.564.588</b>	<b>98,79</b>	<b>21.956.412</b>	<b>1,21</b>

BNN Kota Kediri telah berupaya melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja anggaran yang tersedia. Total penyerapan anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 1.799.564.588,-** (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar **98,79%**. Rincian penggunaan anggaran tersebut direalisasikan oleh 3 (tiga) Tim Pelaksana dan 1 (satu) Subbagian, yaitu Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Tim Rehabilitasi, Tim Pemberantasan, dan Subbagian Umum.

**Tabel Rincian Realisasi Anggaran per Tim Pelaksana & Subbagian Tahun 2024**

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)	321.230.000	321.230.000	100,00	0	0,00
2	Tim Rehabilitasi	149.320.000	127.847.000	85,62	21.473.000	14,38
3	Tim Pemberantasan	59.400.000	59.325.000	99,87	75.000	0,13
4	Subbagian Umum	1.291.571.000	1.291.162.588	99,97	408.412	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>1.821.521.000</b>	<b>1.799.564.588</b>	<b>98,79</b>	<b>21.956.412</b>	<b>1,21</b>

Tim Pelaksana dengan realisasi tertinggi yaitu Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dengan realisasi sebesar 100%. Realisasi tersebut didukung dengan adanya blokir *Automatic Adjustment* dan juga blokir penghematan anggaran perjalanan dinas. Jadi ada sejumlah anggaran yang ditarik oleh kementerian keuangan sehingga menjadikan realisasi anggaran 100%.

Realisasi anggaran tertinggi berikutnya yaitu Subbagian Umum dengan realisasi 99,97%. Realisasi tinggi karena di dalamnya terdapat belanja operasional dan rutin dari satuan kerja. Disusul kemudian dengan realisasi anggaran Tim Pemberantasan sebesar 99,87%. Realisasi tersebut berasal dari kegiatan Penyelidikan dan Layanan Asesmen Terpadu (TAT) yang sempat mendapat tambahan anggaran sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari Relaksasi *Automatic Adjustment* pada Bulan Agustus 2024 yang kemudian juga terkena imbas blokir penghematan anggaran belanja perjalanan dinas.

Tim Pelaksana dengan realisasi terendah adalah Tim Rehabilitasi dengan realisasi anggaran 85,62% dan sisa anggaran yang tidak dapat terserap sebesar Rp. 21.473.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Sebagian besar anggaran yang tidak dapat terserap berasal dari kegiatan Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) dengan sumber dana PNBPN. Realisasi anggaran PNBPN tidak bisa optimal karena adanya kelebihan belanja (kurangnya setoran) di tahun 2023 sehingga pengajuan MP (Maksimum Pencairan) tahun 2024 tidak bisa 100%, sesuai dengan Surat dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor: S-6610/WPB.16/2024 Perihal Persetujuan Penetapan MP PNBPN Tahap III Tahun 2024 Satker 066-689618 (surat terlampir).

Realisasi anggaran satuan kerja BNN Kota Kediri Tahun 2024 ini meningkat 2,43% dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 yang hanya sebesar 96,36%. Layanan SKHPN masih menjadi kendala utama realisasi anggaran dalam 2 (dua) tahun terakhir, namun pada tahun ini satker dapat lebih mengatasi masalah tersebut sebagai hasil belajar dari pengalaman tahun sebelumnya sehingga anggaran yang tersedia dapat terealisasikan dengan lebih optimal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Kediri Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kota Kediri sebagai bentuk pelayanan publik.

Dalam situasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin marak dan dengan kondisi keterbatasan sumber daya yang ada, Kota Kediri menghadapi beragam tantangan. Namun demikian, personel Kota Kediri akan berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut sehingga dapat terus berperan dalam mewujudkan “Kota Kediri Bersih Narkoba”. Upaya tersebut direfleksikan melalui komitmen pencapaian target Indikator Kinerja di tahun 2024.

Capaian Kinerja BNN Kota Kediri Tahun 2024 menggunakan pengukuran kinerja yang berdasarkan pada sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target, dan realisasi capaian. Kegiatan yang menjadi prioritas terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran kegiatan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berdasarkan indikator tersebut, BNN Kota Kediri berhasil memenuhi 9 (sembilan) target, bahkan 6 (enam) indikator diantaranya berhasil tercapai melebihi target. Sementara 2 (dua) indikator masih berada di bawah target. Realisasi keuangan Tahun 2024 mencapai 98,79%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Kediri telah dapat memenuhi sebagian besar target Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Dari analisis pencapaian yang dijabarkan dalam laporan ini, faktor-faktor yang menghambat pencapaian kinerja ideal menjadi acuan disusunnya strategi perbaikan kinerja pada perencanaan kinerja tahun anggaran berikutnya. Inilah esensi laporan kinerja yang menjadi ruh akuntabilitas kinerja, yaitu munculnya strategi dan rekomendasi perbaikan kinerja dari hasil penyajian dan analisis pencapaian kinerja.

Beberapa strategi perbaikan kinerja yang perlu ditingkatkan pada perencanaan kinerja berikutnya antara lain:

1. Menyusun rencana kegiatan serta rencana penarikan dana (RPD) dengan lebih seksama.
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens antara pelaksana kegiatan di lapangan, bagian keuangan, dan juga bagian perencanaan sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan di lapangan dan waktu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan dapat berjalan selaras dengan RPD yang telah disusun.
3. Meningkatkan upaya pemantau kinerja anggaran serta realisasi komponen kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja setiap bulan.
4. Meningkatkan upaya pemantauan capaian sasaran dan target Indikator Kinerja setiap triwulan, guna memitigasi permasalahan yang muncul dan kiranya dapat menghambat pencapaian target kinerja sehingga segera dapat dicari alternatif solusi untuk permasalahan tersebut.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Kediri Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak terkait, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja secara berkelanjutan pada tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja satuan kerja pada khususnya, dan organisasi pada umumnya.

**Kediri, 08 Januari 2025**

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Kediri**

**Yudha Wirawan, S.E., M.M.**





# Lampiran



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KEDIRI  
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : YUDHA WIRAWAN, SE, MM**  
**Jabatan : KEPALA BNN KOTA KEDIRI**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO**  
**Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI JAWA TIMUR**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

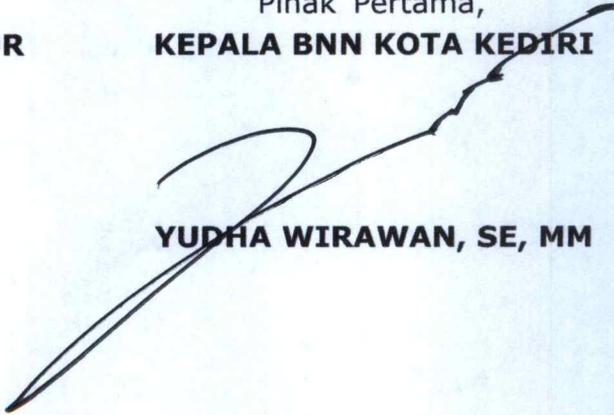
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
**KEPALA BNN PROVINSI JAWA TIMUR**

  
**Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO**

Surabaya, 06 Maret 2024  
Pihak Pertama,  
**KEPALA BNN KOTA KEDIRI**

  
**YUDHA WIRAWAN, SE, MM**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KEDIRI**

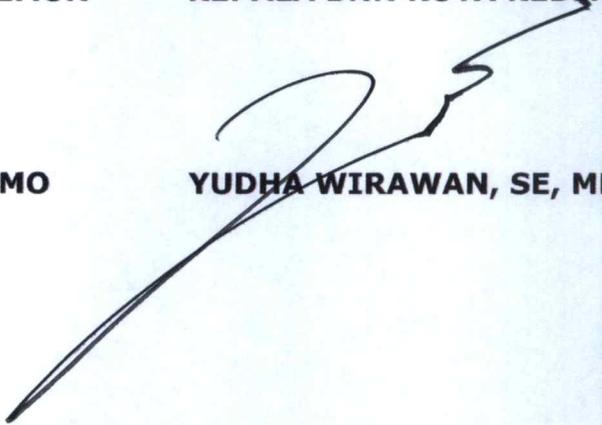
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	55.67 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	89.911 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.80 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.42 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	91 Indeks
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98.73 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.82.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.211.695.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.14.890.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.144.425.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.6.945.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.12.000.000
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.39.250.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.93.476.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.11.440.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.13.705.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.204.867.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000

Pihak Kedua,  
**KEPALA BNN PROVINSI JAWA TIMUR**

  
**Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO**

Surabaya, 06 Maret 2024  
Pihak Pertama,  
**KEPALA BNN KOTA KEDIRI** (

  
**YUDHA WIRAWAN, SE, MM**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks  
Ketahanan Diri Remaja Terhadap  
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)  
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

**Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi  
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota**

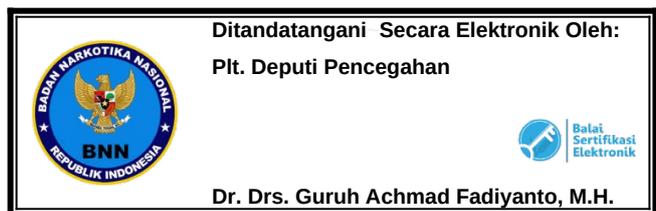
di  
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 22020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
  - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
    - Kategori Sangat Tinggi ( $\geq 53,71$ ) sebanyak 104 Satker
    - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
    - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
    - Kategori Sangat Rendah ( $\leq 45,97$ ) sebanyak 26 Satker
  - Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	<b>BNN PUSAT</b>		
<b>1</b>	<b>BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM</b>	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI ACEH</b>		<b>50,38</b>	<b>TINGGI</b>
<b>2</b>	<b>BNNP SUMATERA UTARA</b>	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNG BALAI	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
<b>RATA-RATA SUMATERA UTARA</b>		<b>50.85</b>	<b>TINGGI</b>
<b>3</b>	<b>BNNP SUMATERA BARAT</b>	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT</b>		<b>53.24</b>	<b>TINGGI</b>
<b>4</b>	<b>BNNP RIAU</b>	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI RIAU</b>		<b>52.55</b>	<b>TINGGI</b>
<b>5</b>	<b>BNNP JAMBI</b>	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI JAMBI</b>		<b>47.26</b>	<b>RENDAH</b>
<b>6</b>	<b>BNNP SUMATERA SELATAN</b>	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN</b>		<b>51.83</b>	<b>TINGGI</b>
<b>7</b>	<b>BNNP LAMPUNG</b>	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG</b>		<b>49.35</b>	<b>RENDAH</b>
<b>8</b>	<b>BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>		<b>54.43</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
<b>9</b>	<b>BNNP KEPULAUAN RIAU</b>	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>55.11</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
<b>10</b>	<b>BNNP BENGKULU</b>	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI BENGKULU</b>		<b>52.22</b>	<b>TINGGI</b>
<b>11</b>	<b>BNNP DKI JAKARTA</b>	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA</b>		<b>49.56</b>	<b>RENDAH</b>
<b>12</b>	<b>BNNP BANTEN</b>	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI BANTEN</b>		<b>52.67</b>	<b>TINGGI</b>
<b>13</b>	<b>BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	49.75	TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	55.86	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA</b>		<b>53.29</b>	<b>TINGGI</b>
<b>14</b>	<b>BNNP JAWA BARAT</b>	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI
71	BNN KOTA BANDUNG	56.40	SANGAT TINGGI
72	BNN KOTA CIREBON	55.91	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA CIMAH	53.62	SANGAT TINGGI
74	BNN KABUPATEN SUKABUMI	55.72	SANGAT TINGGI
75	BNN KABUPATEN GARUT	55.72	SANGAT TINGGI
76	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56.18	SANGAT TINGGI
77	BNN KABUPATEN CIAMIS	55.01	SANGAT TINGGI
78	BNN KOTA DEPOK	54.87	SANGAT TINGGI
79	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.59	RENDAH

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT</b>		<b>53.82</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
<b>15</b>	<b>BNNP JAWA TENGAH</b>	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH</b>		<b>53.53</b>	<b>TINGGI</b>
<b>16</b>	<b>BNNP JAWA TIMUR</b>	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI
96	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	56.07	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN NGANJUK	54.38	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN SIDOARJO	55.21	SANGAT TINGGI
99	BNN KOTA SURABAYA	46.86	RENDAH
<b>100</b>	<b>BNN KOTA KEDIRI</b>	<b>55.65</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
101	BNN KABUPATEN MALANG	55.86	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN GRESIK	44.80	SANGAT RENDAH
103	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	54.17	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.83	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN BLITAR	55.11	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN KEDIRI	55.50	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN PASURUAN	55.87	SANGAT TINGGI
108	BNN KABUPATEN TUBAN	54.87	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI JAWA TIMUR</b>		<b>54.15</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
<b>17</b>	<b>BNNP KALIMANTAN BARAT</b>	55.59	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	52.02	TINGGI
110	BNN KABUPATEN SINTANG	39.87	SANGAT RENDAH
111	BNN KOTA PONTIANAK	55.79	SANGAT TINGGI
112	BNN KOTA SINGKAWANG	53.51	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>		<b>49.91</b>	<b>TINGGI</b>
18	<b>BNNP KALIMANTAN TENGAH</b>	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>		<b>55.00</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
19	<b>BNNP KALIMANTAN SELATAN</b>	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>		<b>53.42</b>	<b>TINGGI</b>
20	<b>BNNP KALIMANTAN TIMUR</b>	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>		<b>51.37</b>	<b>TINGGI</b>
21	<b>BNNP KALIMANTAN UTARA</b>	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA</b>		<b>56.92</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
22	<b>BNNP SULAWESI UTARA</b>	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA</b>		<b>46.49</b>	<b>RENDAH</b>
23	<b>BNNP SULAWESI TENGAH</b>	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI

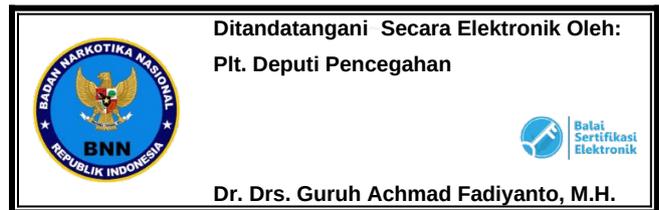
REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH</b>		<b>48.23</b>	<b>RENDAH</b>
24	<b>BNNP SULAWESI SELATAN</b>	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN</b>		<b>52.08</b>	<b>TINGGI</b>
25	<b>BNNP SULAWESI TENGGARA</b>	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA</b>		<b>53.48</b>	<b>TINGGI</b>
26	<b>BNNP SULAWESI BARAT</b>	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT</b>		<b>53.08</b>	<b>TINGGI</b>
27	<b>BNNP MALUKU</b>	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI MALUKU</b>		<b>47.49</b>	<b>RENDAH</b>
28	<b>BNNP MALUKU UTARA</b>	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA</b>		<b>52.66</b>	<b>TINGGI</b>
29	<b>BNNP BALI</b>	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI BALI</b>		<b>52.75</b>	<b>TINGGI</b>
30	<b>BNNP NUSA TENGGARA BARAT</b>	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</b>		<b>52.91</b>	<b>TINGGI</b>

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	<b>BNNP NUSA TENGGARA TIMUR</b>	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b>		<b>50.73</b>	<b>TINGGI</b>
32	<b>BNNP GORONTALO</b>	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI GORONTALO</b>		<b>54.03</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
33	<b>BNNP PAPUA</b>	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI PAPUA</b>		<b>47.51</b>	<b>RENDAH</b>
34	<b>BNNP PAPUA BARAT</b>	54.58	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA NILAI TAHUN 2024</b>		<b>52.04</b>	<b>TINGGI</b>

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan  
Keluarga terhadap Penyalahgunaan  
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**  
**2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

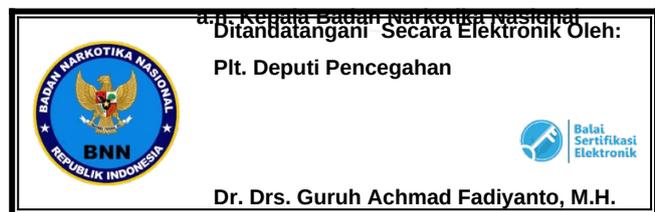
- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Deklara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
  - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
  - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
  - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Deklara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
<b>29</b>	<b>BNNP SUMATERA BARAT</b>	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
<b>34</b>	<b>BNNP RIAU</b>	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
<b>39</b>	<b>BNNP JAMBI</b>	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
<b>43</b>	<b>BNNP LAMPUNG</b>	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	<b>BNNP KEPULAUAN RIAU</b>	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	<b>BNNP SUMATERA SELATAN</b>	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	<b>BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	<b>BNNP BENGKULU</b>	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	<b>BNNP DKI JAKARTA</b>	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
<b>75</b>	<b>BNNP BANTEN</b>	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
<b>79</b>	<b>BNNP JAWA BARAT</b>	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
<b>94</b>	<b>BNNP JAWA TENGAH</b>	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	<b>BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	<b>BNNP JAWA TIMUR</b>	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	<b>BNN KOTA KEDIRI</b>	<b>91,696</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
<b>126</b>	<b>BNNP KALIMANTAN BARAT</b>	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
<b>134</b>	<b>BNNP KALIMANTAN TENGAH</b>	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
<b>137</b>	<b>BNNP KALIMANTAN SELATAN</b>	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
<b>146</b>	<b>BNNP KALIMANTAN TIMUR</b>	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
<b>150</b>	<b>BNNP NUSA TENGGARA BARAT</b>	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
<b>155</b>	<b>BNNP KALIMANTAN UTARA</b>	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAKAN	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
<b>158</b>	<b>BNNP SULAWESI UTARA</b>	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
<b>163</b>	<b>BNNP SULAWESI TENGAH</b>	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
<b>170</b>	<b>BNNP SULAWESI SELATAN</b>	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

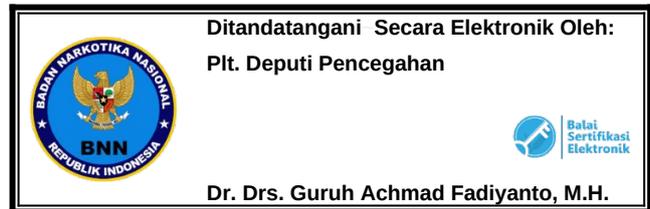
LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	<b>BNNP SULAWESI TENGGARA</b>	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	<b>BNNP SULAWESI BARAT</b>	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	<b>BNNP MALUKU</b>	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	<b>BNNP MALUKU UTARA</b>	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	<b>BNNP BALI</b>	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	<b>BNNP NUSA TENGGARA TIMUR</b>	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	<b>BNNP GORONTALO</b>	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	<b>BNNP PAPUA</b>	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	<b>BNNP PAPUA BARAT</b>	85,625	TINGGI
<b>NILAI DEKTARA TAHUN 2024</b>		<b>86,787</b>	<b>TINGGI</b>

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

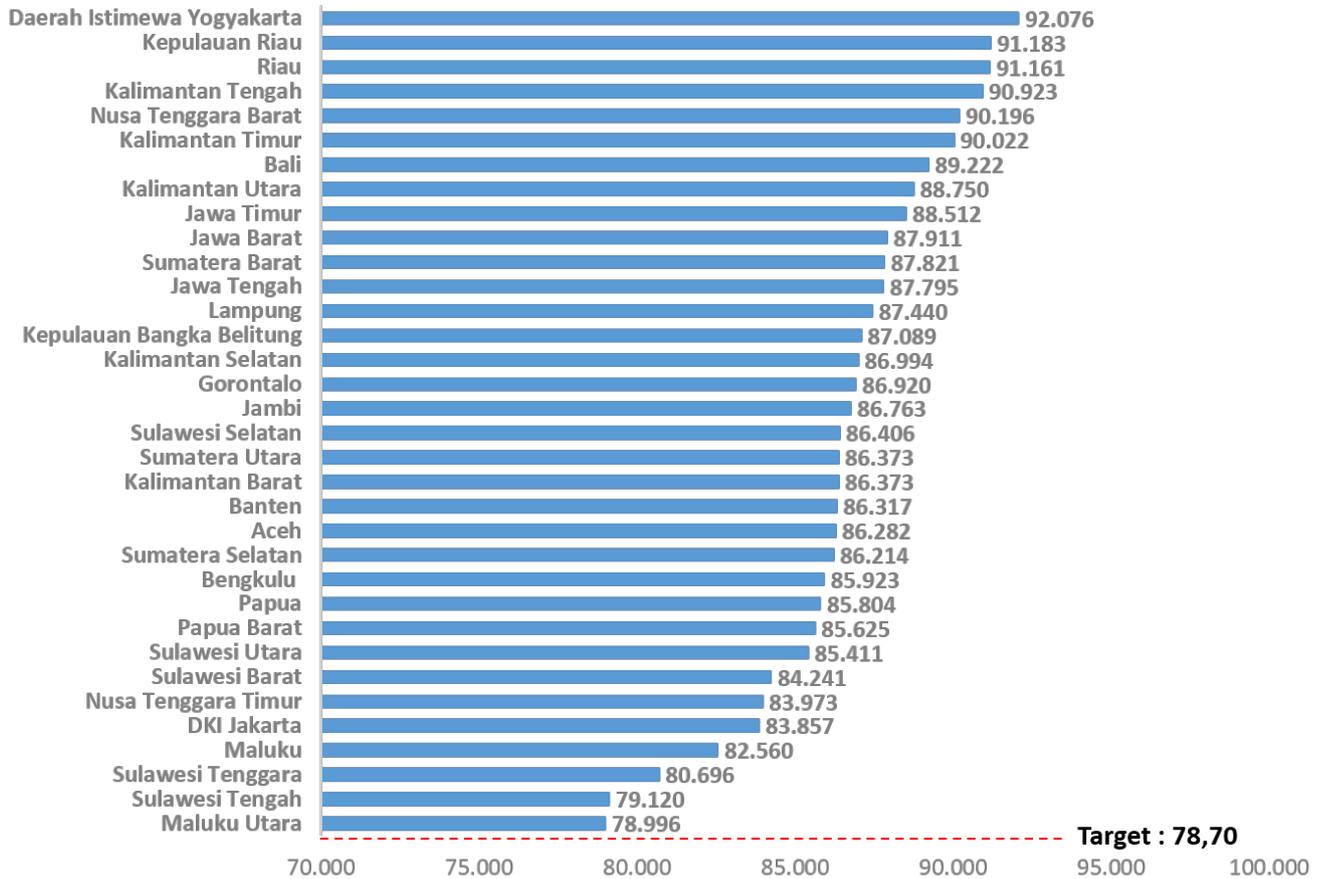


Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Pit. Deputi Pencegahan

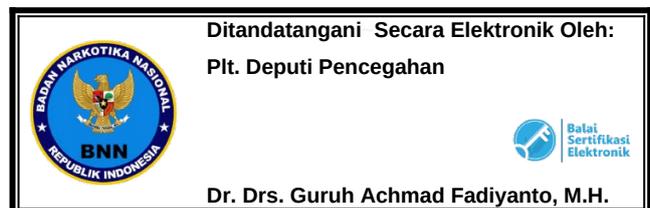


Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.

## GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



## Lampiran 4

## REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI BNN KOTA KEDIRI TA. 2024

NO.	SASARAN	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA	NILAI IKP				
			NILAI IKP	PENGHITUNGAN KUESIONER	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1	INSTANSI PEMERINTAH	Pemerintah Kelurahan Ngampel	3,84	96,00	3,26 - 4,00	A	SANGAT MANDIRI
2		Pemerintah Kelurahan Sukorame	3,44	86,00	3,26 - 4,00	A	SANGAT MANDIRI
3		Pemerintah Kelurahan Dandangan	3,64	91,00	3,26 - 4,00	A	SANGAT MANDIRI
RATA-RATA NILAI IKP			<b>3,64</b>	<b>91,00</b>	<b>3,25 - 4,00</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>

NO.	SASARAN	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA	NILAI IKP				
			NILAI IKP	PENGHITUNGAN KUESIONER	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1	INSTANSI PEMERINTAH	Satgas Dandangan Bersinar	3,80	95,00	3,26 - 4,00	A	SANGAT MANDIRI
2		Satgas Ngampel Bersinar	3,72	93,00	3,26 - 4,00	A	SANGAT MANDIRI
3		Karang Taruna Ngampel Raya	3,00	75,00	2,51 - 3,25	B	MANDIRI
RATA-RATA NILAI IKP			<b>3,51</b>	<b>87,67</b>	<b>3,25 - 4,00</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKR,  
IKM dan Presentase Peningkatan  
Kualitas Hidup Tahun 2024

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepada

Yth. **Daftar terlampir**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Sprin/2003/VI/KA/KP. 05.00/2024/BNN tanggal 1 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Rehabilitasi BNN;
- f. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah selesai melaksanakan pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR), pengukuran Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi (IKM) dan Presentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja bidang Rehabilitasi dengan hasil sebagaimana terlampir.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala untuk dapat menjadikan hasil dimaksud sebagai dasar dalam meningkatkan capaian kinerja dan peningkatan kualitas bidang rehabilitasi mendatang di wilayah beserta jajaran.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;

**DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI  
YANG TELAH DILAKUKAN  
PENGUKURAN IKM DAN IKR T.A 2024**

---

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

**HASIL CAPAIAN KINERJA BIDANG REHABILITASI  
TAHUN 2024**

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
<b>BNN</b>	<b>3.51</b>	<b>3.62</b>	<b>85.32</b>
<b>Aceh</b>	<b>3.32</b>	<b>3.6</b>	<b>90.32</b>
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3.27	3.51	89.53
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3.26	3.85	83.13
BNN Kabupaten Bireuen	3.70	3.62	96.71
BNN Kabupaten Gayo Lues	3.65	3.52	100.00
BNN Kabupaten Pidie	3.36	3.44	95.83
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3.28	3.62	93.42
BNN Kota Banda Aceh	3.35	3.68	91.67
BNN Kota Langsa	3.11	3.84	97.14
BNN Kota Lhokseumawe	3.56	3.3	94.05
BNN Kota Sabang	2.59	3.65	88.64
BNNP Aceh	3.35	3.43	81.32
<b>Sumatera Utara</b>	<b>3.50</b>	<b>3.58</b>	<b>92.43</b>
BNN Kabupaten Asahan	3.58	3.66	98.31
BNN Kabupaten Batu Bara	4.00	3.81	98.81
BNN Kabupaten Deli Serdang	3.9	3.73	78.82
BNN Kabupaten Karo	3.66	3.68	91.67
BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.51	3.27	97.92
BNN Kabupaten Langkat	3.49	3.29	79.21
BNN Kabupaten Mandailing Natal	4	3.57	98.44
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	2.78	3.52	97.92
BNN Kabupaten Simalungun	3.4	3.53	100.00
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2.93	3.47	93.48
BNN Kota Binjai	3.8	3.6	84.21
BNN Kota Gunungsitoli	2.65	3.59	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3.86	3.85	95.74
BNN Kota Tanjung Balai	3.61	3.8	84.26
BNN Kota Tebing Tinggi	3.9	3.62	97.39
BNNP Sumatera Utara	3.57	3.68	96.04
<b>Sumatera Barat</b>	<b>3.76</b>	<b>3.5</b>	<b>83.80</b>
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3.86	3.27	88.64
BNN Kabupaten Solok	3.85	3.52	87.50
BNN Kota Payakumbuh	3.9	3.6	75.78
BNN Kota Sawahlunto	3.35	3.49	86.90

LAMPIRAN  
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
TANGGAL : 07 Januari 2025

BNNP Sumatera Barat	3.85	3.48	83.56
<b>Riau</b>	3.21	<b>3.69</b>	<b>88.55</b>
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	3.49	3.77	94.32
BNN Kabupaten Pelalawan	3.01	3.63	80.92
BNN Kota Dumai	2.73	3.66	85.53
BNN Kota Pekanbaru	3.28	3.58	95.00
BNNP Riau	3.53	3.79	90.32
<b>Kepulauan Riau</b>	3.66	<b>3.72</b>	<b>80.21</b>
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3.19	3.75	98.15
BNN Kota Batam	3.77	3.55	85.71
BNN Kota Tanjung Pinang	3.7	3.71	83.75
BNNP Kepulauan Riau	3.66	3.8	72.73
<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	3.67	<b>3.57</b>	<b>91.56</b>
BNN Kabupaten Bangka	3.52	3.47	94.12
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3.55	3.33	91.25
BNN Kabupaten Belitung	3.9	3.83	98.39
BNN Kota Pangkal Pinang	3.69	3.66	97.09
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.58	73.28
<b>Bengkulu</b>	<b>3.68</b>	<b>3.69</b>	<b>78.42</b>
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3.21	3.69	89.63
BNN Kota Bengkulu	3.6	3.62	76.32
BNNP Bengkulu	4.00	3.86	77.13
<b>Jambi</b>	<b>3.24</b>	<b>3.48</b>	<b>85.14</b>
BNN Kabupaten Batang Hari	3.59	3.43	84.68
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.75	3.67	97.00
BNN Kota Jambi	2.71	3.3	85.89
BNNP Jambi	3.90	3.79	81.46
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>3.19</b>	<b>3.63</b>	<b>86.63</b>
BNN Kabupaten Empat Lawang	2.61	3.32	91.94
BNN Kabupaten Muara Enim	3.17	3.77	78.75
BNN Kabupaten Musi Rawas	2.88	3.72	100.00
BNN Kabupaten Ogan Ilir	2.26	3.64	82.50
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3.81	3.89	97.97
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2.97	3.5	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	4	3.79	81.45
BNN Kota Pagar Alam	3.03	3.39	94.23
BNN Kota Prabumulih	3.13	3.61	75.69
BNNP Sumatera Selatan	3.7	3.73	83.44
<b>Lampung</b>	<b>3.6</b>	<b>3.65</b>	<b>83.85</b>
BNN Kabupaten Lampung Selatan	2.39	3.82	76.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3.9	3.66	74.52

LAMPIRAN  
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Tanggamus	3.66	3.68	83.33
BNN Kabupaten Way Kanan	3.9	3.45	98.57
BNN Kota Metro	3.9	3.56	88.69
BNNP Lampung	4	3.7	87.18
<b>Banten</b>	<b>3.93</b>	<b>3.57</b>	<b>76.30</b>
BNN Kota Cilegon	4.00	3.82	65.63
BNN Kota Tangerang	3.86	3.59	88.69
BNN Kota Tangerang Selatan	3.86	3.44	77.42
BNNP Banten	4.00	3.52	68.42
<b>DKI Jakarta</b>	<b>3.84</b>	<b>3.65</b>	<b>89.79</b>
BNN Kota Jakarta Selatan	3.91	3.72	75.24
BNN Kota Jakarta Timur	4.00	3.54	92.11
BNN Kota Jakarta Utara	3.63	3.84	99.48
BNNP DKI Jakarta	4.00	3.45	90.05
<b>Jawa Barat</b>	<b>3.56</b>	<b>3.56</b>	<b>80.20</b>
BNN Kabupaten Bandung Barat	3.46	3.44	74.22
BNN Kabupaten Bogor	3.20	3.54	88.31
BNN Kabupaten Ciamis	4.00	3.58	82.64
BNN Kabupaten Cianjur	3.76	3.6	71.88
BNN Kabupaten Garut	3.73	3.86	93.64
BNN Kabupaten Karawang	3.86	3.85	94.32
BNN Kabupaten Kuningan	3.38	3.3	93.27
BNN Kabupaten Sukabumi	3.11	3.28	48.75
BNN Kabupaten Sumedang	3.57	3.47	70.00
BNN Kota Bandung	3.31	3.52	63.69
BNN Kota Cimahi	3.72	3.64	86.23
BNN Kota Cirebon	3.56	3.57	82.69
BNN Kota Depok	3.17	3.5	88.28
BNN Kota Tasikmalaya	3.57	3.59	88.54
BNNP Jawa Barat	3.62	3.53	75.78
<b>Jawa Tengah</b>	<b>3.70</b>	<b>3.62</b>	<b>85.40</b>
BNN Kabupaten Banyumas	3.75	3.9	90.15
BNN Kabupaten Batang	3.61	3.65	89.19
BNN Kabupaten Cilacap	3.62	3.43	98.53
BNN Kabupaten Kendal	3.49	3.53	90.00
BNN Kabupaten Magelang	3.53	3.52	87.10
BNN Kabupaten Purbalingga	3.49	3.57	76.85
BNN Kabupaten Temanggung	4.00	3.82	98.75
BNN Kota Surakarta	3.90	3.53	84.85
BNN Kota Tegal	3.63	3.41	85.19
BNNP Jawa Tengah	4.00	3.7	68.40

<b>D.I.Yogyakarta</b>	<b>3.74</b>	<b>3.83</b>	<b>87.64</b>
BNN Kabupaten Bantul	4.00	3.84	86.27
BNN Kabupaten Sleman	4.00	3.87	91.42
BNN Kota Yogyakarta	2.94	3.82	81.25
BNNP D.I.Yogyakarta	4.00	3.79	87.38
<b>Jawa Timur</b>	<b>3.66</b>	<b>3.6</b>	<b>87.46</b>
BNN Kabupaten Blitar	4.00	3.4	80.26
BNN Kabupaten Gresik	4.00	3.75	86.90
BNN Kabupaten Kediri	3.32	3.36	97.28
BNN Kabupaten Lumajang	3.39	3.62	83.82
BNN Kabupaten Malang	3.70	3.53	82.81
BNN Kabupaten Nganjuk	3.49	3.56	91.67
BNN Kabupaten Pasuruan	3.27	3.21	97.50
BNN Kabupaten Sidoarjo	3.80	3.89	92.50
BNN Kabupaten Sumenep	2.93	3.37	79.17
BNN Kabupaten Trenggeng	3.99	3.57	91.67
BNN Kabupaten Tuban	3.90	3.6	87.93
BNN Kabupaten Tulungagung	3.28	3.62	77.78
BNN Kota Batu	4.00	3.73	96.59
BNN Kota Kediri	3.62	3.45	71.88
BNN Kota Malang	4.00	3.87	78.70
BNN Kota Mojokerto	3.70	3.74	83.65
BNN Kota Surabaya	3.76	3.46	85.37
BNNP Jawa Timur	3.81	3.87	96.54
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>3.23</b>	<b>3.57</b>	<b>88.79</b>
BNN Kabupaten Bengkayang	3.79	3.56	86.84
BNN Kabupaten Kubu Raya	3.35	3.74	79.81
BNN Kabupaten Mempawah	3.9	3.89	95.83
BNN Kabupaten Sanggau	2.34	3.42	90.48
BNN Kabupaten Sintang	2.89	3.67	95.19
BNN Kota Pontianak	3.7	3.73	96.53
BNN Kota Singkawang	2.61	3.43	86.36
BNNP Kalimantan Barat	3.25	3.49	80.63
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>3.43</b>	<b>3.68</b>	<b>90.69</b>
BNN Kabupaten Balangan	3.43	3.56	94.32
BNN Kabupaten Barito Kuala	3.45	3.63	97.78
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.17	3.62	75.00
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.65	3.73	98.61
BNN Kabupaten Tabalong	3.86	3.74	93.75
BNN Kabupaten Tanah Laut	2.71	3.8	56.41
BNN Kota Banjarbaru	4	3.79	84.92

LAMPIRAN  
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kota Banjarmasin	2.91	3.66	97.79
BNNP Kalimantan Selatan	3.7	3.68	99.55
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>3.95</b>	<b>3.7</b>	<b>79.64</b>
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3.86	3.69	81.06
BNN Kota Palangkaraya	4	3.71	75.64
BNNP Kalimantan Tengah	4	3.7	81.01
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>3.73</b>	<b>3.7</b>	<b>84.05</b>
BNN Kota Balikpapan	3.38	3.65	80.85
BNN Kota Bontang	3.39	3.36	78.85
BNN Kota Samarinda	3.91	3.8	87.50
BNNP Kalimantan Timur	3.99	3.75	82.03
<b>Kalimantan Utara</b>	<b>3.83</b>	<b>3.47</b>	<b>94.66</b>
BNN Kabupaten Nunukan	4	3.56	91.67
BNN Kota Tarakan	3.59	3.36	97.09
BNNP Kalimantan Utara	3.91	3.6	93.00
<b>Bali</b>	<b>3.72</b>	<b>3.65</b>	<b>91.18</b>
BNN Kabupaten Badung	3.89	3.68	65.28
BNN Kabupaten Buleleng	3.86	3.46	100.00
BNN Kabupaten Gianyar	3.61	3.31	70.45
BNN Kabupaten Karangasem	3.32	3.56	100.00
BNN Kabupaten Klungkung	3.86	3.94	95.00
BNN Kota Denpasar	3.62	3.61	84.26
BNNP Bali	3.90	3.84	93.06
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>3.92</b>	<b>3.72</b>	<b>83.95</b>
BNN Kabupaten Bima	4	3.61	82.81
BNN Kabupaten Sumbawa	3.9	3.69	86.67
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3.69	3.65	83.75
BNN Kota Mataram	4.00	3.81	85.80
BNNP Nusa Tenggara Barat	4.00	3.75	80.59
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>3.26</b>	<b>3.77</b>	<b>87.18</b>
BNN Kabupaten Belu	3.18	3.8	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3.66	3.91	100.00
BNN Kota Kupang	2.54	3.55	100.00
BNNP Nusa Tenggara Timur	3.67	3.79	80.77
<b>Sulawesi Utara</b>	<b>3.18</b>	<b>3.59</b>	<b>92.83</b>
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3.76	3.82	100.00
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	2.79	3.9	89.17
BNN Kota Bitung	3.11	3.63	93.57
BNN Kota Manado	2.85	3.74	90.82
BNNP Sulawesi Utara	3.37	3.4	93.27
<b>Gorontalo</b>	<b>3.2</b>	<b>3.5</b>	<b>77.17</b>

LAMPIRAN  
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Boalemo	3.41	3.25	93.75
BNN Kabupaten Bone Bolango	3.07	3.64	71.88
BNN Kabupaten Gorontalo	3.23	3.57	58.33
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	2.77	3.24	87.50
BNN Kota Gorontalo	2.85	3.49	75.00
BNNP Gorontalo	3.90	3.54	78.13
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>3.50</b>	<b>3.52</b>	<b>97.22</b>
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3.53	3.36	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3.47	3.59	96.67
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>3.81</b>	<b>3.65</b>	<b>87.56</b>
BNN Kabupaten Bone	4	3.89	95.44
BNN Kabupaten Tana Toraja	3.79	3.46	72.58
BNN Kota Palopo	3.57	3.51	77.30
BNNP Sulawesi Selatan	3.67	3.54	89.72
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>2.94</b>	<b>3.6</b>	<b>75.83</b>
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	3.46	3.24	25.00
BNN Kabupaten Donggala	2.84	3.68	81.48
BNN Kabupaten Morowali	1.89		92.86
BNN Kabupaten Poso	2.22	3.64	71.00
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	4	3.72	95.51
BNN Kota Palu	3.37	3.84	63.28
BNNP Sulawesi Tengah	2.78	3.34	72.97
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>3.47</b>	<b>3.54</b>	<b>92.14</b>
BNN Kabupaten Kolaka	3.6	3.63	99.07
BNN Kabupaten Muna	3.62	3.4	99.09
BNN Kota Baubau	2.24	3.64	93.75
BNN Kota Kendari	3.89	3.59	67.86
BNNP Sulawesi Tenggara	3.99	3.53	89.44
<b>Maluku</b>	<b>3.23</b>	<b>3.22</b>	<b>72.00</b>
BNN Kabupaten Buru Selatan	3.27	3.47	75.00
BNN Kota Tual	2.79	3.4	47.22
BNNP Maluku	3.62	3.22	79.35
<b>Maluku Utara</b>	<b>3.08</b>	<b>3.39</b>	<b>74.64</b>
BNN Kabupaten Halmahera Utara	2.25	3.39	95.00
BNN Kabupaten Pulau Morotai	3.09	3.25	76.67
BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32	3.45	100.00
BNNP Maluku Utara	3.66	3.41	69.57
<b>Papua</b>	<b>3.29</b>	<b>3.68</b>	<b>97.47</b>
BNN Kabupaten Jayapura	3.59	3.85	95.24
BNN Kabupaten Mimika	3.01	3.42	93.75
BNNP Papua	3.28	3.65	99.46

LAMPIRAN

SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi

NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN

TANGGAL : 07 Januari 2025

Papua Barat	3.66	3.64	100.00
Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido	4	3.64	76.99
Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	4	3.63	83.11
Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	4	3.65	67.97
Loka Rehabilitasi BNN Batam	4	3.76	85.76
Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	3.81	3.64	89.25
Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	4	3.69	63.69



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Plt. Deputi Rehabilitasi



Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD.

## Peta Skor IKM Layanan Rehabilitasi Narkotika BNN



### Kesimpulan

Kepuasan layanan rehabilitasi BNN pada Klinik/UPT Klinik Pratama BNN Kota Kediri memenuhi kategori **Baik (B)**. Berdasarkan unsur kepuasan layanan yang dinilai, semua unsur layanan agar dipertahankan kualitasnya.

#### Kategori IKM

3,533 - 4,000 = Sangat Baik (A)  
3,065 - 3,532 = Baik (B)  
2,599 - 3,064 = Kurang Baik (C)  
1,000 - 2,598 = Tidak Baik(D)

**3.45** (86.25%)

IKM

Nilai IKM (TrueScore)

**24**

Klien Dewasa

Statistik Klien

**1**

Klien Anak

Statistik Klien

**B**

Baik

Kategori IKM



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
KECAMATAN KOTA  
KELURAHAN DANDANGAN**

Jl. Singosari No. 10 Kediri Kode Pos 64122 Telp. 695653

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN DANDANGAN  
NOMOR: 100.3.3/07/419.511/2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DAN  
PENUNJUKAN ANGGOTA TIM IBM  
DI KELURAHAN DANDANGAN KOTA KEDIRI  
TAHUN 2024**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
KEPALA KELURAHAN DANDANGAN**

- Menimbang :
- Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap rehabilitasi berkelanjutan bagi Pecandu dan/atau Penyalahguna Narkotika di Kelurahan.
  - Bahwa anggota tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah Agen Pemulihan yang bertugas melaksanakan layanan rehabilitasi berkelanjutan bagi Pecandu dan/atau Penyalahguna Narkotika di wilayah IBM.
  - Bahwa anggota tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat di wilayah IBM.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Dandangan Kota Kediri.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 09 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia No. 25 tahun 2011 tentang Wajib lapor Pecandu Narkotika;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
  - Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/110/KPTS/013/2020 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 13 tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika;
  - Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 29 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 13 tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika;
  - Peraturan Daerah Kota Kediri No 8 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Pencegahan

10. dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba;  
Peraturan Walikota Kota Kediri No 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan walikota kediri No 38 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan
11. Peraturan Daerah Kota Kediri No 8 Tahun 2017 tentang fasilitasi P4GN;  
Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Pertama Tahun
12. Anggaran 2024;  
Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kediri Nomor: KEP/10/III/KA/RH.01/2024/BNNK tentang Penetapan Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Terbentuk Tahun Anggaran 2024.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN DANDANGAN KOTA KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DAN PENUNJUKAN ANGGOTA TIM IBM DI KELURAHAN DANDANGAN KOTA KEDIRI TAHUN 2024.
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Dandangan.
- KEDUA : Anggota Tim IBM sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas antara lain :
- a. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat;
  - b. Melakukan pemetaan dan penjangkauan Pecandu dan/atau Penyalahguna Narkoba di wilayah IBM sebagai calon klien;
  - c. Melakukan kegiatan pemantauan dan pendampingan pada klien di program layanan IBM di Kelurahan;
  - d. Melakukan pencatatan, pelaporan, dan memenuhi administrasi sesuai petunjuk/panduan;
  - e. Melaksanakan koordinasi dengan Petugas Seksi Rehabilitasi BNN Kota Kediri dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota tim IBM.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota tim IBM sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, senantiasa berkoordinasi dengan Seksi Rehabilitasi BNN Kota Kediri
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Kota Kediri  
Pada Tanggal : 07 Juni 2024

**KEPALA KELURAHAN DANDANGAN**  
  
**RUDY WIRKO, SE.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19761211 199602 1 003

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Sdr. Kepala BNN Kota Kediri
2. Sdr. Camat Kota, Kota Kediri

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN DANDANGAN  
NOMOR : 100.3.3/07/419.511/2024  
TANGGAL : 07 Juni 2024

**ANGGOTA TIM IBM DI UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT  
KELURAHAN DANDANGAN KOTA KEDIRI  
TAHUN 2024**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.	EKO PURNOMO	3506121501830005	JL. DANDANGAN I/53 RT/RW. 002/008 KEL. DANDANGAN KEC. KOTA KEDIRI
2.	JOKO LELONO	3571022804950002	DANDANGAN GG. II NO. 141 RT/RW. 004/006 KEL. DANDANGAN KEC. KOTA KEDIRI
3.	MUJIANTO	3571021907640004	JL. PEMUDA GG. RAHAYU 14 RT/RW. 003/005 KEL. DANDANGAN KEC. KOTA KEDIRI
4.	YUDHI EKO PRASETYO	3571022807850006	APARTEMEN RAKYAT/ARA BLOK E5. 16 RT/RW. 006/014 KEL. DANDANGAN KEC. KOTA KEDIRI
5.	YANURI SAPTA JAYA	3571021801790006	RUSUNAWA BLOK D LANTAI 5 NO.13 KEL. DANDANGAN KEC. KOTA KEDIRI

Ditetapkan di : Kota Kediri  
Pada Tanggal : 06 Juni 2024

**KEPALA KELURAHAN DANDANGAN**  
  
**RUDY WINARKO, SE.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19761211 199602 1 003



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**KECAMATAN MOJOROTO**  
**KELURAHAN NGAMPEL**

*Jl. Ngampel Raya No. 63 Kode Pos 64112 Telp. (0354) 7411320*

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN NGAMPEL**  
**NOMOR: 100.3.3/05/419.412/2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DAN**  
**PENUNJUKAN ANGGOTA TIM IBM**  
**DI KELURAHAN NGAMPEL KOTA KEDIRI**  
**TAHUN 2024**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**  
**KEPALA KELURAHAN NGAMPEL**

- Menimbang :
- a. Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap rehabilitasi berkelanjutan bagi Pecandu dan/atau Penyalahguna Narkotika di Kelurahan.
  - b. Bahwa anggota tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah Agen Pemulihan yang bertugas melaksanakan layanan rehabilitasi berkelanjutan bagi Pecandu dan/atau Penyalahguna Narkotika di wilayah IBM.
  - c. Bahwa anggota tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat di wilayah IBM.
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Ngampel Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 09 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia No. 25 tahun 2011 tentang Wajib lapor Pecandu Narkotika;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
  6. Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/110/KPTS/013/2020 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 13 tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika;
  8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 29 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 13 tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika;
  9. Peraturan Daerah Kota Kediri No 8 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika;
  - 10.

- Peraturan Walikota Kota Kediri No 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan walikota kediri No 38 Tahun 2018 Tentang Peraturan
11. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri No 8 Tahun 2017 tentang fasilitasi P4GN;  
Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi
  12. Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024;  
Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kediri Nomor: KEP/10/III/KA/RH.01/2024/BNNK tentang Penetapan Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Terbentuk Tahun Anggaran 2024.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN NGAMPEL KOTA KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DAN PENUNJUKAN ANGGOTA TIM IBM DI KELURAHAN NGAMPEL KOTA KEDIRI TAHUN 2024.
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Ngampel.
- KEDUA : Anggota Tim IBM sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas antara lain :
- a. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat;
  - b. Melakukan pemetaan dan penjangkauan Pecandu dan/atau Penyalahguna Narkoba di wilayah IBM sebagai calon klien;
  - c. Melakukan kegiatan pemantauan dan pendampingan pada klien di program layanan IBM di Kelurahan;
  - d. Melakukan pencatatan, pelaporan, dan memenuhi administrasi sesuai petunjuk/panduan;
  - e. Melaksanakan koordinasi dengan Petugas Seksi Rehabilitasi BNN Kota Kediri dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota tim IBM.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota tim IBM sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, senantiasa berkoordinasi dengan Seksi Rehabilitasi BNN Kota Kediri
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Kota Kediri  
Pada Tanggal : 07 Mei 2024

**KEPALA KELURAHAN NGAMPEL**



**MOH. SUBAGYA, S.Sos**

Penata Tk I

NIP. 19690312 199302 1 002

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Sdr. Kepala BNN Kota Kediri
2. Sdr. Camat Mojoroto Kota Kediri

**ANGGOTA TIM IBM DI UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT  
KELURAHAN NGAMPEL KOTA KEDIRI  
TAHUN 2024**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.	MOH. FATONI	3571011410730003	JL. BUNGA GG. VI NO. 81 RT/RW. 020/003 KEL. NGAMPEL KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI
2.	ANDHIKA TRISNA KURNIAWAN PUTRA	3571012604730003	JL. TERATAI 11 RT/RW. 017/003 KEL. NGAMPEL KEC. MOJOROTO KOTA KEDRI
3.	WIDA KARTIKAWATI	3571016104840012	JL. CEMPAKA RT/RW. 027/004 KEL. NGAMPEL KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI
4.	SAEFUDIN	3571011408670003	JL. ABUSONO NO.29 RT/RW. 008/002 KEL. NGAMPEL KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI
5.	MIFTAHUL HUDA	3571012609020003	JL. PENGAIRAN NO.15 RT/RW. 005/001 KEL. NGAMPEL KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI

Ditetapkan di : Kota Kediri  
Pada Tanggal : 07 Mei 2024

**KEPALA KELURAHAN NGAMPEL**



**MOH. SUBAGYA, S.Sos**

Penata Tk I

NIP. 19690312 199302 1 002

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Nomor : YM.02.01/D/41054/2024

Klinik : **Klinik Pratama Rawat Jalan Bnn Kota Kediri**  
Alamat : Jl. Selomangleng No. 3, Kel. Pojok  
Kecamatan : Mojoroto  
Kabupaten / Kota : Kota Kediri  
Provinsi : Jawa Timur

sebagai pengakuan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah memenuhi standar akreditasi dan dinyatakan lulus :

## PARIPURNA

Masa Berlaku : 30 Mei 2024 s.d 30 Mei 2029

Jakarta, 03 Juni 2024



LPA-PKP

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Ketua Lembaga Penyelenggara Akreditasi  
Pelayanan Kesehatan Paripurna

dr Dien Emawati Mkes



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS

**SERT/120 /XI/DE/RH.02/2024/BNN**

Diberikan Kepada

# Klinik Pratama BNN Kota Kediri



Badan Narkotika Nasional  
Republik Indonesia

Atas partisipasinya dalam Pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR)  
Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional.



Hasil

**A - Optimal**  
**3,62**



Jakarta  
26 November 2024



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR: KEP/142/I/DE/RH.02.03/2024/BNN

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika milik pemerintah dan masyarakat;
  - b. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi, salah satunya yaitu dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional dengan memberikan peningkatan kemampuan, agar dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan yang sesuai dengan standar rehabilitasi yang ditentukan;
  - c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional untuk mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai standar rehabilitasi yang ditentukan agar terjaga keberlangsungannya;

/ d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Lembaga Mitra Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporkan;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 655/KEP/BSN/12/2022 tentang Penetapan SNI 8807:2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/57/II/KA/RH/2019/BNN tentang Pendelegasian Penandatanganan Berkas Perjanjian Kerjasama dan Keputusan Kepala Terkait Peningkatan Kemampuan Kepada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

/bagi.....

9. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan lembaga yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional untuk menyelenggarakan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan memperoleh peningkatan kemampuan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

KEDUA : Lembaga rehabilitasi milik pemerintah maupun milik masyarakat yang menjadi mitra BNN dalam penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNN dan Lembaga Rehabilitasi Mitra.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan mengacu pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

/KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

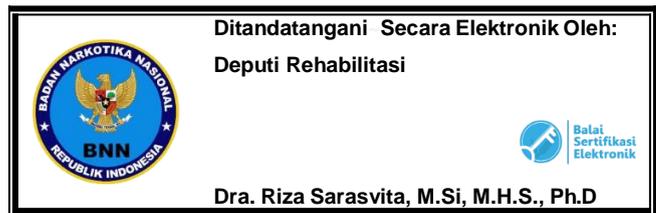
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/ BNNK/ Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 23 Januari 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**DAFTAR LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
1	Aceh	BNNP Aceh	Yayasan Kayyis	Sosial KM
2	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Alfatha	Sosial KM
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Rumah Geutanyo Aceh	Sosial KM
4	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Surya	Sosial KM
5	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Pintu Hijrah	Sosial KM
6	Aceh	BNN Kab. Pidie	Puskesmas Kembang Tanjong	Medis IP
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Puskesmas Padang Tiji	Medis IP
8	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Puskesmas Gandapura	Medis IP
9	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Klinik Ka Tiga	Medis KM
10	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Klinik Dokkes	Medis IP
11	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Yayasan Permata Aceh Perduli (YPAP)	Sosial KM
12	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Puskesmas Banda Sakti	Medis IP
13	Aceh	BNN Kota Langsa	RSU Cut Nyak Dhien	Medis IP
14	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Sahabat	Medis KM
15	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Bina Azkia	Medis KM
16	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Klinik dr. Zuheini	Medis KM
17	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Klinik Assyifa	Medis KM
18	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Yayasan Rumoh Harapan Nagan	Sosial KM
19	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Pintu Hijrah Aceh Selatan	Sosial KM
20	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	RSJ. Prof. HB. Saanin Padang	Medis IP
21	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Klinik Intan Sari Padang	Medis KM
22	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Naras Pariaman	Medis IP
23	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Nan Balimo Solok	Medis IP
24	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Biaro Agam	Medis IP
25	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Klinik WD Farma Bukit tinggi	Medis KM
26	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Puskesmas Tanjung Pati	Medis IP
27	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Puskesmas Muara Panas	Medis IP
28	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Puskesmas Sirukam	Medis IP

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>BNNP/KAB/KOTA</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>KETERANGAN</b>
29	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	RSUD Sawahlunto	Medis IP
30	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Rumah Sehat Islam (RSI) Silungkang	Sosial KM
31	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Klinik Arisha Pasaman Barat	Medis KM
32	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Fokus RNI	RI Sosial
33	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Etika Mulia	RI Sosial
34	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia	RI Sosial
35	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Nazar	RI Sosial
36	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Caritas PSE	RI Sosial
37	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Pusat Perawatan dan Pemulihan Adiksi Baitusyifa	RI Sosial
38	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Sibolangit Center	RI Sosial
39	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Puskesmas Bromo	RJ Medis
40	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	RSJ Prof. Dr. M. Ildrem	RI Medis
41	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Eka Darma Bakti	RI Sosial
42	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Mari Indonesia Bersinar (MARINDO)	RI Sosial
43	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Amelia	RI Sosial
44	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Panti Rehabilitasi Korban Penyalah guna Napza Rumah Kita	RI Sosial
45	Sumatera Utara	BNNK Tanjungbalai	Yayasan Asia Treatmen Center (ATC) Kota Tanjung balai	RI Sosial
46	Sumatera Utara	BNNK Serdang Bedagai	Yayasan Rehabilitasi Jopan	RI Sosial
47	Riau	BNNP Riau	Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau	Medis IP
48	Riau	BNNP Riau	RSUD Rokan Hulu	Medis IP
49	Riau	BNNP Riau	IPWL Perawang	Sosial KM
50	Riau	BNNP Riau	Yayasan Mercusuar Riau	Sosial KM
51	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Solid Foundation	Sosial KM
52	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Sarasehan	Sosial KM
53	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Satu Bumi	Sosial KM
54	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Rumah Rehabilitasi Geliat Pelangi	Sosial KM
55	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Lembaga Permasayarakatan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru	Sosial IP
56	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Generasi Muda Bernilai	Sosial KM
57	Jambi	BNN Provinsi Jambi	RSJD Provinsi Jambi	Medis IP
58	Jambi	BNN Provinsi Jambi	RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Sarolangun	Medis IP
59	Jambi	BNN Provinsi Jambi	Yayasan Karunia Insani Merangin Jambi	Sosial KM
60	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	RS. Mitra Medika Batang Hari	Medis KM

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>BNNP/KAB/KOTA</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>KETERANGAN</b>
61	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	Yayasan Lembaga Para Sahabat	Sosial KM
62	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPTD Puskesmas Durian Luncuk	Medis IP
63	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPT Puskesmas Jembatan Mas	Medis IP
64	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPT Puskesmas Mersam	Medis IP
65	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPTD Puskesmas Sungai Rengas	Medis IP
66	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Puskesmas Rawat Inap Simpang Pandan	Medis IP
67	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Puskesmas Rawat Inap Kampung Laut	Medis IP
68	Jambi	BNN Kota Jambi	IPWL Kanti Sehati Sejati Jambi	Sosial KM
69	Jambi	BNN Kota Jambi	UPTD Puskesmas Tanjung Pinang	Medis IP
70	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	Yayasan Karunia Insani Foundation (Rumah Female)	Sosial KM
71	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	Dharma Wahyu Insani Cab. Rejang Lebong	Sosial KM
72	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	RSKJ Soeprpto Provinsi Bengkulu	Medis IP
73	Bengkulu	BNNK Bengkulu Selatan	RSUD Hasanuddin Damrah	Medis IP
74	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Padang Serai	Medis IP
75	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Betungan	Medis IP
76	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Basuki Rahmat	Medis IP
77	Lampung	BNNP Lampung	House Of Serenity	Sosial KM
78	Lampung	BNNP Lampung	Yayasan Wisma Ataraxis	Sosial KM
79	Lampung	BNNP Lampung	Yayasan Sinar Jati	Sosial KM
80	Lampung	BNNP Lampung	RSUD. Abdul Moeloek	Medis IP
81	Lampung	BNNP Lampung	RSJ. Provinsi Lampung	Medis IP
82	Lampung	BNNP Lampung	RSUD. Dr. A. Dadi Tjokrodipo	Medis IP
83	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Simpur	Medis IP
84	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Permata Sukarame	Medis IP
85	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Gedong Air	Medis IP
86	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Panjang	Medis IP
87	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Sukabumi	Medis IP
88	Lampung	BNNK Lampung Timur	Yayasan Hayat Permata Dharma	Sosial KM
89	Lampung	BNNK Lampung Timur	Yayasan Cahaya Putra Selatan	Sosial KM
90	Lampung	BNNK Metro	Lentera Putih Bersinar	Sosial KM
91	Lampung	BNNK Lampung Selatan	RSUD Bandar Negara Husada	Medis IP
92	Lampung	BNNK Lampung Selatan	UPTD. Puskesmas Way Urang	Medis IP
93	Banten	BNNP Banten	RSUD Banten	Medis IP

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>BNNP/KAB/KOTA</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>KETERANGAN</b>
94	Banten	BNNP Banten	Yayasan Sakinah Harakah Bhakti (Sahabat)	Sosial KM
95	Banten	BNNP Banten	Yayasan Bani Syifa	Sosial KM
96	Banten	BNNP Banten	BAPAS SERANG	Sosial IP
97	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Galigo institute	Sosial KM
98	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Puskesmas Ciputat	Medis IP
99	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Yayasan Aksi Cahaya Generasi Bangsa	Sosial KM
100	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Yayasan Langkah Ragam Nusantara	Sosial KM
101	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Kelas I Tangerang	Medis IP
102	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Cibodasari	Medis IP
103	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Jalan Emas	Medis IP
104	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang	Medis / Sosial IP
105	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang	Medis / Sosial IP
106	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Cipondoh	Medis IP
107	Banten	BNNK Tangerang	Yasibara	Sosial KM
108	Banten	BNNK Tangerang	RSUP.Sitanala	Medis IP
109	Banten	BNNK Tangerang	RS Hermina	Medis IP
110	Banten	BNNK Tangerang	Yayasan Rehabilitasi Lahir Batin Kobong Assyifa	Sosial KM
111	Banten	BNNK Cilegon	Klinik Tazkiya	Medis IP
112	Banten	BNNK Cilegon	RSIA Mutiara Bunda	Medis IP
113	Jawa Barat	Jawa Barat	RSJ Provinsi Jawa Barat	Medis IP
114	Jawa Barat	Jawa Barat	Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bandung	Medis/Sosial IP
115	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Peduli Kasih Bekasi	Sosial KM
116	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Rehab Korban Narkoba Bekasi	Sosial KM
117	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Pradita Madani Cempaka Cirebon	Sosial KM
118	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera (Grapiks)	Sosial KM
119	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Katarsis Sarasati Edukasi	Sosial KM
120	Jawa Barat	Jawa Barat	Klinik Utama Rawat Inap Jiwa Karya Sehat Nusantara	Medis KM
121	Jawa Barat	Jawa Barat	Klinik Bunda Aulia Bekasi	Medis KM
122	Jawa Barat	BNNK Kuningan	Yayasan Rumah Tenjo Laut	Sosial KM
123	Jawa Barat	BNNK Kuningan	Yayasan Ciptawening	Sosial KM
124	Jawa Barat	BNNK Cirebon	Yayasan Bina Insani Mandiri	Sosial KM
125	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Kejaksan	Medis IP

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>BNNP/KAB/KOTA</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>KETERANGAN</b>
126	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Drajat	Medis IP
127	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Kesunean	Medis IP
128	Jawa Barat	BNNK Bogor	Harapan Permata Hati Kita	Sosial KM
129	Jawa Barat	BNNK Bogor	Bersama Kita Pulih	Sosial KM
130	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Pelayanan Agape	Sosial KM
131	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Rumah Asa Anak Bangsa	Sosial KM
132	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Untuk Segala Bangsa (Fan Campus)	Sosial KM
133	Jawa Barat	BNNK Bogor	Breakthrough Missions Indonesia	Sosial KM
134	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Graha Suar Indonesia	Sosial KM
135	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Lentera Harapan Nusantara	Sosial KM
136	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Kayva Kasih Rehabilitasi	Sosial KM
137	Jawa Barat	BNNK Garut	Rumah Sakit TK IV 03.04.07 Guntur Garut	Medis IP
138	Jawa Barat	BNNK Garut	UPTD Puskesmas Karangpawitan	Medis IP
139	Jawa Barat	BNNK Garut	Puskesmas Cipanas	Medis IP
140	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Inabah II Putri	Sosial KM
141	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Ar-Rahmaniyyah	Sosial KM
142	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Serba Bakti Inabah Remaja Putra XVIII	Sosial KM
143	Jawa Barat	BNNK Cimahi	RSUD Cibabat Cimahi	Medis IP
144	Jawa Barat	BNNK Cimahi	Puskesmas Cimahi Utara	Medis IP
145	Jawa Barat	BNNK Cimahi	Puskesmas Melong Asih	Medis IP
146	Jawa Barat	BNNK KBB	Puskesmas DTP Jayagiri	Medis IP
147	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Kawalu	Medis IP
148	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Tawang	Medis IP
149	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya (Inabah 27 Putra)	Sosial KM
150	Jawa Barat	BNNK Depok	Rutan Kelas I Depok	Medis/ Sosial IP
151	Jawa Barat	BNNK Karawang	RS Islam Karawang	Medis KM
152	Jawa Barat	BNNK Karawang	RS Izza	Medis KM
153	Jawa Barat	BNNK Karawang	Puskesmas Karawang	Medis IP
154	Jawa Barat	BNNK Sukabumi	Yayasan Rehab Korban Narkoba (KOBRA)	Sosial KM
155	Jawa Barat	BNNK Sukabumi	Yayasan Lensa Bhineka Nusantara	Sosial KM
156	Jawa Barat	BNNK Bandung	Yayasan Sekar Mawar	Sosial KM
157	Jawa Barat	BNNK Bandung	Yayasan Gerbang Harmoni Indonesia	Sosial KM
158	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Kasih Mulia	Sosial KM
159	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Ashefa Griya Putra	Sosial KM

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>BNNP/KAB/KOTA</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>KETERANGAN</b>
160	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Lentera Bersinar Indonesia	Sosial KM
161	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Klinik Amerta	Medis KM
162	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Johar Baru	Medis IP
163	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Gambir	Medis IP
164	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Cengkareng	Medis IP
165	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Senen	Medis IP
166	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Tambora	Medis IP
167	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan	Medis IP
168	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Klinik Sisma Medika	Medis KM
169	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Penjaringan	Medis IP
170	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk	Medis IP
171	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading	Medis IP
172	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Cakra Sehati	Sosial KM
173	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Mutiara Maharani	Sosial KM
174	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Pemulihan Natura Indonesia	Sosial KM
175	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Malaka Medicare Indonesia	Sosial KM
176	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Puskesmas Kecamatan Tebet	Medis IP
177	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Puskesmas Kecamatan Cilandak	Medis IP
178	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Kelima	Sosial KM
179	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Karitas Sani Madani (Karisma)	Sosial KM
180	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Madani	Sosial KM
181	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kramat Jati	Medis IP
182	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kecamatan Duren Sawit	Medis IP
183	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kecamatan Jatinegara	Medis IP
184	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	RSKD Duren Sawit	Medis IP
185	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	PKM Karanganyar Kebumen (IPWL)	Medis IP
186	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ Prof dr. Soeroso Magelang (IPWL)	Medis IP
187	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ dr. Soedjarwadi Klaten (IPWL)	Medis IP
188	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ dr. Amino Gondohutomo SMG (IPWL)	Medis IP

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>BNNP/KAB/KOTA</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>KETERANGAN</b>
189	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RS. Bhayangkara SMG (IPWL)	Medis IP
190	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	PKM Poncol (IPWL)	Medis IP
191	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	DKT Gombang Kebumen	Medis IP
192	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSUD dr. Soedirman Kebumen	Medis IP
193	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Ayodya Mandiri Jepara (IPWL)	Sosial KM
194	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	YCKB Ungaran (IPWL)	Sosial KM
195	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	At Tauhid SMG (IPWL)	Sosial KM
196	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Al Ma'la Grobogan (IPWL)	Sosial KM
197	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	YLBI Sragen (IPWL)	Sosial KM
198	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Maunatul Mubarak Demak IPWL	Sosial KM
199	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	RSUD Dr.H. Soewondo Kendal	Medis IP
200	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	RS H.A.Zaky Djunaid Pekalongan	Medis IP
201	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Klinik Utama dr.Henny Rosita Batang	Medis KM
202	Jawa Tengah	BNN Kab. Tegal	Puskesmas Tegal Timur	Medis IP
203	Jawa Tengah	BNN Kab. Tegal	Klinik Pratama Aisyiah Siti Hajar	Medis KM
204	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Klinik Panji Medika Kedungreja	Medis IP
205	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	PKU Muhammadiyah Sampang	Medis KM
206	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Puskesmas Cilacap Selatan 2	Medis IP
207	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	RSUD Banyumas	Medis IP
208	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Puskesmas Baturraden 1	Medis IP
209	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Medis IP
210	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Sentra Satria Baturraden	Sosial KM
211	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Yayasan An-Nur Haji Supono	Sosial IP
212	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	RSUD Kabupaten Temanggung	Medis IP
213	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	RS PKU Muhammadiyah Temanggung	Medis KM
214	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	RS Aisyiyah Muntilan	Medis KM
215	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Panti Rehabilitasi Betesda	Sosial IP
216	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSUD Dr.Moewardi	Medis IP
217	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSJD dr.Arif Zainudin Surakarta	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
218	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSAU dr.Siswanto Lanud Adie Soemarmo	Medis IP
219	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Anargya Sukoharjo	Sosial KM
220	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	YCKB Surakarta	Sosial KM
221	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Yayasan Hayyu Sedah Mirah	Sosial KM
222	Jawa Timur	BNNP Jatim	Klinik Ghana Prima	Medis KM
223	Jawa Timur	BNNP Jatim	Rumah Rehabilitasi Al-Hidayat	Sosial KM
224	Jawa Timur	BNNP Jatim	LRPPN BI Banyuwangi	Sosial KM
225	Jawa Timur	BNNP Jatim	Gendhug Nemu Sariro	Sosial KM
226	Jawa Timur	BNNP Jatim	KP2M Banyuwangi	Sosial KM
227	Jawa Timur	BNNP Jatim	Klinik An-Nisa Probolinggo	Sosial KM
228	Jawa Timur	BNNP Jatim	Ghana Recovery Pamekasan	Sosial KM
229	Jawa Timur	BNN Kab Malang	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	Medis IP
230	Jawa Timur	BNN Kab Malang	HMC DAU	Medis KM
231	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	RSUD Ibnu Sina Gresik	Medis IP
232	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	RS Fathma Medika Gresik	Medis KM
233	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	Rumah Rehabilitasi Supri Soli Gresik	Sosial KM
234	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	RSUD Dr. R Koesma Tuban	Medis IP
235	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	Puskesmas Tuban	Medis IP
236	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	Klinik Ar Rochma	Medis KM
237	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Rumah Merah Putih	Sosial KM
238	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba (KOBRA)	Sosial KM
239	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Sahwahita Nusantara	Sosial KM
240	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Al Kholiqi	Sosial KM
241	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Ekllesia Kediri Foundation	Sosial KM
242	Jawa Timur	BNN Kab Tulungagung	Puskesmas Bangunjaya	Medis IP
243	Jawa Timur	BNN KabTulungagung	RSUD DR Iskak	Medis IP
244	Jawa Timur	BNN Kab Tulungagung	Klinik Lapas Klas IIB Tulungagung	Medis IP
245	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Puskesmas Batu	Medis IP
246	Jawa Timur	BNN Kota Batu	RS Karsa Husada Batu	Medis IP
247	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Pondok Pemulihan Doulos Batu	Sosial KM
248	Jawa Timur	BNN Kab Lumajang	Puskesmas Klakah	Medis IP
249	Jawa Timur	BNN Kab Lumajang	Puskesmas Jatiroto	Medis IP
250	Jawa Timur	BNN Kab Pasuruan	RSUD Bangil	Medis IP
251	Jawa Timur	BNN Kab Pasuruan	RSI Masyithoh	Medis KM
252	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Puskesmas Gedongan	Medis IP
253	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	RS Kamar Medika	Medis KM

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>BNNP/KAB/KOTA</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>KETERANGAN</b>
254	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Rumah Kita Surabaya	Sosial KM
255	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Orbit Surabaya	Sosial KM
256	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Plato Foundation	Sosial KM
257	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan LRPPN- BI Surabaya	Sosial KM
258	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Rumah Merah Putih Surabaya	Sosial KM
259	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Ashefa Surabaya	Sosial KM
260	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	RSJ Menur Surabaya	Medis IP
261	Jawa Timur	BNN Kab Sumenep	Puskesmas Dasuk	Medis IP
262	Jawa Timur	BNN Kab Blitar	RSU An Nisaa	Medis KM
263	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Puskesmas Kendalsari	Medis IP
264	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Yayasan Sadar Hati	Sosial KM
265	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	RBM Kota Juang Kabupaten Melawi	Sosial KM
266	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Rumah Family Female (RFF) Kabupaten Melawi	Sosial KM
267	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Kendawang Kabupaten Ketapang	Medis IP
268	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Sandai Kabupaten Ketapang	Medis IP
269	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Air Upas Kabupaten Ketapang	Medis IP
270	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Mulia Baru Kabupaten Ketapang	Medis IP
271	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Kedondong Kabupaten Ketapang	Medis IP
272	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Ngabang Kabupaten Landak	Medis IP
273	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Selalong Kabupaten Sekadau	Medis IP
274	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Yayasan Geratak Kabupaten Sambas	Sosial KM
275	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Rumah Rahayu Kota Pontianak	Sosial KM
276	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Rumah Adiksi Indonesia (RAIN) Pontianak	Sosial KM
277	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Alhijrah Kota Pontianak	Sosial KM
278	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	RBM Bumi Khatulistiwa Kota Pontianak	Sosial KM
279	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Aliyang Kota Pontianak	Medis IP
280	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Perumnas 1 Kota Pontianak	Medis IP
281	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Purnama Kota Pontianak	Medis IP
282	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Siantan Tengah Kota Pontianak	Medis IP

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>BNNP/KAB/KOTA</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>KETERANGAN</b>
283	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Saigon Kota Pontianak	Medis IP
284	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Kampung Bangka Kota Pontianak	Medis IP
285	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Rumah Sakit Jiwa Sudyanto Kabupaten Sintang	Medis IP
286	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Yayasan Peduli Pemulihan Indonesia (YPPI), Kabupaten Kubu Raya	Sosial KM
287	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Puskesmas Sungai Durian Kab. Kubu Raya	Medis IP
288	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Singkawang Bersinar Kota Singkawang	Sosial KM
289	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Pusat Rehabilitasi Narkoba "KITA" Singkawang	Sosial KM
290	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Rumah Sakit Jiwa (Koala) Provinsi Kalimantan Barat	Medis IP
291	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Puskesmas Bengkayang Kabupaten Bengkayang	Medis IP
292	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Puskesmas Anjungan Kabupaten Mempawah	Medis IP
293	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	RSUD. Dr Rubini Kabupaten Mempawah	Medis IP
294	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Rumah Sakit Parindu Kabupaten Sanggau	Medis IP
295	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	RSUD. M.Th Djaman Kabupaten Sanggau	Medis IP
296	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Perawatan Bunyu	Medis IP
297	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Tanjung Palas	Medis IP
298	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Pimping	Medis IP
299	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Bumi Rahayu	Medis IP
300	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Sedadap Nunukan	Medis IP
301	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Malinau Kota	Medis IP
302	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Tana Lia	Medis IP
303	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Tideng Pale	Medis IP
304	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Klinik Bunyu Medika	Medis KM
305	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Yayasan Sekata (Selamatkan Anak Kita) Tarakan	Sosial KM
306	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	RSUD Dr. H. Jusuf SK Tarakan	Medis IP
307	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Klinik Polres Tarakan	Medis IP
308	Kalimantan Utara	BNN Kabupaten Nunukan	UPT Puskesmas Sanur	Medis IP
309	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda	Medis IP
310	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Puskesmas Teluk Lingga	Medis IP

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>BNNP/KAB/KOTA</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>KETERANGAN</b>
311	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Puskesmas Bontang Utara 1	Medis IP
312	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Puskesmas Baru Tengah Kota Balikpapan	Medis IP
313	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Sekata Foundation	Sosial KM
314	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	RSUD Datu Sanggul Rantau	Medis IP
315	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Puskesmas Sebamban II Tanah Bumbu	Medis IP
316	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Simpang Tanah Bumbu	Medis KM
317	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Puskesmas Bati-Bati	Medis IP
318	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Utama Mubarak	Medis KM
319	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	RSIA Mutiara Bunda	Medis KM
320	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Gambut Medika	Medis KM
321	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas 9 November	Medis IP
322	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Teluk Tiram	Medis IP
323	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Beruntung Raya	Medis IP
324	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Puskesmas Cempaka	Medis IP
325	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Rumah Sakit Mawar	Medis KM
326	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Puskesmas Tebing Tinggi	Medis IP
327	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	RSUD H. Abdul Aziz Marabahan	Medis IP
328	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Puskesmas Berangas	Medis IP
329	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Klinik Pondok Sehat Ar-Rohmah	Sosial KM
330	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Yayasan Tarbiyatul Furqon	Sosial KM
331	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	RS Ceria	Medis KM
332	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Puskesmas Pelaihari	Medis IP
333	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	RS Mulia	Medis KM
334	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Puskesmas Danau Panggang	Medis IP
335	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Puskesmas Murung Pudak	Medis IP
336	Kalimantan Selatan		Puskesmas Wirang	Medis IP
337	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSJ Kalawa Atei Palangka Raya	Medis IP
338	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Mas Amsyar Kasongan	Medis IP
339	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD dr. Murjani Sampit	Medis IP
340	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas	Medis IP
341	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Kuala Pembuang	Medis IP

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>BNNP/KAB/KOTA</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>KETERANGAN</b>
342	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Kuala Kurun	Medis IP
343	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan	RSUD Muara Teweh	Medis IP
344	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Tamiang Layang	Medis IP
345	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Lapas Narkotika Kelas Ila Kasongan	Sosial IP
346	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Yayasan Galilea Palangka Raya	Sosial KM
347	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Puskesmas Menteng	Medis IP
348	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Puskesmas Panarung	Medis IP
349	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Puskesmas Pahandut	Medis IP
350	Bali	BNNP Bali	RS Jiwa Provinsi Bali	Medis IP
351	Bali	BNNP Bali	RS Bhayangkara Polda Bali	Medis IP
352	Bali	BNNP Bali	Yayasan Sayap Tumbuh Nusantara (Satu Nusa)	Sosial KM
353	Bali	BNNP Bali	Bali Mental Health Clinic	Medis KM
354	Bali	BNNP Bali	Yayasan Bali Samsara Cabang Denpasar	Sosial KM
355	Bali	BNNP Bali	Yayasan Kasih Karunia	Sosial KM
356	Bali	BNNP Bali	Calm Rehab Bali	Sosial KM
357	Bali	BNNK Denpasar	Yayasan Anargya Sober House	Sosial KM
358	Bali	BNNK Denpasar	Yayasan Handaru Kasih Bali	Sosial KM
359	Bali	BNNK Badung	RSUD Mangusada Kab.Badung	Medis IP
360	Bali	BNNK Badung	Yayasan Pesona Sivana Bali	Sosial KM
361	Bali	BNNK Badung	Yayasan Musim Indonesia (YAMI)	Sosial KM
362	Bali	BNNK Badung	Puskesmas Kuta 1	Medis IP
363	Bali	BNNK Buleleng	Yayasan Bali Samsara Cabang Buleleng	Sosial KM
364	Bali	BNNK Karangasem	RSUD Karangasem	Medis IP
365	Bali	BNNK Gianyar	RSUD Sanjiwani Gianyar	Medis IP
366	Bali	BNNK Gianyar	RSUD Payangan Gianyar	Medis IP
367	Bali	BNNK Klungkung	RSUD Klungkung	Medis IP
368	NTB	BNNP NTB	RSJ Mutiara Sukma	Medis IP
369	NTB	BNNP NTB	Sentra Paramii	Sosial IP
370	NTB	BNNP NTB	Lembaga Rehabilitasi Gema	Sosial KM
371	NTB	BNNP NTB	Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara (Puskesmas Tanjung)	Medis IP
372	NTB	BNNK Sumbawa	RS Manambai	Medis IP
373	NTB	BNNK Sumbawa	Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (Puskesmas Moyo Hilir)	Medis IP

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>BNNP/KAB/KOTA</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>KETERANGAN</b>
374	NTB	BNNK Sumbawa Barat	Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa Barat (Puskesmas)	Medis IP
375	NTB	BNNK Bima	RSUD Bima	Medis IP
376	NTB	BNNK Bima	RSUD Dompu	Medis IP
377	NTB	BNNK Bima	Dinas Kesehatan Kab. Bima /Puskesmas Sae	Medis IP
378	NTT	BNNP NTT	Yayasan Lentera Mitra Harapan Soe	Sosial KM
379	NTT	BNNP NTT	Yayasan Warna Kasih Kupang	Sosial KM
380	NTT	BNNP NTT	RSJ Naimata Kupang	Medis IP
381	NTT	BNN Kota Kupang	UPTD Puskesmas Oepoi	Medis IP
382	NTT	BNN Kota Kupang	Klinik Utama Dewanta Mental Health Care Kupang	Sosial KM
383	NTT	BNN Kota Kupang	Klinik Kasih Bunda	Sosial KM
384	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	UPTD Puskesmas Ba'a	Medis IP
385	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	UPTD Puskesmas Korbafo	Medis IP
386	NTT	BNN Kab. Belu	UPTD Puskesmas Kota Atambua	Medis IP
387	NTT	BNN Kab. Belu	UPTD Puskesmas Haikesak	Medis IP
388	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	RSUD Mokoyurli Buol	Medis IP
389	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Klinik Agung	Medis KM
390	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	RSUD Torabelo Kab. Sigi	Medis IP
391	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Banua Vaksin Canira	Medis IP
392	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	RSU Daerah Anutapura Palu	Medis IP
393	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	R. Medical Center	Medis IP
394	Sulawesi Tengah	BNNK Morowali	UPTD Puskesmas Wosu	Medis IP
395	Sulawesi Tengah	BNNK Morowali	RSU Kolonedale	Medis IP
396	Sulawesi Tengah	BNNK Donggala	BLU Puskesmas Delatope	Medis IP
397	Sulawesi Tengah	BNNK Poso	Puskesmas Taripa	Medis IP
398	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Lapas Kelas IIA Manado	Medis/Sosial IP
399	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Lapas Kelas IIB Tondano	Medis/Sosial IP
400	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Yayasan Bunga Bakung	Sosial KM
401	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Rs. Bhayangkara Tingkat III Manado	Medis IP
402	Sulawesi Utara	BNNK Bolaang Mongondow	Puskesmas Inobonto Bolaang Mongondow	Medis IP
403	Sulawesi Utara	BNNK Bitung	Puskesmas Bitung Barat	Medis IP
404	Sulawesi Utara	BNNK Manado	Rs. Bhayangkara Tingkat III Manado	Medis IP
405	Sulawesi Utara	BNNK Manado	Yayasan Batamang Plus	Sosial KM
406	Sulawesi Utara	BNNK Manado	RBM Sahabat Sehati	Sosial KM
407	Sulawesi Utara	BNNK Sangihe	Puskesmas Tahuna Barat	Medis IP
408	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	RSD Konawe Selatan	Medis IP
409	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	BLUD RSU Bombana	Medis IP

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>BNNP/KAB/KOTA</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>KETERANGAN</b>
410	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	RSUD Kolaka Timur	Medis IP
411	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Puskesmas Lepo-Lepo	Medis IP
412	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Puskesmas Kandai	Medis IP
413	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	Sosial IP
414	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Lapas Kelas II A Kendari	Sosial IP
415	Sulawesi Tenggara	BNNK Kendari	Puskesmas Mokoau	Medis IP
416	Sulawesi Tenggara	BNNK Kendari	Puskesmas Poasia	Medis IP
417	Sulawesi Tenggara	BNNK Muna	Puskesmas Laende	Medis IP
418	Sulawesi Tenggara	BNNK Muna	BLU Klinik Pemasayarakatan Rutan Raha	Sosial IP
419	Sulawesi Tenggara	BNNK Kolaka	Puskesmas Wundulako	Medis IP
420	Sulawesi Tenggara	BNNK Kolaka	Puskesmas Pomalaa	Medis IP
421	Sulawesi Tenggara	BNNK Baubau	RSUD Kota Baubau	Medis IP
422	Sulawesi Tenggara	BNNK Baubau	Lapas Kelas II A Baubau	Sosial IP
423	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Rumah Sakit Khusus Daerah Prov. Sulsel	Rajal Medis
424	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	RSUD Sayang Rakyat Prov. Sulsel	Ranap Medis
425	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Tamalate, Kota Makagsar	Rajal Medis
426	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Kanjilo Kab. Gowa	Rajal Medis
427	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Lawawol Kab. Sidrap	Rajal Medis
428	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Yayasan Mitra Husada Sulawesi Selatan	Rajal Sosial
429	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Klinik Transit Maros	Rajal Medis
430	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Yayasan Prana Waksara Nusantara	Rajal Sosial
431	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	RSUD Sawerigading, Kota Palopo	Rajal Medis
432	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	Puskesmas Wara Utara, Kota Palopo	Rajal Medis
433	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	RS Mujaisyah Kota Palopo	Rajal Medis
434	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	Lembaga Rehab Hati Kota Palopo	Rajal Sosial

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>BNNP/KAB/KOTA</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>KETERANGAN</b>
435	Sulawesi Selatan	BNNK Tana Toraja	Puskesmas Tallunglipu, Kab. Tana Toraja	Rajal Medis
436	Sulawesi Selatan	BNNK Tana Toraja	Yayasan Pemulihan Bethesda Kab.Tana Toraja	Ranap Sosial
437	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	RSUD Tenlawaru, Kab. Bone	RaJal Medis
438	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	Puskesmas Watampone, Kab. Bone	RaJal Medis
439	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	Lembaga FP2AI Kab. Bone	Rajal Sosial
440	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Majene	Medis IP
441	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Durikumba	Medis IP
442	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Pangale	Medis IP
443	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Mapilli	Medis IP
444	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Mamuju Tengah	Medis IP
445	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Pasangkayu	Medis IP
446	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Pelitakan	Medis IP
447	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Katumbangan	Medis IP
448	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Sarjo	Medis IP
449	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Mamuju	Medis IP
450	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Wonomulyo	Medis IP
451	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Polewali Mandar	Medis IP
452	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Sendana I	Medis IP
453	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Rangsas	Medis IP
454	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Lariang	Medis IP
455	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Binanga	Medis IP
456	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Bhayangkara	Medis IP
457	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Bambu	Medis IP
458	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Yayasan Mandar Indonesia	Sosial KM
459	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Elly Uyo	Medis IP
460	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Hamadi	Medis IP
461	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Koya Barat	Medis IP
462	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Abepura	Medis IP
463	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Waena	Medis IP
464	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Tanjung Ria	Medis IP
465	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Abe Pantai	Medis IP
466	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Jayapura Utara	Medis IP
467	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Hebeybhulu Yoka	Medis IP
468	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Imbi	Medis IP
469	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Kotaraja	Medis IP
470	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Twano	Medis IP
471	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Skouw	Medis IP
472	Papua	BNNP Papua	Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura	Medis/Sosial IP
473	Papua	BNNP Papua	RSUD Kwaingga	Medis IP
474	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Ywan	Medis IP
475	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Arso III	Medis IP
476	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Arso Kota	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
477	Papua	BNNP Papua	IPWL Yayasan Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Papua- Papua Barat (YP2MP)	Sosial KM
478	Papua	BNNP Papua	Polres Merauke Polda Papua	Medis IP
479	Papua	BNNP Papua	Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura	Medis/Sosial IP
480	Papua	BNN Kab. Jayapura	Puskesmas Sentani	Medis IP
481	Papua	BNN Kab. Jayapura	Puskesmas Harapan	Medis IP
482	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Timika Jaya	Medis IP
483	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Wania	Medis IP
484	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Timika	Medis IP
485	Papua	BNN Kab. Mimika	RSUD Mimika	Medis IP
486	Papua	BNN Kab. Mimika	Klinik Puri Husada	Medis KM
487	Papua	BNN Kab. Mimika	RS Mitra Masyarakat	Medis KM
488	Papua Barat	BNNP Papua Barat	RSAL dr.Azhar Zahir	Medis IP
489	Papua Barat	BNNP Papua Barat	RS Tingkat IV J.A Dimara	Medis IP

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 23 Januari 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL





**BNN KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KEDIRI**

**NOMOR : KEP/10/III/KA/RH.01/2024/BNNK**

**TENTANG  
PENETAPAN LOKASI INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)  
TERBENTUK  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KEDIRI**

- Menimbang
- a. Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap Rehabilitasi Pecandu dan/ atau Korban Penyalahguna Narkotika di kelurahan;
  - b. IBM akan merekrut Agen Pemulihan yang nantinya bertugas melaksanakan Layanan Rehabilitasi terhadap Pecandu dan/ atau Korban Penyalahguna Narkotika di Kelurahan IBM wilayah kerja Badan Narkotika Nasional Kota Kediri;
  - c. Agen Pemulihan (AP) yang direkrut nantinya harus mampu dan cakap untuk melaksanakan Layanan Rehabilitasi di Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, kemudian perlunya dibuat surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kediri.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020- 2024;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;

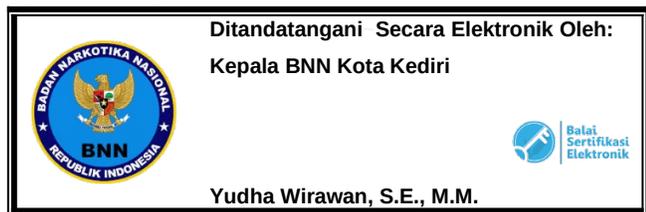
/7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, tentang Penetapan Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Terbentuk Tahun 2024;
- Kesatu : Menetapkan Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel Kota Kediri sebagai Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Terbentuk untuk Kota Kediri pada tahun 2024;
- Kedua : Penetapan lokasi Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel Kota Kediri ini dimaksud dalam Diktum Kesatu nantinya akan melaksanakan Layanan Rehabilitasi di Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);
- Ketiga : Dalam Pelaksanaan Program IBM Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Ngampel Kota Kediri tetap berkoordinasi dengan Seksi Rehabilitasi BNN Kota Kediri;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri  
pada tanggal : 01 Maret 2024





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4244/XII/DE/RH.02.03/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 9 (sembilan) berkas  
Perihal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi  
Operasionalisasi Unit IBM TA. 2024

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi Seluruh Indonesia**  
**2. Para Kepala BNN Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama TA. 2024;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua TA. 2024;
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/909/VIII/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Ketiga TA. 2024;
- h. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) terhadap 418 unit IBM pada bulan Desember 2024. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi capaian program, faktor pendukung serta penghambat implementasi program IBM sebagai dasar dalam menentukan kebijakan di tahun anggaran 2025.

3. Hasil evaluasi operasionalisasi unit IBM sebagai berikut (data terlampir):

**a. Capaian fase perkembangan unit IBM**

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota serta telaah bukti dukung pelaksanaan tata kelola, kegiatan dan layanan IBM, diperoleh capaian fase perkembangan unit IBM sebagai berikut:

- Sebanyak 99 unit IBM (23,68%) memenuhi indikator fase Prima
- Sebanyak 221 unit IBM (52,97%) memenuhi indikator fase Tangguh
- Sebanyak 49 unit IBM (11,72%) memenuhi indikator fase Berkembang
- Sebanyak 32 unit IBM (7,66%) memenuhi indikator fase Tumbuh
- Sebanyak 15 unit IBM (3,59%) memenuhi indikator fase Rintisan
- Sebanyak 2 unit (0,48%) belum memenuhi indikator fase perkembangan sehingga berada dalam kategori Pra Fase

Berdasarkan capaian fase perkembangan tersebut, unit IBM yang telah operasional adalah 401 unit (95,93%). Unit IBM disebut operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh, dimana seluruh sub komponen Tata Kelola telah terpenuhi, Agen Pemulihan (AP) telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan), serta AP telah dapat menemu kenali dan berhasil menjangkau klien untuk dilakukan skrining dengan menggunakan formulir DAST-10 (*Drug Abuse Screening Test*) untuk selanjutnya kemudian klien diberikan layanan intervensi hingga bina lanjut.

**b. Gambaran kegiatan IBM**

Kegiatan IBM adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh AP di luar kegiatan layanan pemulihan, meliputi sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan. Idealnya, kegiatan IBM dilakukan pada awal program dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga masing-masing pihak dapat saling memahami manfaat dan memberikan kontribusi dalam memajukan program IBM. AP dalam melakukan kegiatan IBM senantiasa memerlukan pendampingan intensif dari petugas BNNP & BNNK/ Kota. Dari hasil evaluasi di Tahun 2024 ini AP telah melakukan sosialisasi IBM sebanyak 3.277 kali kepada 73.749 audiens, pemetaan 1.330 kali, dan penjangkauan dilakukan kepada 3.073 orang.

**c. Gambaran layanan IBM**

Layanan intervensi IBM adalah rangkaian kegiatan yang diberikan oleh AP kepada klien IBM mulai dari skrining, penerimaan awal, layanan intervensi wajib dan pilihan serta layanan bina lanjut. Layanan IBM diberikan oleh AP kepada klien tidak terlepas dari pembinaan dan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota secara komprehensif serta keterlibatan keluarga dan/ atau orang terdekat dalam upaya pemulihan dan pemantauan terhadap klien. Pada Tahun 2024 tercatat keterlibatan anggota keluarga/ orang terdekat dalam layanan IBM sejumlah 1.819 orang yang terdiri dari orang tua, kakak, adik, suami/ istri, paman/ bibi atau guru sebagai wali murid di sekolah, walaupun terdapat beberapa klien IBM yang memilih untuk tidak melibatkan keluarga dengan alasan takut, malu, ataupun berdomisili jauh dari keluarga.

**d. Gambaran profil klien IBM**

Jumlah klien IBM yang mengikuti layanan pada tahun 2024 sebanyak 2.310 orang dengan profil berikut:

- Mayoritas klien merupakan hasil penjangkauan AP yaitu 98,40% (2.273 orang)
- Sebanyak 93,90% (2.169 orang) klien berjenis kelamin laki-laki, dan kebanyakan dalam kelompok usia 17-25 tahun (38,01%) dan 26-35 tahun (26,36%)

- Pendidikan terakhir klien mayoritas adalah SMA/ sederajat (53,12%), mayoritas bekerja sebagai buruh/ petani/ nelayan/ pekebun (35,19%) dan pelajar/ mahasiswa (25,19%)
- Jenis zat yang paling banyak disalahgunakan adalah shabu (34,88%), sedatif/ hipnotik (9,71%) dan kanabis (8,70%)

**e. Gambaran Agen Pemulihan**

Agen Pemulihan (AP) merupakan anggota masyarakat yang tinggal di desa/ kelurahan yang dipilih oleh Kepala Desa/ Lurah untuk melaksanakan kegiatan dan layanan IBM setelah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja BNN. AP yang ditunjuk biasanya merupakan orang-orang yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan desa/ kelurahan, sehingga telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Jumlah AP pada tahun 2024 ini terlapor sebanyak 2.210 orang, dengan berbagai latar belakang unsur masyarakat yang berbeda-beda, mayoritas adalah laki-laki dan berasal dari unsur tokoh masyarakat (29,50%).

**f. Gambaran pendanaan mandiri untuk IBM**

Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 115 unit IBM (27,51%) telah memperoleh pendanaan mandiri untuk operasional unit IBM serta pelaksanaan kegiatan & layanan. Pendanaan mandiri ini merupakan hasil sosialisasi, koordinasi dan advokasi yang dilakukan oleh AP dengan pendampingan serta pembinaan penuh petugas BNNP & BNNK/Kota. Dukungan dana diperoleh dari desa, kelurahan, OPD, iuran/ sumbangan/ donasi, dan/ atau CSR dengan rentang nilai mulai dari Rp 875.000,- sampai dengan Rp 172.133.000,-.

**g. Hasil survey kebermanfaatan program IBM terhadap lingkungan & Masyarakat**

Dalam rangka mengetahui dampak kegiatan IBM serta kebermanfaatannya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat melalui petugas BNNP & BNNK/Kota melakukan survey berupa penyebaran pengisian kuesioner dengan menggunakan skala *likert* pemberian skor 0-4.

survey di lakukan terhadap 4.111 orang responden yang merupakan anggota masyarakat non AP di wilayah desa/ kelurahan. Mayoritas responden berada dalam kelompok usia 36-45 tahun (27,66%), merupakan warga masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi IBM (72,39%). Berdasarkan hasil survey yang telah di lakukan tercatat bahwa mayoritas responden (92,36%) telah mengetahui keberadaan IBM di wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, dari pertanyaan 1-6 dalam survey diperoleh skor rata-rata 4 dari total pemberian skor 0-4 yang berarti bahwa IBM dapat memberikan dampak sangat positif dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah desa/ kelurahan dalam hal penanganan penyalah guna narkoba.

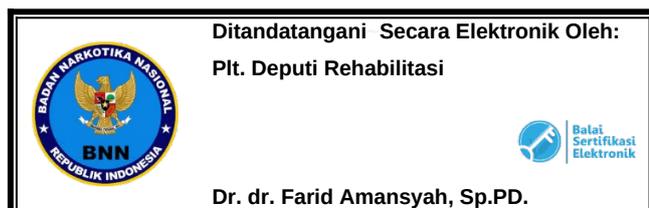
#### **h. Identifikasi faktor pendukung & penghambat implementasi program IBM**

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat faktor pendukung keberhasilan program IBM yang harus ditingkatkan, dan faktor penghambat yang harus ditindaklanjuti agar dapat diatasi. beberapa faktor pendukung & faktor penghambat yang dikategorikan sesuai dengan pelaksana program IBM, diantaranya adalah:

- Petugas pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota
- Agen Pemulihan (AP)
- Kepala Desa/ Lurah

4. Berdasarkan butir tiga di atas, bersama ini kami sampaikan apresiasi kepada bidang Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota atas implementasi program IBM tahun 2024. Diharapkan kinerja pada tahun 2024 dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap tim Agen Pemulihan (AP) di IBM dapat ditingkatkan, sehingga tujuan IBM yakni peningkatan akses layanan rehabilitasi hingga ke tingkat desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

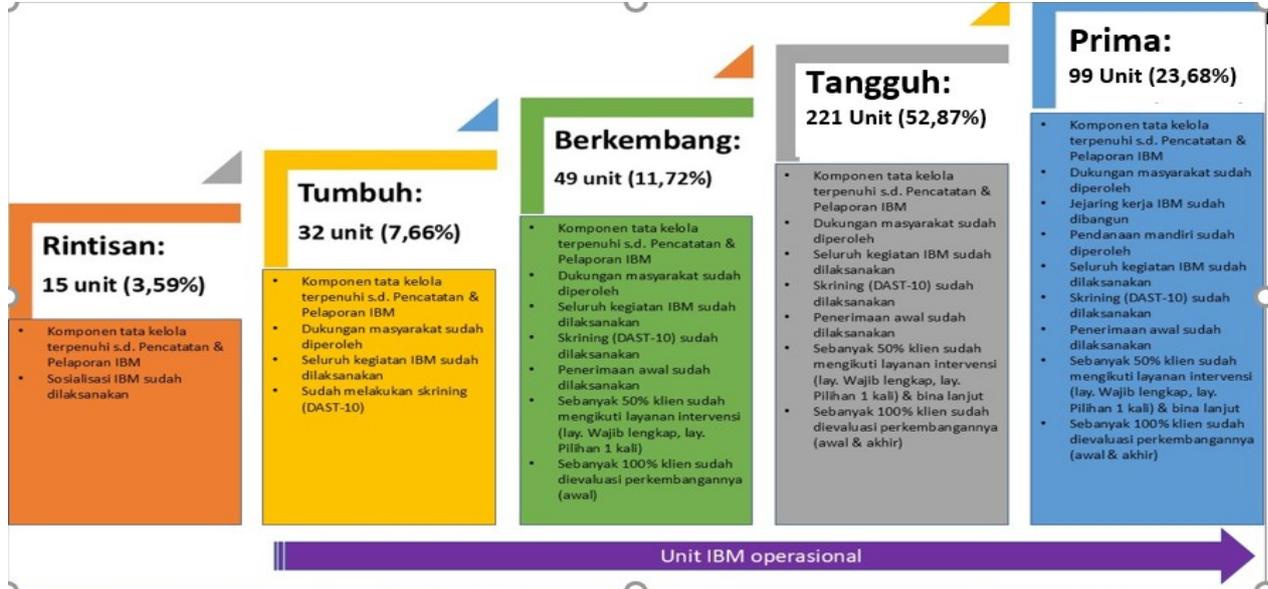
5. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN

**FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM BINAAN BNNP & BNNK/ KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2024**



No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
<b>Prima (99 unit)</b>					
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Balee Me	Kuta Blang	Kabupaten Bireuen
2	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Juli Paseh	Juli	Kabupaten Bireuen
3	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Cot Girek Kandang	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Paya Punteuet	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
5	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Perdamaian	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Kota Lintang	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Mamplam	Simpang Tiga	Kabupaten Pidie
8	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Anoe Itam	Sukajaya	Kota Sabang
9	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Keuneukai	Sukamakmue	Kota Sabang
10	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Sekip	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
11	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Paya Perupuk	Tanjung Pura	Kabupaten Langkat
12	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perlis	Berandan Barat	Kabupaten Langkat
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Meranti	Meranti	Kabupaten Asahan
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Sei Alim	Sei Dadap	Kabupaten

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Hasak		Asahan
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Barbaran Jae	Panyabungan Barat	Kabupaten Mandailing Natal
16	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Sei Rejo	Sei Rampah	Kabupaten Serdang Bedagai
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Dolok Manampang	Dolok Masihul	Kabupaten Serdang Bedagai
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Buntu Turunan	Hatonduhan	Kabupaten Simalungun
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Kwala Gunung	Datuk Lima Puluh	Kabupaten Batu Bara
20	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Desa Balai Naras	Pariaman Utara	Kota Pariaman
21	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Desa Tanjung Telang	Prabumulih Barat	Kota Prabumulih
22	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Sidoarjo	Umpu Semenguk	Kabupaten Way Kanan
23	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Bukit Besar	Girimaya	Kota Pangkalpinang
24	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Asam	Rangkui	Kota Pangkalpinang
25	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pagarawan	Merawang	Kabupaten Bangka
26	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Timur	Singaran Pati	Kota Bengkulu
27	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Bintaro	Pesanggrahan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
28	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan	Penjaringan	Kota Administrasi Jakarta Utara
29	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Semper Barat	Cilincing	Kota Administrasi Jakarta Utara
30	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipanas	Cipanas	Kabupaten Cianjur
31	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipetir	Cibeber	Kabupaten Cianjur
32	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Pagelaran	Ciomas	Kabupaten Bogor
33	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Jabon Mekar	Parung	Kabupaten Bogor
34	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Cinta Asih	Samarang	Kabupaten Garut
35	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Sukaratu	Banyuresmi	Kabupaten Garut
36	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Mekarjaya	Baregbeg	Kabupaten Ciamis
37	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Pasirtamiang	Cihaurbeuti	Kabupaten Ciamis
38	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Kahiyangan	Pancalang	Kabupaten Kuningan

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
39	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Tempuran	Tempuran	Kabupaten Karawang
40	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Muara	Cilamaya Wetan	Kabupaten Karawang
41	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Gayamsari	Gayamsari	Kota Semarang
42	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Bansari	Bansari	Kabupaten Temanggung
43	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Gununggempol	Jumo	Kabupaten Temanggung
44	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Bulurejo	Mertoyudan	Kabupaten Magelang
45	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Ringinarum	Ringinarum	Kabupaten Kendal
46	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Kalitinggar	Padamara	Kabupaten Purbalingga
47	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Panican	Kemangkon	Kabupaten Purbalingga
48	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Lawangaji	Kandeman	Kabupaten Batang
49	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Jeruklegi Kulon	Jeruklegi	Kabupaten Cilacap
50	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Kebanggan	Sumbang	Kabupaten Banyumas
51	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Ledug	Kembaran	Kabupaten Banyumas
52	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Giripurwo	Girimulyo	Kabupaten Kulon Progo
53	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Cerme	Panjatan	Kabupaten Kulon Progo
54	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Giwangan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
55	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan	Mergangsan	Kota Yogyakarta
56	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Sinduharjo	Ngaglik	Kabupaten Sleman
57	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Sinduadi	Mlati	Kabupaten Sleman
58	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Potorono	Banguntapan	Kabupaten Bantul
59	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Bangunharjo	Sewon	Kabupaten Bantul
60	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Made	Lamongan	Kabupaten Lamongan
61	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Cerme Lor	Cerme	Kabupaten Gresik
62	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Glindah	Kedamean	Kabupaten Gresik
63	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Wates	Magersari	Kota Mojokerto
64	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Meri	Kranggan	Kota Mojokerto

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
65	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Karangsono	Kanigoro	Kabupaten Blitar
66	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Sumberasri	Nglegok	Kabupaten Blitar
67	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Kelurahan Temas	Batu	Kota Batu
68	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Junrejo	Junrejo	Kota Batu
69	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Kingking	Tuban	Kabupaten Tuban
70	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Wedoro	Waru	Kabupaten Sidoarjo
71	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Medaeng	Waru	Kabupaten Sidoarjo
72	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Pogalan	Pogalan	Kabupaten Trenggalek
73	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kedungdowo	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
74	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kwagean	Loceret	Kabupaten Nganjuk
75	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Dandangan	Kota	Kota Kediri
76	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Gadang	Sukun	Kota Malang
77	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Bandungrejosari	Sukun	Kota Malang
78	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Paron	Ngasem	Kabupaten Kediri
79	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Gadungan	Puncu	Kabupaten Kediri
80	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Karah	Kecamatan Jambangan	Kota Surabaya
81	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Wonorejo	Kecamatan Rungkut	Kota Surabaya
82	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Tengah	Pontianak Kota	Kota Pontianak
83	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Arang Limbung	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
84	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Mantimin	Batu Mandi	Kabupaten Balangan
85	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Kampung 6	Tarakan Timur	Kota Tarakan
86	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Karang Rejo	Tarakan Barat	Kota Tarakan
87	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Air Hitam	Samarinda Ulu	Kota Samarinda
88	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Lelipang	Tamako	Kabupaten Kepulauan Sangihe
89	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kabobona	Dolo	Kabupaten Sigi
90	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kotarindau	Dolo	Kabupaten Sigi
91	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan	Palu Utara	Kota Palu

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Mamboro Barat		
92	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Towale	Banawa Tengah	Kabupaten Donggala
93	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Dondo	Banawa	Kabupaten Donggala
94	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Patemon	Seririt	Kabupaten Buleleng
95	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Lokapaksa	Seririt	Kabupaten Buleleng
96	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara	Kota Denpasar
97	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sumerta Kelod	Denpasar Timur	Kota Denpasar
98	NTB	BNNP NTB	Desa Tanjung	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara
99	NTB	BNNP NTB	Desa Medana	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara
<b>Tangguh (221 unit)</b>					
1	Aceh	BNNP ACEH	Kelurahan Meunasah Baktrieng	Krueng Barona Jaya	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNNP ACEH	Gampong Meureu Baro	Indrapuri	Kabupaten Aceh Besar
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Peulanggahan	Kuta Raja	Kota Banda Aceh
4	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Mesjid Tuha	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
5	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Meunasah Lhok	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
6	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Dayah Caleue	Indra Jaya	Kabupaten Pidie
7	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Sukarejo	Langsa Timur	Kota Langsa
8	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Pondok Pabrik	Langsa Lama	Kota Langsa
9	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Lhok Sialang Rayeuk	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
10	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Kampung Bukit	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
11	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Desa Kutelintang	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
12	Sumatera Utara	BNNP SUMATERA UTARA	Kelurahan Tanjung Mulia	Medan Deli	Kota Medan
13	Sumatera Utara	BNNP SUMATERA UTARA	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Medan Deli	Kota Medan
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Kubu Simbelang	Tiga Panah	Kabupaten Karo
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Doulu	Berastagi	Kabupaten Karo
16	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Berngam	Binjai Kota	Kota Binjai

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
17	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Rambung Dalam	Binjai Selatan	Kota Binjai
18	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Selat Tanjung Medan	Datuk Bandar Timur	Kota Tanjungbalai
19	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Tanjungbalai Kota IV	Tanjungbalai Utara	Kota Tanjungbalai
20	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Lasara Bahili	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
21	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Sisobahili Tabaloho	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
22	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Pagar Jati	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
23	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Bane	Siantar Utara	Kota Pematangsiantar
24	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Sukaraja	Siantar Marihat	Kota Pematangsiantar
25	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Kelurahan Pidoli Dolok	Panyabungan	Kabupaten Mandailing Natal
26	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Huta Tonga	Angkola Muara Tais	Kabupaten Tapanuli Selatan
27	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Sigalangan	Batang Angkola	Kabupaten Tapanuli Selatan
28	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Damar Sari	Padang Hilir	Kota Tebing Tinggi
29	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Persiakan	Padang Hulu	Kota Tebing Tinggi
30	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Tanjung Pasir	Tanah Jawa	Kabupaten Simalungun
31	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Damuli Kebun	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
32	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Tanjung Pasir	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
33	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Kelurahan Limau Manis	Pauh	Kota Padang
34	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Muara Panas	Bukit Sundi	Kabupaten Solok
35	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Kinari	Bukit Sundi	Kabupaten Solok
36	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Santur	Barangin	Kota Sawahlunto
37	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Salak	Talawi	Kota Sawahlunto
38	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
39	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Bancah Kariang	Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
40	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Mahakarya	Luhak Nan Duo	Kabupaten Pasaman Barat
41	Riau	BNNP RIAU	Kelurahan Kandis	Kandis	Kabupaten Siak

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Kota		
42	Riau	BNNP RIAU	Kelurahan Bagan Hulu	Bangko	Kabupaten Rokan Hilir
43	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Tebing Tinggi	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
44	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Simandolak	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
45	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Simpang Beringin	Bandar Sei Kijang	Kabupaten Pelalawan
46	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Mekar Jaya	Pangkalan Kerinci	Kabupaten Pelalawan
47	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Kampung Baru	Senapelan	Kota Pekanbaru
48	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Bencah Lesung	Tenayan Raya	Kota Pekanbaru
49	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Bukit Timah	Dumai Selatan	Kota Dumai
50	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Pangkalan Sesai	Dumai Barat	Kota Dumai
51	Jambi	BNNP JAMBI	Desa Talang Belido	Sungai Gelam	Kabupaten Muaro Jambi
52	Jambi	BNNP JAMBI	Desa Danau Kedap	Maro Sebo	Kabupaten Muaro Jambi
53	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Sidomukti	Dendang	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
54	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Teluk Majelis	Kuala Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
55	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Kenali Asam Bawah	Kota Baru	Kota Jambi
56	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Sungai Asam	Pasar Jambi	Kota Jambi
57	Jambi	BNN Kab Batanghari	Desa Terusan	Maro Sebo Ilir	Kabupaten Batanghari
58	Jambi	BNN Kab Batanghari	Desa Pematang V Suku	Muara Tembesi	Kabupaten Batanghari
59	Sumatera Selatan	BNNP SUMATERA SELATAN	Desa Teluk	Lais	Kabupaten Musi Banyuasin
60	Sumatera Selatan	BNN Provinsi Sumatera Selatan	Desa Gasing	Talang Kelapa	Banyuasin
61	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Watervang	Lubuklinggau Timur I	Kota Lubuklinggau
62	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Batu Jungul	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
63	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Kelurahan Pasar Prabumulih II	Prabumulih Utara	Kota Prabumulih
64	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Muara Gula Baru	Ujan Mas	Kabupaten Muara Enim
65	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Lubuk Empelas	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
66	Lampung	BNNP LAMPUNG	Desa Jatimulyo	Jati Agung	Kabupaten Lampung

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Selatan
67	Lampung	BNNP LAMPUNG	Desa Kibang	Metro Kibang	Kabupaten Lampung Timur
68	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Tegal Binangun	Sumberejo	Kabupaten Tanggamus
69	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Kecapi	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan
70	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Tetaan	Penengahan	Kabupaten Lampung Selatan
71	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Yosomulyo	Metro Pusat	Kota Metro
72	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Margorejo	Metro Selatan	Kota Metro
73	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Mataram Baru	Mataram Baru	Kabupaten Lampung Timur
74	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Sri Menanti	Bandar Sri Bhawono	Kabupaten Lampung Timur
75	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Cugah	Baradatu	Kabupaten Way Kanan
76	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Rebo	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
77	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Air Saga	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
78	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Aik Rayak	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
79	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Kelurahan Toboali	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
80	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Sadai	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan
81	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Kelurahan Sungai Langkai	Kecamatan Sagulung	Kota Batam
82	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Tanjung Uncang	Batu Aji	Kota Batam
83	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Buliang	Batu Aji	Kota Batam
84	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Air Raja	Tanjung Pinang Timur	Kota Tanjung Pinang
85	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Kampung Baru	Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang
86	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Sawang Laut	Kundur Barat	Kabupaten Karimun
87	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Tanjung Berlian Barat	Kundur Utara	Kabupaten Karimun
88	Bengkulu	BNNP BENGKULU	Kelurahan Kandang	Kampung Melayu	Kota Bengkulu
89	Bengkulu	BNNP BENGKULU	Kelurahan Lempuing	Ratu Agung	Kota Bengkulu
90	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Barat	Gading Cempaka	Kota Bengkulu
91	DKI Jakarta	BNNP DKI JAKARTA	Kelurahan Kota Bambu Selatan	Palmerah	Kota Administrasi

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Jakarta Barat
92	DKI Jakarta	BNNP DKI JAKARTA	Kelurahan Petamburan	Tanah Abang	Kota Administrasi Jakarta Pusat
93	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	Kebayoran Lama	Kota Administrasi Jakarta Selatan
94	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang	Pulo Gadung	Kota Administrasi Jakarta Timur
95	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Ciracas	Ciracas	Kota Administrasi Jakarta Timur
96	Banten	BNNP BANTEN	Desa Baros	Baros	Kabupaten Serang
97	Banten	BNNP BANTEN	Kelurahan Banten	Kasemen	Kota Serang
98	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Jombang	Ciputat	Kota Tangerang Selatan
99	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Bendungan	Cilegon	Kota Cilegon
100	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Tamanbaru	Citangkil	Kota Cilegon
101	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Tanah Tinggi	Tangerang	Kota Tangerang
102	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Cipondoh Makmur	Cipondoh	Kota Tangerang
103	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Sukatani	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
104	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Sukajaya	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
105	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Pangandaran	Pangandaran	Kabupaten Pangandaran
106	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kebon Jayanti	Kiaracondong	Kota Bandung
107	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kacapiring	Batununggal	Kota Bandung
108	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Cibabat	Cimahi Utara	Kota Cimahi
109	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Melong	Cimahi Selatan	Kota Cimahi
110	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Cipada	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung Barat
111	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Batujajar Barat	Batujajar	Kabupaten Bandung Barat
112	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Loji	Simpenan	Kabupaten Sukabumi
113	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Pasirsuren	Palabuhanratu	Kabupaten Sukabumi
114	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Cisolak Pasar	Cimanggis	Kota Depok
115	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Pondok	Beji	Kota Depok

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Cina		
116	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Sukamanah	Cipedes	Kota Tasikmalaya
117	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Cipedes	Cipedes	Kota Tasikmalaya
118	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Pagundan	Lebakwangi	Kabupaten Kuningan
119	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Sunyaragi	Kecamatan Kesambi	Kota Cirebon
120	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Kebonbaru	Kejaksan	Kota Cirebon
121	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Tlogosari Kulon	Pedurungan	Kota Semarang
122	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Pajang	Laweyan	Kota Surakarta
123	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Mojosongo	Jebres	Kota Surakarta
124	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Tegalrejo	Tegalrejo	Kabupaten Magelang
125	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Plantaran	Kaliwungu Selatan	Kabupaten Kendal
126	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kemandungan	Tegal Barat	Kota Tegal
127	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kejambon	Tegal Timur	Kota Tegal
128	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Kalipucang Kulon	Batang	Kabupaten Batang
129	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Tegalkamulyan	Cilacap Selatan	Kabupaten Cilacap
130	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Randubango	Mojosari	Kabupaten Mojokerto
131	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Gedongombo	Semanding	Kabupaten Tuban
132	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Mlinjon	Suruh	Kabupaten Trenggalek
133	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Desa Pandanarum	Tempeh	Kabupaten Lumajang
134	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Tompokersan	Lumajang	Kabupaten Lumajang
135	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Kelurahan Jepun	Tulungagung	Kabupaten Tulungagung
136	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Kedungwaru	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung
137	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Lecari	Sukorejo	Kabupaten Pasuruan
138	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Sumber Suko	Gempol	Kabupaten Pasuruan
139	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Sepanjang	Gondanglegi	Kabupaten Malang
140	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Landungsari	Dau	Kabupaten Malang
141	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Aengbaja Kenek	Bluto	Kabupaten Sumenep

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
142	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Bumbungan	Bluto	Kabupaten Sumenep
143	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Kalimook	Kalianget	Sumenep
144	Kalimantan Barat	BNNP KALIMANTAN BARAT	Desa Hilir Kantor	Ngabang	Kabupaten Landak
145	Kalimantan Barat	BNNP KALIMANTAN BARAT	Kelurahan Suka Harja	Delta Pawan	Kabupaten Ketapang
146	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Parit Mayor	Pontianak Timur	Kota Pontianak
147	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Rengas	Sungai Kakap	Kabupaten Kubu Raya
148	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Galang	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
149	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Kelurahan Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
150	Kalimantan Tengah	BNNP KALIMANTAN TENGAH	Kelurahan Baamang Barat	Baamang	Kabupaten Kotawaringin Timur
151	Kalimantan Tengah	BNNP KALIMANTAN TENGAH	Kelurahan Pahandut Seberang	Pahandut	Kota Palangka Raya
152	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Bukit Tunggul	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
153	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Banturung	Bukit Batu	Kota Palangka Raya
154	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Mendawai	Arut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat
155	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Candi	Kumai	Kabupaten Kotawaringin Barat
156	Kalimantan Selatan	BNNP KALIMANTAN SELATAN	Kelurahan Alalak Tengah	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
157	Kalimantan Selatan	BNNP KALIMANTAN SELATAN	Kelurahan Kelayan Luar	Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin
158	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Alalak Selatan	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
159	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Timur	Landasan Ulin	Kota Banjarbaru
160	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	Liang Anggang	Kota Banjarbaru
161	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Inan	Paringin Selatan	Kabupaten Balangan
162	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Batik	Bakumpai	Kabupaten Barito Kuala
163	Kalimantan	BNN Kab. Barito	Desa Sungai Lirik	Bakumpai	Kabupaten

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
	Selatan	Kuala			Barito Kuala
164	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Kelurahan Pelaihari	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
165	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Desa Nusa Indah	Bati-Bati	Kabupaten Tanah Laut
166	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Lok Suga	Haur Gading	Kabupaten Hulu Sungai Utara
167	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Pakacangan	Amuntai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara
168	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Mangkupum	Muara Uya	Kabupaten Tabalong
169	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Karang Mumus	Samarinda Kota	Kota Samarinda
170	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margasari	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan
171	Kalimantan Utara	BNNP KALIMANTAN UTARA	Desa Jelarai Selor	Tanjung Selor	Kabupaten Bulungan
172	Kalimantan Utara	BNNP KALIMANTAN UTARA	Kelurahan Juata Permai	Tarakan Utara	Kota Tarakan
173	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Sanur	Tulin Onsoi	Kabupaten Nunukan
174	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Harapan	Sebuku	Kabupaten Nunukan
175	Sulawesi Utara	BNNP SULAWESI UTARA	Kelurahan Perkamil	Paal Dua	Kota Manado
176	Sulawesi Utara	BNNP SULAWESI UTARA	Kelurahan Airmadidi Atas	Airmadidi	Kabupaten Minahasa Utara
177	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Kelurahan Inobonto	Bolaang	Kabupaten Bolaang Mongondow
178	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Desa Dondomon	Dumoga Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow
179	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Girian Indah	Girian	Kota Bitung
180	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Manembo-Nembo	Matuari	Kota Bitung
181	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Kleak	Malalayang	Kota Manado
182	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Karame	Singkil	Kota Manado
183	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Kendahe Satu	Kendahe	Kabupaten Kepulauan Sangihe
184	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Taipa	Palu Utara	Kota Palu
185	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Kelurahan Dondo Barat	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una
186	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Desa Labuan	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
187	Sulawesi Selatan	BNNP SULAWESI SELATAN	Desa Tenrigangkae	Mandai	Kabupaten Maros
188	Sulawesi Selatan	BNNP SULAWESI SELATAN	Desa Panakkukang	Pallangga	Kabupaten Gowa
189	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pakkasalo	Sibulue	Kabupaten Watampone
190	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pattiro Riolo	Sibulue	Kabupaten Watampone
191	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Amassangan	Wara	Kota Palopo
192	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Luminda	Wara Utara	Kota Palopo
193	Sulawesi Tenggara	BNNP SULAWESI TENGGARA	Desa Andadowi	Sampara	Kabupaten Konawe
194	Sulawesi Tenggara	BNNP SULAWESI TENGGARA	Desa Tanggobu	Morosi	Kabupaten Konawe
195	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Konawehea	Samaturu	Kabupaten Kolaka
196	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Ulu Konawehea	Samaturu	Kabupaten Kolaka
197	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Wua-Wua	Wua-Wua	Kota Kendari
198	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Bau Bau	Kelurahan Kadolomoko	Kokalukuna	Kota Baubau
199	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Bau Bau	Kelurahan Kadolokatapi	Wolio	Kota Baubau
200	Sulawesi Barat	BNNP SULAWESI BARAT	Kelurahan Simboro	Simboro Kepulauan	Kota Mamuju
201	Sulawesi Barat	BNNP SULAWESI BARAT	Desa Topoyo	Topoyo	Kabupaten Mamuju Tengah
202	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Kelurahan Lantora	Polewali	Kabupaten Polewali Mandar
203	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Desa Laliko	Campalagian	Kabupaten Polewali Mandar
204	Maluku	BNNP MALUKU	Negeri Hitumessing	Leihitu	Kabupaten Maluku Tengah
205	Maluku	BNN Kota Tual	Desa Ohoitel	Pulau Dullah Utara	Kota Tual
206	Maluku	BNN Kota Tual	Kelurahan Lodar El	Pulau Dullah Selatan	Kota Tual
207	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Daruba	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
208	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Gotalamo	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
209	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Tongowai	Tidore Selatan	Kota Tidore Kepulauan
210	Bali	BNNP BALI	Desa Kediri	Kediri	Kabupaten Tabanan
211	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Akah	Klungkung	Kabupaten Klungkung
212	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Cakranegara Barat	Cakranegara	Kota Mataram

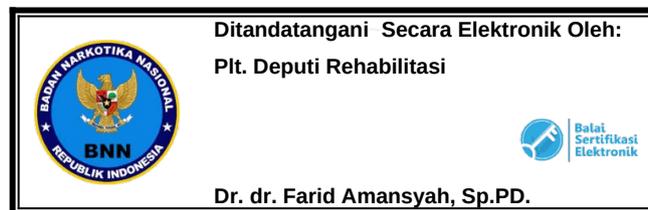
No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
213	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Gomong	Selaparang	Kota Mataram
214	Gorontalo	BNNP GORONTALO	Desa Ayula Utara	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
215	Gorontalo	BNNP GORONTALO	Desa Ayula Timur	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
216	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Tabulo	Mananggu	Kabupaten Boalemo
217	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Wonggahu	Paguyaman	Kabupaten Boalemo
218	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Buliide	Kota Barat	Kota Gorontalo
219	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Tomulabutao	Dungingi	Kota Gorontalo
220	Papua Barat	BNNP PAPUA BARAT	Kampung Aimasi	Distrik Prafi	Kabupaten Manokwari
221	Papua Barat	BNNP PAPUA BARAT	Kelurahan Manokwari Barat	Kecamatan Manokwari Barat	Kabupaten Manokwari
<b>Berkembang (49 unit)</b>					
1	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Perkebunan Tanah Datar	Datuk Tanah Datar	Kabupaten Batu Bara
2	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Raja Selatan	Tanjung Raja	Kabupaten Ogan Ilir
3	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Jawa Kanan SS	Lubuklinggau Timur II	Kota Lubuklinggau
4	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Tanjung Tawang	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Jaya Tunggal	Tuah Negeri	Kabupaten Musi Rawas
6	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Sumber Asri	Sumber Harta	Kabupaten Musi Rawas
7	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Muara Batun	Jejawi	Kabupaten Ogan Komering Ilir
8	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Celikah	Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ilir
9	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Desa Landbaw	Gisting	Kabupaten Tanggamus
10	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Dusun Tengah	Seginim	Kabupaten Bengkulu Selatan
11	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Tanggo Raso	Pino Raya	Kabupaten Bengkulu Selatan
12	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Cempaka Putih	Ciputat Timur	Kota Tangerang Selatan
13	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Hegarmanah	Jatinangor	Kabupaten Sumedang
14	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Ciptasari	Pamulihan	Kabupaten Sumedang
15	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Sekip Lama	Singkawang Tengah	Kota Singkawang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
16	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Jawa (Kampung Jawa)	Singkawang Tengah	Kota Singkawang
17	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hilir	Meliau	Kabupaten Sanggau
18	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hulu	Meliau	Kabupaten Sanggau
19	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Kumba	Jagoi Babang	Kabupaten Bengkayang
20	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Lembang	Sanggau Ledo	Kabupaten Bengkayang
21	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Tanjung Puri	Sintang	Kabupaten Sintang
22	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Ladang	Sintang	Kabupaten Sintang
23	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Kelurahan Kandangan Kota	Kandangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
24	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Karang Jawa	Padang Batung	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
25	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kelurahan Lawanga Tawongan	Poso Kota Utara	Kabupaten Poso
26	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Lemo	Makale Utara	Kabupaten Tana Toraja
27	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Ariang	Makale	Kabupaten Tana Toraja
28	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Tampo	Napabalano	Kabupaten Muna
29	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Palangga	Duruka	Kabupaten Muna
30	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Lepo-Lepo	Baruga	Kota Kendari
31	Maluku	BNNP MALUKU	Kelurahan Kudamati	Nusaniwe	Kota Ambon
32	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Tikbari	Namrole	Kabupaten Buru Selatan
33	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Debowae	Waelata	Kabupaten Buru
34	Bali	BNNP BALI	Desa Banjar Anyar	Kediri	Kabupaten Tabanan
35	Bali	BNN Kab. Klungkung	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Klungkung	Kabupaten Klungkung
36	NTB	BNN Kab. Bima	Desa Nipa	Ambalawi	Kabupaten Bima
37	NTB	BNN Kab. Bima	Kelurahan Nae	Rasanae Barat	Kota Bima
38	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Sampir	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
39	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Kelurahan Arab Kenangan	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
40	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Plampang	Plampang	Kabupaten Sumbawa
41	NTB	BNN Kab.	Desa Moyo Mekar	Moyo Hilir	Kabupaten

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
		Sumbawa			Sumbawa
42	NTT	BNNP NTT	Desa Kuanheun	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
43	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Liliba	Oebobo	Kota Kupang
44	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Naimata	Maulafa	Kota Kupang
45	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Meranti	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
46	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Talulobutu Selatan	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
47	Papua	BNNP PAPUA	Kelurahan Ardipura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
48	Papua	BNN Kab. Mimika	Inauga	Wania	Mimika
49	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kelurahan Dobonsolo	Sentani	Kabupaten Jayapura
<b>Tumbuh (32 unit)</b>					
1	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Sicincin	Payakumbuh Timur	Kota Payakumbuh
2	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Sakatiga	Indralaya	Kabupaten Ogan Ilir
3	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Muara Siban	Dempo Utara	Kota Pagar Alam
4	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Selibar	Pagar Alam Utara	Kota Pagar Alam
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Sidomulyo	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6	Kep. Bangka Belitung	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Desa Air Putih	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
7	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Desa Lancang Kuning	Bintan Utara	Kabupaten Bintan
8	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Ngampel	Mojoarjo	Kota Kediri
9	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Wirang	Haruai	Kabupaten Tabalong
10	Kalimantan Timur	BNNP KALIMANTAN TIMUR	Kelurahan Petung	Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara
11	Kalimantan Timur	BNNP KALIMANTAN TIMUR	Kelurahan Nipah-Nipah	Kecamatan Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara
12	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margo Mulyo	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan
13	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Loktuan	Bontang Utara	Kota Bontang
14	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Tinangkung	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai Kepulauan
15	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Mansamat B	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Kepulauan
16	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Bahoea Reko-Reko	Bungku Barat	Kabupaten Morowali
17	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Maliaro	Ternate Tengah	Kota Ternate
18	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Mangga Dua	Ternate Selatan	Kota Ternate
19	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Rum	Tidore Utara	Kota Tidore Kepulauan
20	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Bakbakan	Gianyar	Kabupaten Gianyar
21	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Tegal Tugu	Gianyar	Kabupaten Gianyar
22	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Pempatan	Rendang	Kabupaten Karangasem
23	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Rendang	Rendang	Kabupaten Karangasem
24	NTT	BNNP NTT	Desa Bolok	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
25	NTT	BNN Kab. Belu	Kelurahan Atambua	Kota Atambua	Kabupaten Belu
26	NTT	BNN Kab. Belu	Desa Tohe	Raihat	Kabupaten Belu
27	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Pentadio Barat	Telaga Biru	Kabupaten Gorontalo
28	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Tolotio	Tibawa	Kabupaten Gorontalo
29	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolite Jaya	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
30	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolinggula Ulu	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
31	Papua	BNN Kab. Mimika	Sempan	Mimika Baru	Mimika
32	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Dosay	Sentani Barat	Kabupaten Jayapura
<b>Rintisan (15 unit)</b>					
1	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Mibo	Banda Raya	Kota Banda Aceh
2	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Ie Mirah	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
3	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Bedilan	Belintang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
4	Kep. Bangka Belitung	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Desa Belo Laut	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
5	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Benda Baru	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
6	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Pondok Benda	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
7	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Pekauman	Banjarmasin Selatan	Kota Banjarmasin
8	Kalimantan	BNN Kota Bontang	Kelurahan	Bontang Barat	Kota Bontang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
	Timur		Belimbing		
9	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Desa Malei	Lage	Kabupaten Poso
10	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Lanona	Bungku Tengah	Kabupaten Morowali
11	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Mengwitani	Mengwi	Kabupaten Badung
12	Bali	BNN Kab. Badung	Kel. Kerobokan Kaja	Kuta Utara	Kabupaten Badung
13	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Ofalangga	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao
14	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Tesabela	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao
15	Papua	BNNP PAPUA	Kelurahan Gurabesi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
<b>Pra Fase (2 unit)</b>					
1	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Gorua	Tobelo Utara	Kabupaten Halmahera Utara
2	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Toweka	Galela	Kabupaten Halmahera Utara



**REKAPITULASI CAPAIAN FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM PER PROVINSI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Provinsi	Capaian Fase Perkembangan Tahun 2024					
		Pra Fase	Rintisan	Tumbuh	Berkembang	Tangguh	Prima
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	0	2	0	0	10	10
2	Sumatera Utara	0	0	0	1	21	10
3	Sumatera Barat	0	0	1	0	8	1
4	Riau	0	0	0	0	10	0
5	Jambi	0	0	0	0	8	0
6	Sumatera Selatan	0	1	4	7	7	1
7	Lampung	0	0	0	1	10	1
8	Kep. Bangka Belitung	0	1	1	0	5	3
9	Kepulauan Riau	0	0	1	0	7	0
10	Bengkulu	0	0	0	2	3	1
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	5	3
12	Banten	0	2	0	1	7	0
13	Jawa Barat	0	0	0	2	18	11
14	Jawa Tengah	0	0	0	0	9	11
15	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	8
16	Jawa Timur	0	0	1	0	14	22
17	Kalimantan Barat	0	0	0	8	6	2
18	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	6	0
19	Kalimantan Selatan	0	1	1	2	13	1
20	Kalimantan Timur	0	1	4	0	2	1
21	Kalimantan Utara	0	0	0	0	4	2
22	Sulawesi Utara	0	0	0	0	9	1
23	Sulawesi Tengah	0	2	3	1	3	5
24	Sulawesi Selatan	0	0	0	2	6	0
25	Sulawesi Tenggara	0	0	0	3	7	0
26	Sulawesi Barat	0	0	0	0	4	0
27	Maluku	0	0	0	3	3	0

No.	Provinsi	Capaian Fase Perkembangan Tahun 2024					
		Pra Fase	Rintisan	Tumbuh	Berkembang	Tangguh	Prima
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Maluku Utara	2	0	3	0	3	0
29	Bali	0	2	4	2	2	4
30	NTB	0	0	0	6	2	2
31	NTT	0	2	3	3	0	0
32	Gorontalo	0	0	4	2	6	0
33	Papua	0	1	2	3	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	2	0



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
 Plt. Deputi Rehabilitasi



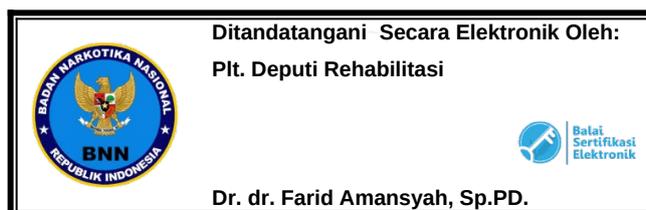

Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD.

### GAMBARAN KEGIATAN IBM TAHUN ANGGARAN 2024



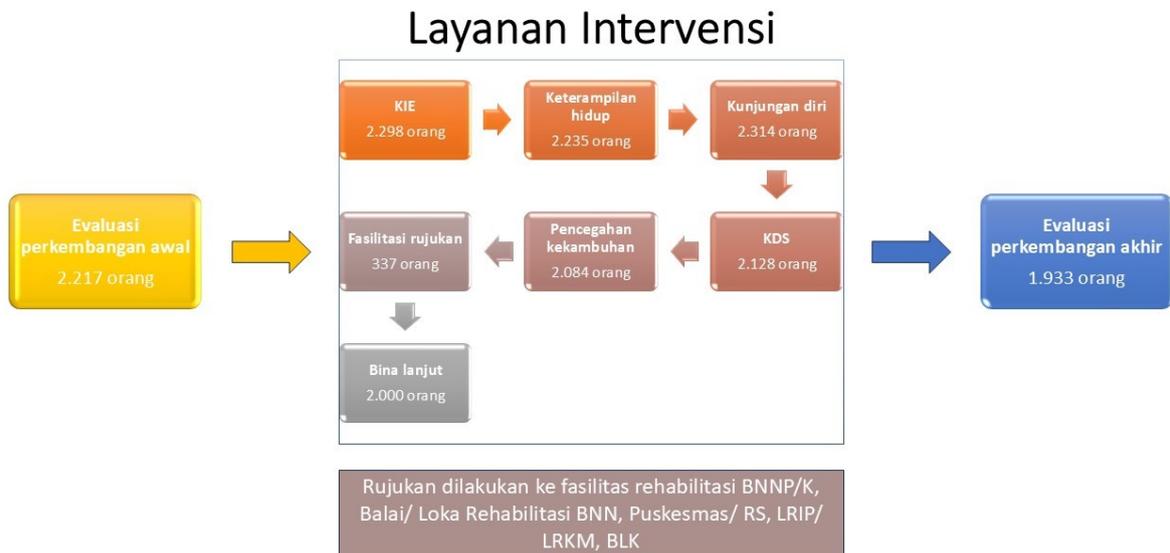
Kegiatan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota di tahun 2024 adalah:

- Kegiatan sosialisasi IBM dilakukan sebanyak 3.277 kali, dengan total peserta/ audiens sejumlah 73.749 orang. Sosialisasi dilakukan secara formal maupun informal, serta menggunakan media sosial. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi tentang program IBM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di desa/ kelurahan
- Kegiatan pemetaan dilakukan sebanyak 1.330 kali di 1.853 RT/ dusun/ banjar, dan memperoleh informasi estimasi jumlah penyalah guna narkotika sebanyak 6.613 orang. Kegiatan ini bertujuan memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkotika di wilayah desa/ kelurahan.
- Kegiatan penjangkauan telah dilakukan untuk menjangkau 3.073 orang penyalah guna narkotika, dan yang bersedia ditindaklanjuti untuk masuk dalam layanan IBM adalah 2.346 orang. Kegiatan ini bertujuan mendekati penyalah guna narkotika dan keluarga/ orang terdekatnya agar mengikuti layanan IBM. Secara umum, alasan para penyalah guna narkotika menolak mengikuti layanan di IBM antara lain karena merasa belum siap, malu, takut ditangkap polisi, tidak terganggu dengan penyalahgunaan zatnya, tidak diizinkan keluarga, atau sibuk bekerja.



### GAMBARAN LAYANAN IBM TAHUN ANGGARAN 2024

## Skrining & Penerimaan Awal



Layanan intervensi bagi penyalah guna narkoba di IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota, dengan gambaran berikut:

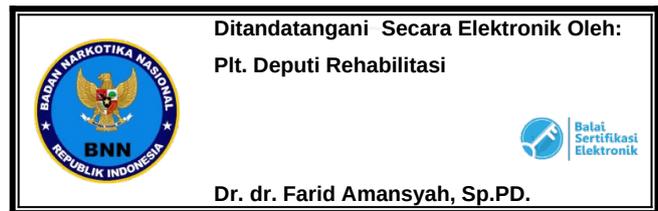
- Skrining dilakukan untuk mengidentifikasi risiko gangguan penggunaan narkoba menggunakan instrumen *Drug Abuse Screening Test* (DAST-10). Jumlah penyalah guna yang diskринing adalah 2.579 orang, dengan hasil:

- Tidak teridentifikasi adanya resiko : 97 orang (3,76%)
- Rendah : 2.158 orang (83,68%)
- Sedang : 243 orang (9,42%)
- Tinggi : 78 orang (3,02%)
- Sangat tinggi : 3 orang (0,12%)

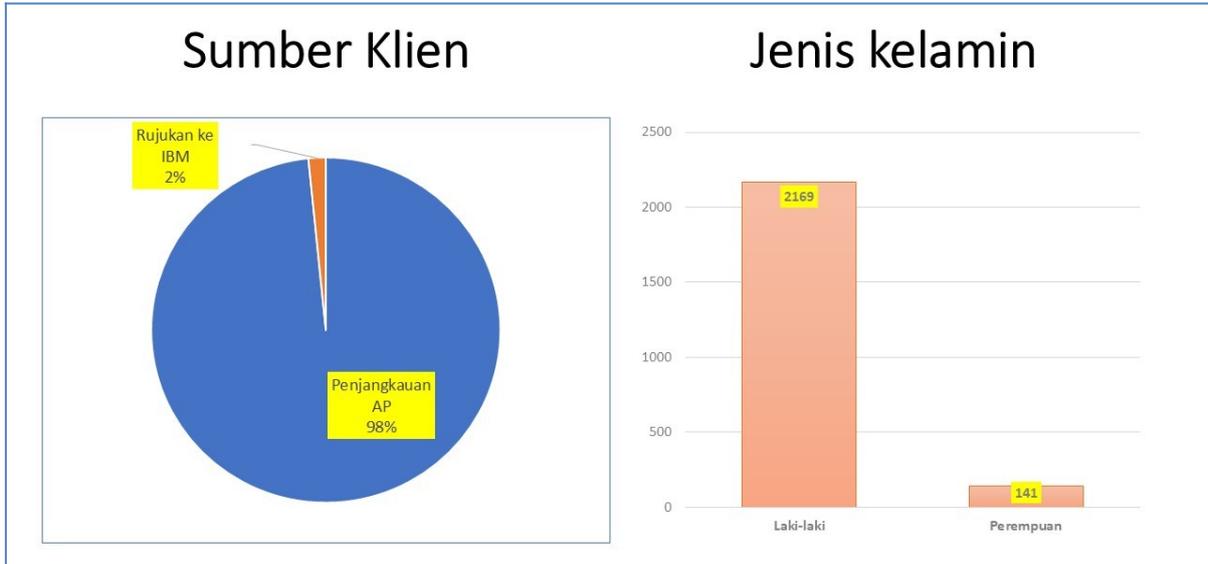
Klien yang dilayani di IBM adalah klien yang berada dalam kategori risiko Rendah hingga Sedang, dengan pendampingan petugas BNNP dan BNNKab/Kota.

- Penyalah guna yang telah diskriminasi dan dirujuk ke IBM untuk mengikuti layanan sebagai klien berjumlah 2.310 orang, semuanya telah mengikuti rangkaian Penerimaan Awal yaitu pengisian formulir registrasi, surat pernyataan kesediaan mengikuti layanan, serta formulir roda kehidupan.
- Klien IBM mengikuti layanan dalam waktu 16 minggu, terdiri dari:
  - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) telah diikuti oleh 2.298 orang klien. KIE bertujuan meningkatkan pengetahuan, kepedulian dan mendorong perubahan sikap dan perilaku klien.
  - Keterampilan Hidup telah diikuti 2.235 orang klien, bertujuan membekali klien IBM dengan *soft skill* agar dapat kembali beradaptasi, produktif dan melakukan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.
  - Kunjungan diri telah diikuti 2.314 orang klien, yang bertujuan membina hubungan, melakukan pemantauan dan mengetahui kondisi klien dalam lingkungannya sehari-hari. Kunjungan diri juga dilakukan untuk menambah kelengkapan data/ informasi tentang klien melalui wawancara dengan klien dan/ atau dengan anggota keluarga serta hasil observasi lingkungan tempat tinggal klien.
  - Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) telah diikuti 2.128 orang klien secara berkelompok, bertujuan mendorong anggota kelompok untuk saling memberikan dukungan, bertukar pengalaman dan keterampilan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, motivasi dan harapan satu sama lain.
  - Pencegahan kekambuhan diikuti 2.084 orang klien secara berkelompok, yang bertujuan membantu klien mengenal faktor pemicu, cara menghindarinya dan membangun keterampilan untuk mengatasi rasa ketagihan serta keterampilan menolak narkoba.
  - Sebanyak 337 orang klien difasilitasi untuk rujukan, antara lain ke fasilitas rehabilitasi BNNP & BNNK/ Kota, Balai/ Loka Rehabilitasi BNN, Puskesmas/ RS, Lembaga rehabilitasi instansi pemerintah/ komponen masyarakat, dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan kerja para klien agar bisa mandiri dan produktif secara ekonomi.

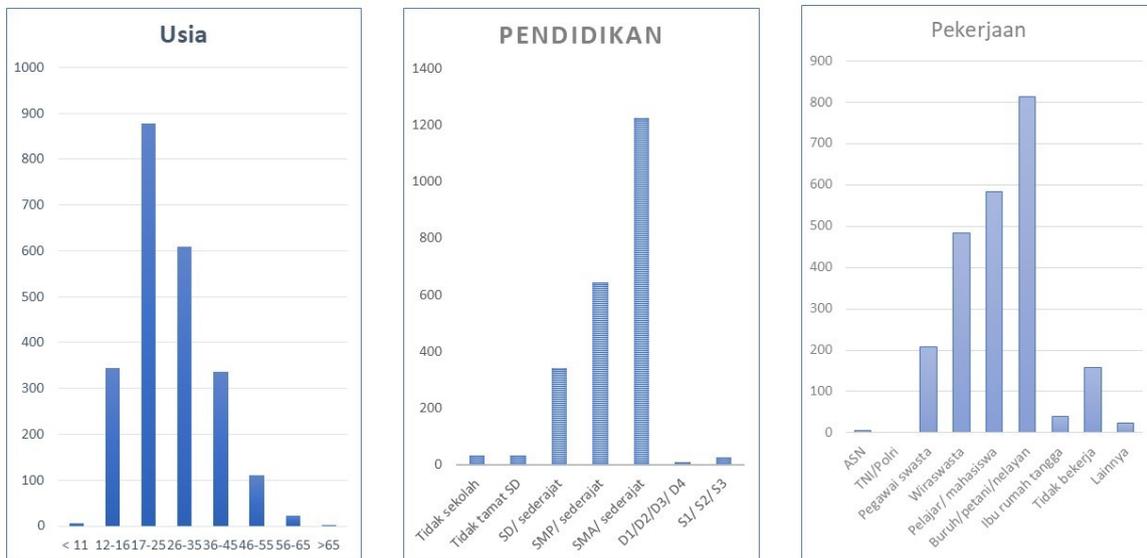
- Sebanyak 2.000 orang (86,58% dari jumlah klien) telah mengikuti rangkaian layanan bin a lanjut, yaitu penilaian pascarehabilitasi, pemantauan, pendampingan pemulihan, dan t erminasi yang dilakukan secara simultan oleh AP dan petugas BNNP & BNNK/ Kota
- Sebanyak 2.217 orang klien dilakukan evaluasi perkembangan tahap awal yaitu URICA, WHO-QoL, dan tes urin. Sementara klien yang telah dilakukan evaluasi perkembangan t ahap akhir adalah 1.933 orang
- Pemulihan penyalah guna narkoba tidak mungkin lepas dari keterlibatan keluarga dan/ atau orang terdekat. Pada tahun 2024, jumlah anggota keluarga/ orang terdekat yang dili batkan dalam layanan di IBM adalah 1.819 orang, terdiri dari orang tua, kakak, adik, sua mi/ istri, paman/ bibi atau guru. Beberapa klien IBM memilih untuk tidak melibatkan kelua rga dengan alasan takut, malu, atau berdomisili jauh dari keluarga.



### GAMBARAN PROFIL KLIEN IBM TAHUN ANGGARAN 2024

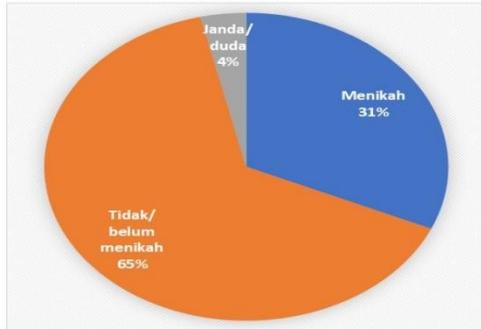


Total klien IBM pada tahun 2024 adalah 2.310 orang. Mayoritas merupakan hasil penjangkauan Agen Pemulihan, dan berjenis kelamin laki-laki.

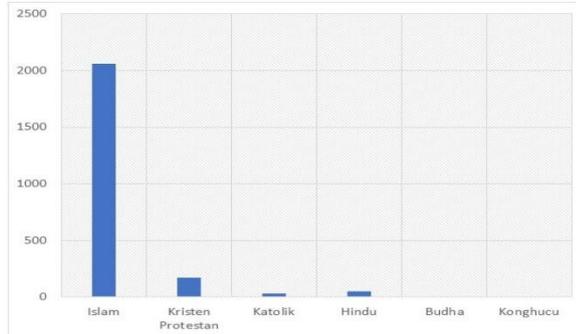


Mayoritas klien berada pada kelompok usia 17-25 tahun, dengan Pendidikan terakhir mayoritas adalah SMA/ sederajat, dan pekerjaan saat ini adalah buruh/ petani/ nelayan

## Status Pernikahan

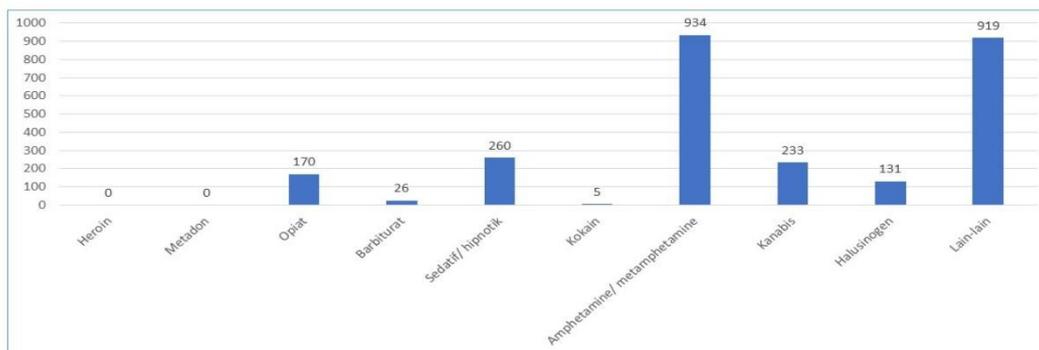


## Agama



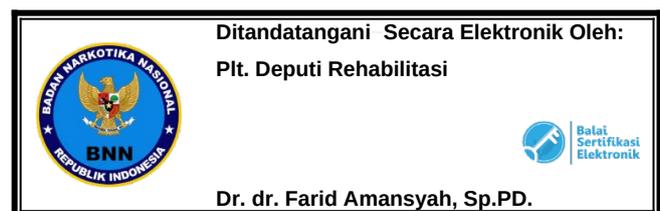
Mayoritas klien berstatus tidak/ belum menikah, dan mayoritas agama klien adalah Islam

## Jenis zat yang digunakan saat ini



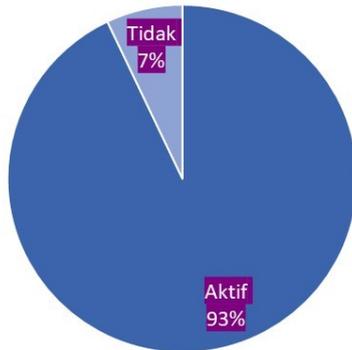
Ket: lain-lain mencakup alkohol, obat tanpa resep, inhalansia, komix, samcodin, zenith, bensin, tembakau gorilla, hexymer, tramadol, kratom, LL, carisoprodol, DMP

Jenis zat terbanyak yang digunakan oleh klien IBM adalah shabu, diikuti dengan kelompok sedatif/ hipnotik seperti benzodiazepine, dan ganja

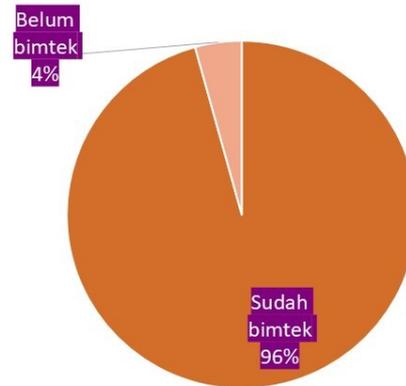


**GAMBARAN AGEN PEMULIHAN SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM IBM  
TAHUN ANGGARAN 2024**

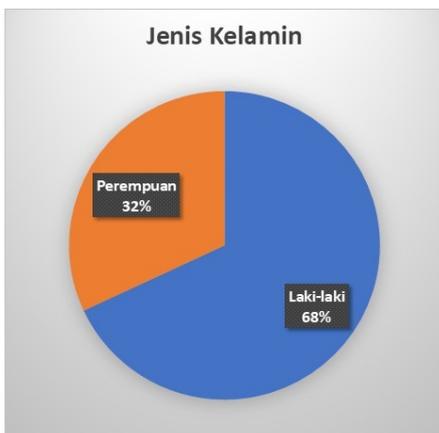
**Keaktifan AP**



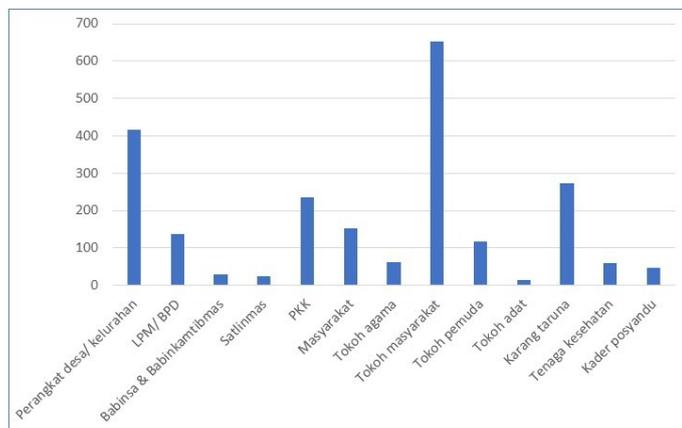
**Bimtek AP**



**Jenis Kelamin**



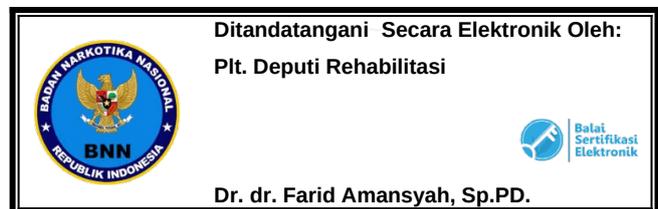
**Latar Belakang  
Kemasyarakatan**



Di tahun 2024, gambaran AP sebagai berikut:

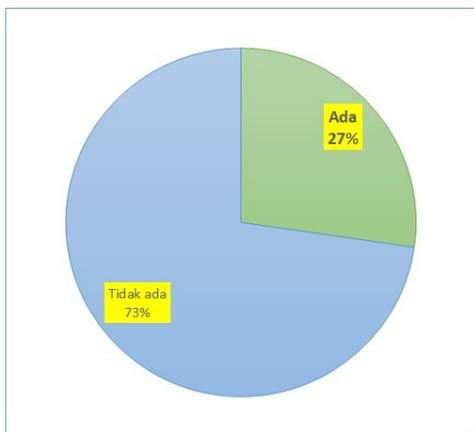
- Jumlah AP tahun 2024 adalah 2.210 orang, dan dari jumlah tersebut hanya 92,94% (2.054 orang) yang aktif menjalankan kegiatan & layanan IBM
- Sebanyak 95,70% dari total AP (2.115 orang) telah dilatih oleh petugas BNNP & BNNK/ Kota dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) secara resmi, sementara sisanya memperoleh informasi dengan metode tular ilmu di antara sesama AP maupun saat asistensi oleh petugas BNNP & BNNK/ Kota

- Mayoritas AP yaitu 1.504 orang (68,05%) berjenis kelamin laki-laki
- Latar belakang AP dalam masyarakat terdiri dari:
  - Sebanyak 18,82% (416 orang) merupakan perangkat desa/ kelurahan, 12 orang di antaranya adalah Kepala Desa/ Lurah
  - Sebanyak 6,15% (136 orang) merupakan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/ Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - Sebanyak 1,27% (28 orang) adalah perwakilan dari Babinsa dan Babinkamtibmas yang bertugas di Desa/ Kelurahan
  - Sebanyak 1,04% (23 orang) bertugas di Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
  - Sebanyak 10,59% (234 orang) adalah anggota Tim Penggerak PKK
  - Sebanyak 6,88% (152 orang) adalah perwakilan masyarakat, termasuk di antaranya mahasiswa, kelompok seni, pekerja sosial, penggiat/ relawan, dan organisasi kemasyarakatan
  - Sebanyak 2,81% (62 orang) adalah tokoh agama
  - Sebanyak 29,50% (652 orang) adalah tokoh masyarakat, termasuk di antaranya ketua RT, RW, kepala dusun, kepala lingkungan
  - Sebanyak 5,29% (117 orang) adalah tokoh pemuda
  - Sebanyak 0,59% (13 orang) adalah tokoh adat
  - Sebanyak 12,31% (272 orang) adalah ketua maupun anggota karang taruna
  - Sebanyak 2,67% (59 orang) adalah tenaga kesehatan, termasuk di antaranya adalah dokter, perawat dan petugas puskesmas, juga bidan desa
  - Sebanyak 2,08% (46 orang) adalah kader posyandu

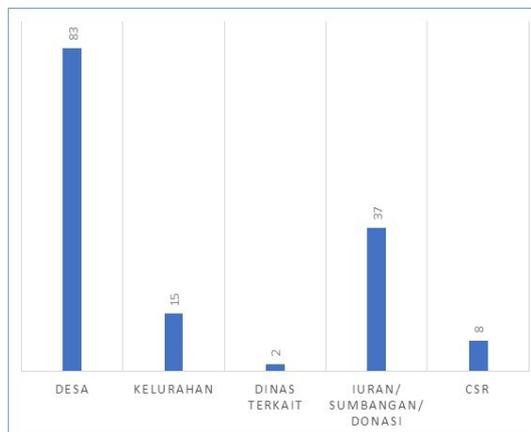


**GAMBARAN PENDANAAN MANDIRI UNTUK UNIT IBM  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pendanaan mandiri**



**Sumber**



Pada tahun 2024, sebanyak 115 dari 418 unit IBM (27,51%) telah memperoleh dukungan pendanaan mandiri, mayoritas berasal dari pemerintah desa. Dukungan dari pihak kelurahan relatif lebih sulit diperoleh karena diperlukan adanya aturan hukum secara resmi yang mengatur hingga ke komponen dan sub komponen kegiatan. Dukungan dana bagi unit IBM yang lokasinya di kelurahan cenderung memanfaatkan iuran/ sumbangan/ donasi dari masyarakat maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan swasta yang berdomisili di lokasi tersebut. Daftar unit IBM yang memperoleh dukungan pendanaan tahun 2024 adalah:

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Balee Me	APBG	Rp4,000,000	Pembuatan papan nama IBM, struktur, alur, dan kegiatan IBM lainnya
2	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Juli Paseh	APBG	Rp3,000,000	Kegiatan IBM, pembuatan papan nama IBM, struktur organisasi, alur kegiatan
3	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Cot Girek Kandang	RAB Desa	Rp7,500,000	Peningkatan kompetensi satgas narkoba
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Paya	RAB Desa	Rp20,000,000	ATK, konsumsi, spanduk, honor

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		we	Punteuet			dan atribut satgas
5	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Perdamaian	Dana desa	Rp2,000,000	Kegiatan IBM
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Kota Lintang	Dana desa	Rp2,000,000	Kegiatan IBM
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Mamplam	RAB Desa	Rp8,864,000	Operasional IBM
8	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Anoe Itam	RAB Gampong	Rp9,557,000	Studi banding ke lembaga rehabilitasi, operasionalisasi IBM
9	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Keuneukai	RAB Gampong	Rp8,000,000	Kegiatan IBM, insentif AP
10	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Sekip	RAB Desa	Rp10,953,052	Kegiatan IBM selama 10 bulan
11	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Paya Perupuk	RAB Desa	Rp10,000,000	Transport AP, kegiatan & layanan IBM
12	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perlis	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan & layanan IBM
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Meranti	RAB Desa	Rp2,750,000	Honor AP
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Sei Alim Hasak	RAB Desa Sumbangan warga	Rp5,400,000	Honor AP, sewa posko IBM, konsumsi kegiatan
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Barbaran Jae	Dana desa	Rp5,400,000	Transport & insentif bulanan AP
16	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Sei Rejo	RAB Desa	Rp7,000,000	Insentif AP
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Dolok Manampang	RAB Desa	Rp7,000,000	Insentif AP
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Buntu Turunan	RAB Nagori	Rp6,000,000	Insentif AP
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Perkebunan Tanah Datar	RAB Desa	Rp7,000,000	Honor AP
20	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Kwala Gunung	RAB Desa	Rp5,000,000	Honor AP
21	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Desa Balai Naras	RAB Desa	Rp6,590,000	Sosialisasi IBM
22	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Raja Selatan	RAB Desa	Rp10,000,000	Operasional Unit IBM
23	Sumatera	BNN Kota	Desa Tanjung	Dana desa	Rp3,000,000	Honor AP

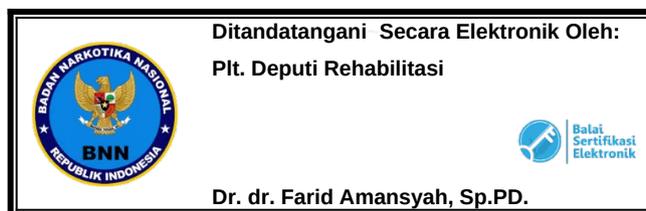
No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
	Selatan	Prabumulih	Telang			
24	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Bedilan	Dana desa	Rp25,000,000	Sosialisasi (termasuk desa bersinar)
25	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Sidomulyo	Dana desa	Rp40,000,000	Atribut AP, spanduk, kegiatan sosialisasi, ATK
26	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Tegal Binangun	RAB Desa	Rp3,000,000	
27	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Tetaan	RAB Desa	Rp3,000,000	Honor AP
28	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Sidoarjo	RAB Kampung	Rp2,594,000	Sosialisasi P4GN
29	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Bukit Besar	Kesbangpol Kota Dukungan warga	Rp5,550,000	Kegiatan & layanan IBM
30	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Asam	Kesbangpol Kota Dukungan warga	Rp5,850,000	Kegiatan & layanan IBM
31	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Rebo	RAB Desa	Rp3,500,000	Kegiatan IBM
32	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pagarawan	RAB Desa	Rp41,760,000	Honor AP, kegiatan IBM
33	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Timur	Dana Kelurahan (pemberdayaan masyarakat)	Rp20,000,000	Sosialisasi P4GN
34	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Bintaro	Dana kelurahan Sumbangan warga	Rp2,000,000	Kegiatan IBM, spanduk
35	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan	Dana kelurahan Sumbangan warga	Rp3,450,000	Kegiatan IBM, flyer
36	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Semper Barat	Dana kelurahan Sumbangan warga CSR	Rp6,750,000	Spanduk, Kegiatan IBM
37	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipanas	RAB Desa	Rp15,000,000	Kegiatan IBM
38	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipetir	RAB Desa	Rp5,000,000	Sosialisasi IBM
39	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Pagelaran	RAB Desa	Rp10,000,000	Kegiatan P4GN
40	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Jabon Mekar	RAB Desa Sumbangan masyarakat	Rp28,103,000	Operasional IBM
41	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Cinta Asih	Dana Kades	Rp7,300,000	Spanduk, transport AP, konsumsi

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
						kegiatan
42	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Sukaratu	Dana Kades Sumbangan masyarakat	Rp3,000,000	Operasional IBM
43	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Mekarjaya	RAB Desa	Rp8,850,000	Sosialisasi P4GN
44	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Pasirtamiang	RAB Desa	Rp9,000,000	Operasional IBM
45	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Kahiyangan	Sumbangan warga	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM
46	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Tempuran	RAB Desa	Rp15,000,000	Operasional IBM
47	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Muara	RAB Desa	Rp15,005,400	Operasional IBM
48	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Tlogosari Kulon	Sumbangan dari Kemensos	Rp5,100,000	Modal usaha klien IBM
49	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Gayamsari	Sumbangan masyarakat CSR	Rp2,650,000	Operasional IBM
50	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Bansari	RAB Desa	Rp77,623,000	Desa Bersinar Kegiatan IBM (termasuk pembelian CCTV)
51	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Gununggempol	RAB Desa	Rp7,968,000	Sosialisasi/ penyuluhan
52	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Bulurejo	Sumbangan masyarakat	Rp2,500,000	Operasional IBM
53	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Ringinarum	Dana desa	Rp2,350,000	Atribut AP, transport klien, sosialisasi IBM
54	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Kalitinggar	RAB Desa	Rp5,397,500	Penyuluhan penyalahgunaan narkotika
55	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Panican	Dana desa Sumbangan masyarakat	Rp8,100,000	Operasional IBM, banner
56	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Lawangaji	RAB Desa	Rp3,500,000	Operasional IBM
57	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Jeruklegi Kulon	RAB Desa Sumbangan masyarakat	Rp27,930,000	Sosialisasi P4GN, Rapat AP, sosialisasi
58	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Kebanggan	RAB Desa	Rp875,000	Transport AP
59	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Ledug	RAB Desa	Rp2,450,000	Sosialisasi IBM
60	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Giripurwo	APBDes	Rp8,000,000	Sosialisasi IBM
61	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Cerme	APBDes	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		A				
62	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Giwangan	Dana Kalurahan	Rp4,330,000	Kegiatan IBM
63	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan	RAB Kelurahan LPMK	Rp6,589,800	Workshop P4GN, dukungan pendaftaran kejar paket untuk sekolah klien
64	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Sinduharjo	RAB Kalurahan	Rp10,450,000	Layanan IBM
65	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Sinduadi	RAB Kalurahan	Rp6,200,000	Sosialisasi IBM
66	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Potorono	Dana desa	Rp3,666,000	Sosialisasi IBM
67	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Bangunharjo	RAB Desa	Rp6,600,000	Sosialisasi IBM
68	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Made	Dana desa luran masyarakat	Rp16,300,000	Operasional IBM
69	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Cerme Lor	Dana desa	Rp1,500,000	Operasional IBM
70	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Glindah	RAB Desa Sumbangan kades	Rp10,442,000	Sosialisasi IBM + tambahan untuk tes urin
71	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Wates	CSR luran AP	Rp3,250,000	Operasional IBM
72	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Meri	CSR luran AP	Rp3,550,000	Operasional IBM
73	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Karangsono	RAB Desa	Rp172,133,000	Operasional IBM dalam mendukung P4GN
74	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Sumberasri	RAB Desa	Rp20,000,000	Operasional IBM
75	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Kelurahan Temas	RAB Kelurahan	Rp1,225,000	Sosialisasi bahaya napza
76	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Junrejo	RAB Desa	Rp21,175,000	Sosialisasi IBM
77	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Kingking	Dana pemberdayaan kelurahan Sumbangan lurah	Rp3,000,000	Sosialisasi IBM, transport klien
78	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Wedoro	RAB Desa	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM
79	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Medaeng	luran warga	Rp2,500,000	operasional IBM
80	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Pogalan	Dana desa	Rp15,000,000	Atribut AP, sosialisasi IBM
81	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kedungdowo	RAB Desa	Rp10,000,000	Honor AP, transport klien
82	Jawa Timur	BNN Kab.	Desa	RAB Desa	Rp9,545,000	Honor AP,

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		Nganjuk	Kwagean			transport klien
83	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Dandangan	RAB Kelurahan	Rp1,150,000	Kegiatan IBM, atribut AP
84	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Ngampel	RAB Kelurahan	Rp10,000,000	Operasional IBM
85	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Gadang	RAB Kelurahan	Rp3,150,000	Operasional IBM
86	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Bandungrejosari	RAB Kelurahan	Rp8,052,000	Operasional IBM
87	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Paron	APBDes	Rp2,500,000	Operasional IBM
88	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Gadungan	APBDes	Rp17,365,000	Konsumsi & transport kegiatan IBM
89	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Karah	Iuran masyarakat	Rp2,500,000	Kegiatan IBM
90	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Wonorejo	Dana Lurah CSR	Rp6,200,000	Atribut AP, stiker, banner
91	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Tengah	Iuran masyarakat	Rp2,800,000	Operasional IBM
92	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Arang Limbung	APBDes	Rp7,430,000	Operasional IBM
93	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Galang	RAB Desa	Rp12,000,000	Kegiatan IBM, media sosialisasi
94	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Mantimin	APBDes	Rp6,000,000	Kegiatan & layanan IBM
95	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Loktuan	Dana Kelurahan CSR	Rp50,500,000	Study Banding ke Babes Lido, atribut AP, operasional IBM
96	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Air Hitam	Dinkes Bidang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (P2PTM) dan Dana kelurahan	Rp. 3.625.000	Sosialisasi IBM
97	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Kampung 6	Iuran warga	Rp2,700,000	Sosialisasi IBM
98	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Karang Rejo	Iuran warga	Rp2,700,000	Sosialisasi IBM
99	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Lelipang	RAB Kampung	Rp4,075,000	Kegiatan IBM
100	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kabobona	Dana desa	Rp8,950,000	Atribut AP, kegiatan IBM
101	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kotarindau	RAB Desa	Rp10,000,000	Kegiatan IBM, sarana prasarana, transport klien
102	Sulawesi	BNN Kota	Kelurahan	Iuran Pengusaha	Rp2,500,000	Operasional

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
	Tengah	Palu	Mamboro Barat			IBM
103	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Towale	CSR perusahaan yang dikelola desa	Rp5,000,000	Sosialisasi IBM, transport AP untuk penjangkauan
104	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Dondo	CSR perusahaan yang dikelola desa	Rp16,639,000	transport AP, konsumsi kegiatan & layanan, honor AP
105	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Mangga Dua	Sumbangan masyarakat	Rp3,500,000	Kegiatan & layanan IBM
106	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Patemon	RAB Desa Donatur	Rp43,550,000	Kegiatan IBM
107	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Lokapaksa	RAB Desa Donatur	Rp30,700,000	Kegiatan IBM
108	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	Sumbangan	Rp4,076,000	Operasional IBM
109	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sumerta Kelod	Sumbangan	Rp2,850,000	Operasional IBM, atribut AP
110	NTB	BNNP NTB	Desa Tanjung	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan IBM
111	NTB	BNNP NTB	Desa Medana	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan IBM
112	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Moyo Mekar	RAB Desa	Rp4,800,000	Sosialisasi, tes urin
113	NTT	BNNP NTT	Desa Bolok	Anggaran desa	Rp1,500,000	Operasional IBM
114	NTT	BNNP NTT	Desa Kuanheun	RAB Desa	Rp2,000,000	Operasional IBM
115	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Meranti	APBDes	Rp10,500,000	Kegiatan IBM



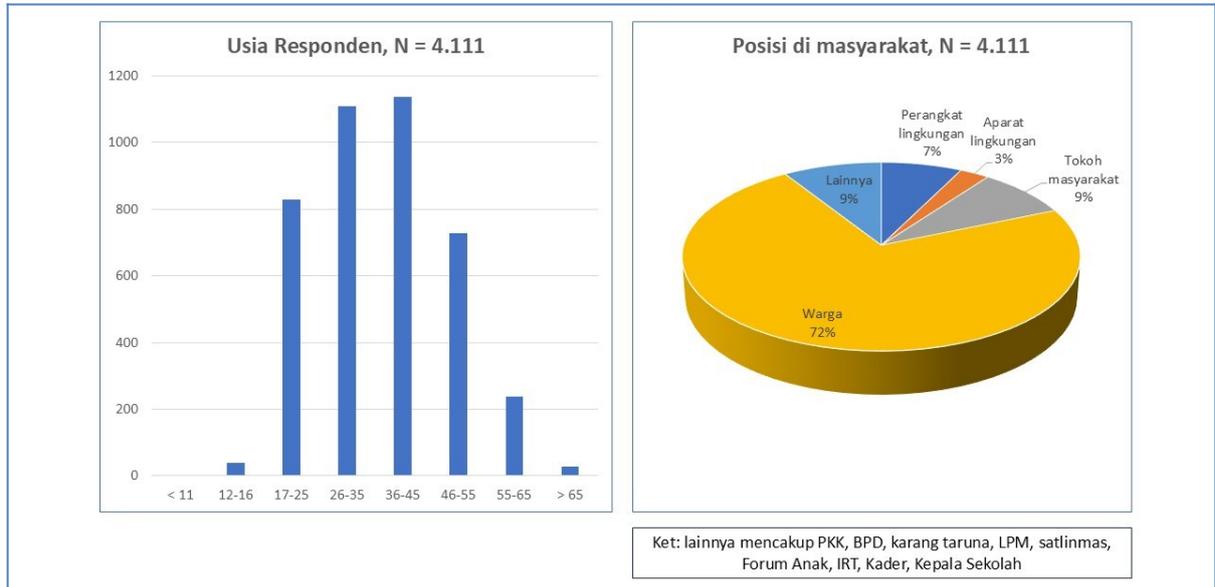
BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN VIII  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4244/XII/DE/RH.02.03/2024/BNN  
TANGGAL : 30 Desember 2024

## HASIL SURVEY KEBERMANFAATAN PROGRAM IBM

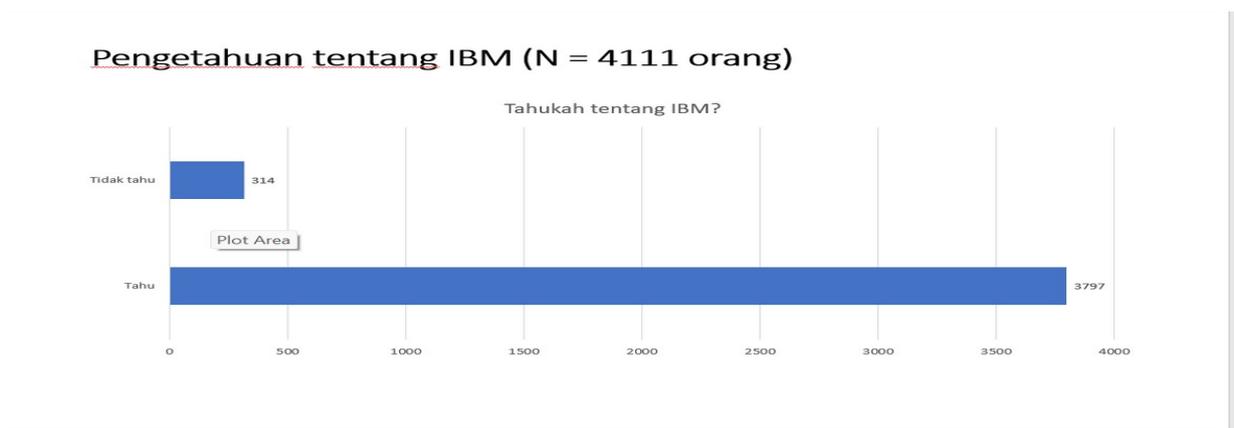
## TERHADAP LINGKUNGAN & MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

### A. Data demografi responden



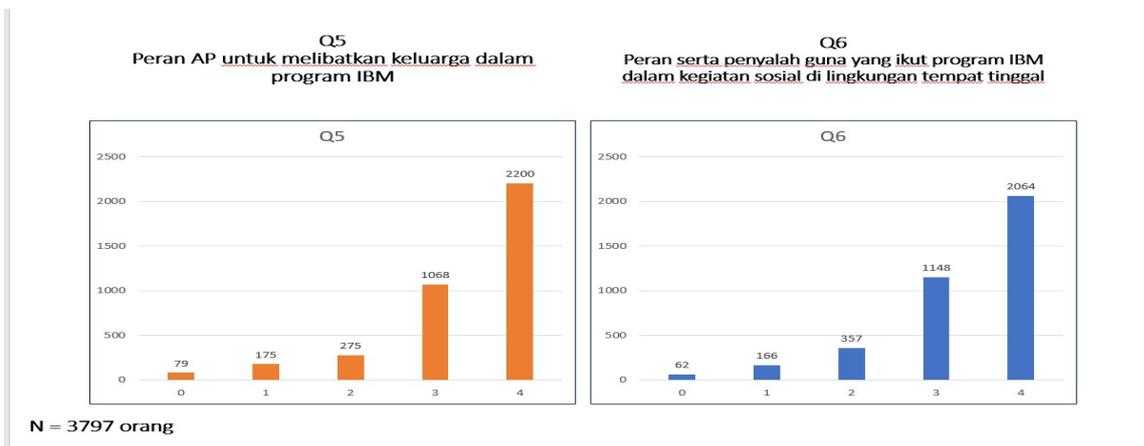
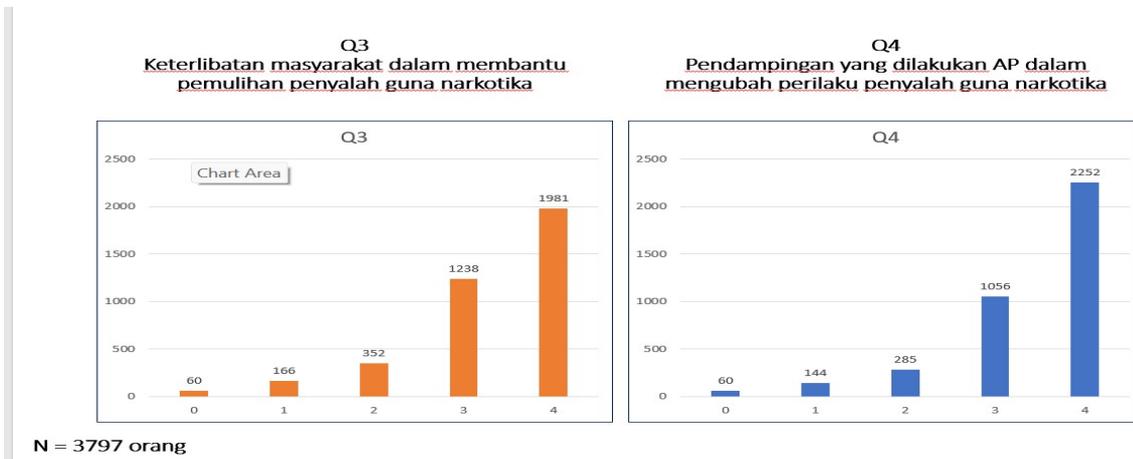
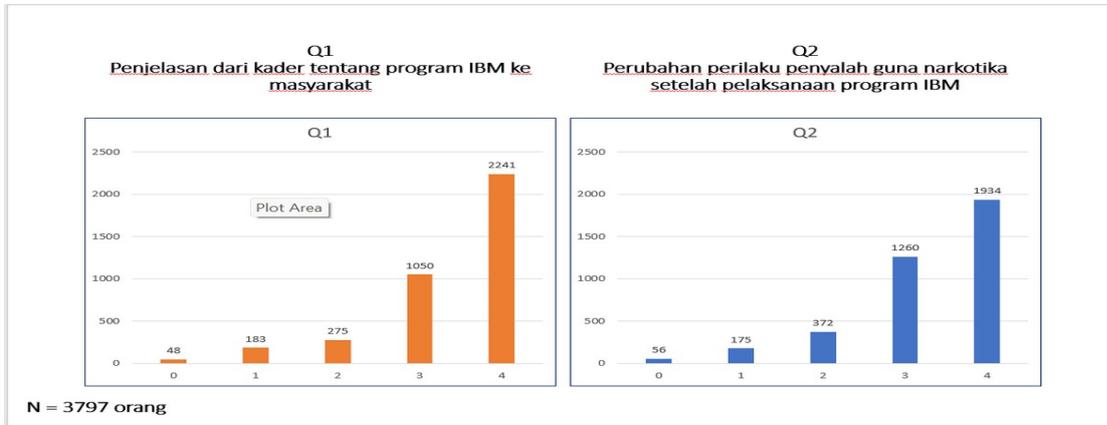
Mayoritas responden berada pada kelompok usia 36-45 tahun, dilanjutkan dengan selisih yang kurang signifikan dengan kelompok usia 26-35 tahun. Sebanyak 72% dari total responden merupakan warga masyarakat di lingkungan desa/ kelurahan Lokasi IBM.

### B. Pengetahuan tentang IBM



Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden (92,36%) mengetahui keberadaan IBM di desa/ kelurahan tempat mereka berdomisili

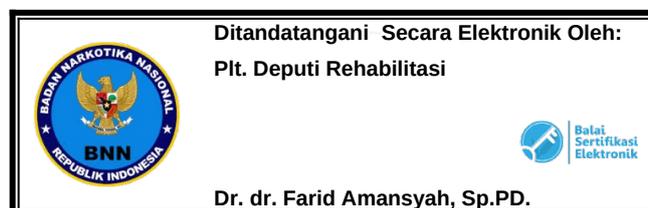
### C. Hasil Pelaksanaan survey



#### Penjelasan hasil survey:

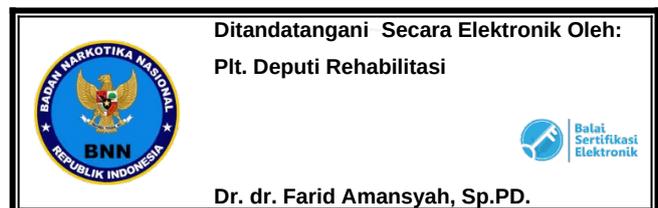
No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Interpretasi
1	Penjelasan dari Agen Pemulihan tentang program IBM kepada masyarakat sekitar	Mengenalkan dan melakukan sosialisasi tentang IBM dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut mendukung kegiatan	ada, cukup jelas maksud serta tujuan, dan cukup banyak warga yang tergerak untuk berpartisipasi

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Interpretasi
1	2	3	5
2	Perubahan perilaku penyalah guna narkoba setelah pelaksanaan program IBM di lingkungan Bapak/ Ibu	Lebih menilai peran IBM terhadap dampak kepada lingkungan menurut pengamatan masyarakat	Sudah mulai tidak menimbulkan kegaduhan/ keributan negatif, kegiatan perkumpulan para penyalah guna sudah tidak terlihat dan sudah jelas mereka sudah berubah
3	Keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkoba di wilayah Bapak/ Ibu	Menilai keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkoba	Ada keterlibatan warga yang diwakili pengurus tingkat desa/ kelurahan, keluarga yang anggotanya mengalami permasalahan narkoba dan banyak komponen masyarakat lain dalam jumlah yang banyak (lebih dari 5 orang)
4	Pendampingan yang dilakukan AP dalam mengubah perilaku penyalah guna narkoba di lingkungan Bapak/ Ibu	Menilai peran AP dalam mendampingi dan memantau para penyalah guna	Agen Pemulihan melakukan pendampingan, pemantauan dan pembimbingan secara bersungguh-sungguh pada penyalah guna narkoba
5	Peran AP untuk melibatkan keluarga dalam program IBM	Dampak yang optimal dapat terlihat dari pelibatan keluarga, karena keluarga berperan dalam proses pemulihan penyalah guna narkoba. Dengan melibatkan keluarga, keluarga dapat paham bahwa masalah kecanduan dapat terjadi berulang, sehingga pandangan negatif tentang penyalah guna narkoba dari keluarga dapat diminimalkan/ dihilangkan	Agen Pemulihan melibatkan keluarga, ada upaya pemberian informasi dan pengetahuan, keluarga tidak lagi memandang negatif penyalahguna, dan keluarga berpartisipasi dengan mengajak keluarga lain atau masyarakat untuk mendukung IBM
6	Peran serta para penyalah guna narkoba yang mengikuti program IBM dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal	Menilai, apakah setelah didampingi oleh IBM, mantan penyalahguna narkoba mulai peduli dan terlibat dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat (pengajian, 17 Agustusan, dsb).	Sangat berperan dalam kegiatan



**FAKTOR PENDUKUNG & PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PROGRAM IBM  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
2	3
<b>1. Petugas Pendamping IBM di BNNP &amp; BNNK/ Kota</b>	
Pemahaman yang komprehensif akan program IBM, termasuk alur kegiatan & layanan serta alokasi anggaran yang tersedia	Pendampingan unit IBM tidak menjadi prioritas karena banyaknya program bidang/ seksi Rehabilitasi yang harus dilakukan, dengan keterbatasan SDM yang dimiliki
Terjalannya hubungan baik dengan AP dan kepala desa/ lurah di lokasi IBM sebagai hasil dari tingginya intensitas koordinasi dan advokasi yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media bukan hanya tatap muka	Pemilihan dan penetapan lokasi IBM di daerah kategori waspada & bahaya, serta jaraknya cukup jauh dari BNNP/K/Kota terdekat sehingga mempengaruhi pembinaan IBM & menghambat program.
<b>2. Agen Pemulihan (AP)</b>	
Kepedulian serta kesadaran diri dari AP di dukung oleh peran serta aktif dari lingkungan masyarakat sekitar akan dampak bahaya dari penyalahgunaan narkoba	Pemahaman yang kurang optimal serta ketidakpercayaan diri dalam melaksanakan program IBM
Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai AP	Pelaksanaan program IBM tidak menjadi prioritas karena AP disibukkan dengan pekerjaan maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya
<b>3. Kepala Desa/ Lurah</b>	
Komitmen, minat dan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan dalam bidang rehabilitasi penyalah guna narkoba	Program IBM tidak menjadi prioritas dalam kegiatan pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan
Kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayahnya yang memerlukan penanganan segera	Penolakan data & informasi adanya masalah penyalahgunaan narkoba di wilayahnya





INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	034	066	689618	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KEDIRI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				



## **BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KEDIRI**

Jl. Selomangleng No.03 Pojok Mojoroto, Kota Kediri

 [infobnn\\_kotakediri](#)  [bnnkotakediri](#)  [@bnn\\_kotakediri](#)

 [infobnn\\_kotakediri](#)  [kedirikota.bnn.go.id](#)  [humas bnn kota kediri](#)